

**LAPORAN
PEREKONOMIAN
INDONESIA
2005**

<http://www.bps.go.id>

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2005

ISSN : 1858-0963
No. Publikasi : 06330.0613
Katalog BPS : 1404.
Ukuran Buku : 17,6 cm x 25 cm
Jumlah Halaman : 157

Naskah:
Subdirektorat Laporan Statistik

Gambar Kulit:
Subdirektorat Laporan Statistik

Foto:
Armed Jahja

Diterbitkan oleh:
Badan Pusat Statistik, Jakarta-Indonesia

Dicetak oleh:
CV. Nario Sari

Boleh dikutip dengan menyebut sumbernya

LAPORAN PEREKONOMIAN INDONESIA 2005

Anggota Tim Penyusun:

Pengarah : Slamet Sutomo

Editor : Slamet Sutomo
Sunaryo Urip
Sri Indrayanti

Penulis : Rohana Susiawati
Sofaria Ayuni
Lestyowati Endang W
Indah Budiati
Adwi Hastuti
Heru Kusharjanto
Rapinah
Ema Tusianti

Pengolahan Data/Penyiapan Draft : Heru Kusharjanto
Chairul Anam

Kontributor Data : Direktorat Neraca Produksi
Direktorat Neraca Konsumsi
Direktorat Statistik Pertanian
Direktorat Statistik Keuangan dan Harga
Direktorat Statistik Perdagangan dan Jasa
Direktorat Statistik Kependudukan

Kata Pengantar

Laporan Perekonomian Indonesia yang diterbitkan setiap tahun oleh Badan Pusat Statistik (BPS) memberikan gambaran umum tentang perekonomian Indonesia terutama perkembangan dari berbagai kinerja perekonomian. Laporan tersebut dibuat berdasarkan data tahun terakhir yang dihimpun baik oleh BPS maupun institusi lainnya.

Materi yang disajikan pada Laporan Perekonomian Indonesia terus mengalami penyempurnaan. Bila pada edisi 2002 terjadi perubahan format penyajian materi dibandingkan edisi-edisi sebelumnya, maka mulai edisi 2005 laporan ini dilengkapi dengan perkembangan ketenagakerjaan. **Publikasi Laporan Perekonomian Indonesia 2005** menyajikan informasi mengenai Pertumbuhan Ekonomi, Laju Inflasi, Perdagangan Luar negeri, Moneter, Investasi, Ketenagakerjaan dan Pariwisata.

Kepada semua pihak yang telah berpartisipasi, sehingga dapat terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih. Kritik dan saran sangat kami hargai guna perbaikan publikasi ini di masa mendatang.

Semoga laporan ini bermanfaat.

Jakarta, Mei 2006

KEPALA BADAN PUSAT STATISTIK

DR. Choiril Maksum
NIP : 340003890

Daftar Isi

	Halaman
Kata Pengantar	v
Daftar isi	vii
Daftar Tabel	ix
Daftar Gambar	xiii
Penjelasan Umum	xiv
Penjelasan Teknis	xv
Singkatan	xviii
1. Pendahuluan	1
2. Tinjauan Ekonomi	7
2.1 Ekonomi Dunia	9
2.2 Ekonomi Indonesia	14
3. Pendapatan Nasional	23
3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku	26
3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan	29
3.3 Pendapatan Per Kapita	32
4. Indeks Harga Konsumen dan Laju Inflasi	35
4.1 Indeks Harga Konsumen	37
4.2 Laju Inflasi	40
5. Perdagangan Luar Negeri	45
5.1 Perkembangan Ekspor	47
5.1.1. Ekspor Beberapa Komoditi Penting	49
5.1.2. Ekspor Menurut Negara Tujuan	55
5.2 Perkembangan Impor	58
5.2.1. Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi	61
5.2.2. Impor Menurut Negara Asal	64
5.3 Neraca Perdagangan Indonesia	66
6. Moneter	69
6.1 Uang Beredar	71
6.2 Nilai Tukar Rupiah	77
6.3 Suku Bunga	80

Daftar Isi

7. Investasi dan Perdagangan Saham	83
7.1 Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	85
7.2 Penanaman Modal Asing (PMA)	89
7.3 Bursa Efek Jakarta dan Surabaya	93
8. Pariwisata	97
8.1 Kunjungan Wisman ke Indonesia	100
8.2 Tingkat Penghunian Kamar Hotel	102
8.3 Rata-rata Lama Menginap	103
8.3.1 Tamu Asing dan Dalam Negeri	103
8.3.2 Tamu Asing	105
8.3.3 Tamu Dalam Negeri	106
8.4 Penerimaan Devisa dari Wisatawan menurut Negara	108
9. Ketenagakerjaan	111
9.1 Keadaan Angkatan Kerja	113
9.2 Keadaan Pekerja	118
9.2.1 Potensi Sektor Ekonomi	118
9.2.2 Upah yang Diterima Pekerja	119
9.2.3 Elastisitas Kesempatan Kerja	126
9.2.4 Produktivitas Pekerja	127
10. Penutup	133
Daftar Pustaka	139

Daftar Tabel

	Halaman
2.1 Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara-negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN, <i>Economic Growth Rate of World, Advanced Economies Country, Development Country, and ASEAN, 2001 - 2005</i>	10
2.2 Laju Inflasi Negara-negara Maju, Negara Berkembang, dan ASEAN, <i>Inflation Rate of Advanced Economies Country, Development Country, and ASEAN, 2001 - 2005</i>	13
2.3 Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia, <i>Economic Indicators of Indonesia, 2002 - 2005</i>	16
3.1 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha, <i>Gross Domestic Product at Current Market Prices by Industrial Origin, 2001 - 2005</i>	27
3.2 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan, <i>Gross Domestic Product at Current Market Prices by Type of Expenditure, 2001 - 2005</i>	28
3.3 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha, <i>Gross Domestic Product at Constant 2000 Market Prices by Industrial Origin, 2001 - 2005</i>	30
3.4 Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Penggunaan, <i>Gross Domestic Product at Constant 2000 Market Prices by Type of Expenditure, 2001 - 2005</i>	31
3.5 Produk Domestik Bruto Per Kapita, <i>Per capita Gross Domestic Product, 2001 - 2005</i>	33
4.1 Perkembangan Indeks Harga Konsumen Gabungan 45 Kota di Indonesia, <i>Consumer Price Indices for Each of the 45 Cities in Indonesia, 2001 - 2005</i>	38
4.2 Laju Inflasi Indonesia menurut Kelompok Barang Kebutuhan <i>Inflation Rate of Indonesia by Commodity Group, 1998 - 2005</i>	41
4.3 Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional, <i>Share Commodity Group to National Inflation Rate, 2005</i>	42
4.4 Laju Inflasi 45 Kota di Indonesia, <i>Inflation Rate of 45 Cities in Indonesia, 2000 - 2005</i>	44

Daftar Tabel

5.1	Nilai Ekspor Indonesia menurut Migas dan Non Migas, <i>Indonesian Export Value by Oil & Gas and Non Oil & Gas, 2001 - 2005</i>	48
5.2	Ekspor komoditi Penting Indonesia, <i>Export of Primary Commodity Indonesia, 2001 - 2005</i>	51
5.3	Nilai Ekspor Indonesia menurut Golongan Barang SITC, <i>Export Value by SITC Commodity Groups, 2001 - 2005</i>	54
5.4	Nilai Ekspor Indonesia menurut Negara Tujuan, <i>Export by Country of Destination, 2001 - 2005</i>	57
5.5	Nilai Impor Indonesia menurut Migas dan Non Migas, <i>Impor Value Indonesian by Oil & Gas and Non Oil & Gas, 2001 - 2005</i>	59
5.6	Nilai Impor Indonesia menurut Golongan Barang Ekonomi, <i>Imports Value of Indonesian by Broad Economic Categories, 2001 - 2005</i> ..	62
5.7	Nilai Impor Indonesia (CIF) menurut Golongan Barang SITC, <i>Imports Value of Indonesian by Commodity Groups CIF, 2001 - 2005</i>	63
5.8	Impor Indonesia menurut Negara Asal, <i>Imports of Indonesian by Country of Origin, 2001 - 2005</i>	65
5.9	Neraca Perdagangan Indonesia, <i>Indonesian Balance of Trade, 2001 - 2005</i>	67
6.1	Perkembangan Uang Beredar dan Uang Primer, <i>Trend of Money Supply and Reserve Money, 2004 - 2005</i>	72
6.2	Faktor-Faktor yang mempengaruhi Uang Beredar, <i>Affecting Factor of Money Supply, 2001 - 2005</i>	75
6.3	Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Rupiah, <i>Trend of Foreign Exchange Rate, 2004 - 2005</i>	79
6.4	Suku Bunga Domestik, <i>Domestic Interest Rate, 2004 - 2005</i>	81
7.1	Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor <i>Approved Domestic Investment Projects by Sector, 2001 - 2005</i>	86
7.2	Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, <i>Approved Domestic Investment Projects by Island, 2001 - 2005</i>	88
7.3	Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor, <i>Approved Foreign Direct Investment Projects by Sector, 2001 - 2005</i>	90
7.4	Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, <i>Approved Foreign Direct Investment Projects by Island, 2001 - 2005</i>	92

Daftar Tabel

7.5	Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya, <i>Transaction and Index of Stock at The Jakarta and Surabaya Stock Exchanges, 2001 - 2005</i>	95
8.1	Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia, <i>Arrival of Foreign Tourist in Indonesia, 2000 - 2005</i>	101
8.2	Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW), <i>Room Occupancy Rate of Classified Hotels in 10 Provinces of Main Tourist Destination, 2000 - 2005</i>	103
8.3	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Dalam Negeri di Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW), <i>Average Length of Stay of Foreign Guest and Domestic Guests at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination, 2000 - 2005</i> ...	104
8.4	Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing di Hotel Berbintang di 10 Propinsi daerah Tujuan Wisata (DTW), <i>Average Length of Stay of Foreign Guest at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination, 2000 - 2005</i>	106
8.5	Rata-rata Lama Menginap Tamu Dalam Negeri di Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW), <i>Average Length of Stay of Domestic Guests at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination, 2000 - 2005</i>	107
8.6	Wisatawan yang Datang ke Indonesia dan Penerimaan Devisa dari Wisatawan menurut Negara, <i>Arrival of Foreign Tourist in Indonesia and Revenue from Foreign Tourist by Country, 2002 - 2005</i>	109
9.1	Indikator Ketenagakerjaan menurut Daerah Tempat Tinggal <i>Labour Force Indicators By Region, 2001-2005</i>	115
9.2	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Propinsi <i>Labour Force Indicators By Province, 2002-2005</i>	116
9.3	Indikator Ketenagakerjaan Menurut Jenis Kelamin <i>Employment Indicators by Sex, 2001-1005</i>	117
9.4	Persentase Penduduk yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan <i>Percentage of Population who Worked By Main Industry, 2001-2005</i>	119
9.5	UMP, KHM dan Laju Inflasi <i>UMP, KHM and Inflation Rate, 2001-2005</i>	120

Daftar Tabel

9.6	Distribusi Pekerja menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal <i>Distribution of Population Who Worked By Value of Wage and Region, 2001-2005</i>	122
9.7	Distribusi Pekerja Menurut Upah dan Jenis Kelamin <i>Distribution of Population Who Worked By Value of Wage and Sex, 2001-2005</i>	125
9.8	Elastisitas Kesempatan Kerja <i>Employment elasticities, 2002-2004</i>	127
9.9	Produktivitas Menurut Propinsi dan Komoditas <i>Productivity By Province and Commodity, 2002-2004</i>	129
9.10	Produktivitas Menurut Lapangan Pekerjaan <i>Productivity By Main Industry, 2002-2004</i>	130

<http://www.bps.go.id>

Daftar Gambar

	Halaman
1. Gambar 2.1 Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Singapura, dan ASEAN, 2001 - 2005	11
2. Gambar 2.2 Laju Inflasi Indonesia, Singapura, dan ASEAN, 2001 - 2005	11
3. Gambar 2.3 Nilai Ekspor dan Impor Indonesia, 2001 - 2005	18
4. Gambar 3.1 Pertumbuhan PDB menurut Lapangan Usaha, 2001 - 2005	29
5. Gambar 3.2 PDB Per Kapita, 2001 - 2005	32
6. Gambar 4.1 Laju Inflasi Indonesia, 2005	40
7. Gambar 5.1 Nilai Ekspor Indonesia, 2001 - 2005	48
8. Gambar 5.2 Nilai Impor Indonesia menurut Golongan Barang Ekonomi, 2001 - 2005	61
9. Gambar 6.1 Jumlah Uang Beredar, 2001 - 2005	76
10. Gambar 6.2 Perkembangan Nilai Tukar Mata uang Asing, 2005	76
11. Gambar 7.1 PMDN yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, 2001 - 2005 .	88
12. Gambar 7.2 PMA yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, 2001 - 2005 ...	93
13. Gambar 8.1 Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia, 2001 - 2005	102
14. Gambar 8.2 Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 10 Daerah Tujuan Wisata, 2001 - 2005	102
15. Gambar 9.1 Tingkat Pengangguran Terbuka menurut Daerah Tempat Tinggal, 2001 - 2005	114
16. Gambar 9.2 Penduduk Yang Bekerja menurut Lapangan Pekerjaan, 2001 - 2005	118

Penjelasan Umum

Tanda-tanda yang digunakan dalam publikasi ini, adalah sebagai berikut :

Data belum tersedia	:	...
Data tidak tersedia	:	-
Data dapat diabaikan	:	0
Tanda desimal	:	,
Angka sementara	:	x)
Angka sangat sementara	:	xx)
Angka diperbaiki	:	r)
Angka perkiraan	:	e)

<http://www.bps.go.id>

Penjelasan Teknis

1. Penghitungan PDB atas dasar harga konstan yang sebelumnya menggunakan tahun dasar 1993, sejak tahun 2004 menggunakan tahun dasar 2000. Penghitungan PDB dengan tahun dasar baru tersebut telah dihitung mundur sampai dengan tahun 2000.
2. Penghitungan PDB atas dasar harga berlaku yang sebelumnya didasarkan pada tabel Input Output tahun 1995, sejak tahun 2004 berdasarkan tabel Input Output 2000. Dengan perubahan tersebut maka terjadi perubahan cakupan pada masing-masing komponen PDB sehingga mengakibatkan berubahnya PDB atas dasar harga berlaku tahun 2000-2003 yang sebelumnya telah dihitung oleh BPS.
3. Mulai bulan Januari 2004, Indeks Harga Konsumen (IHK) dihitung berdasarkan pola konsumsi hasil Survei Biaya Hidup (SBH) di 45 kota tahun 2002 yang mencakup sekitar 283-397 komoditas. Sedangkan IHK dan laju inflasi sebelum Januari 2004 masih menggunakan pola konsumsi hasil SBH di 44 kota propinsi tahun 1996 (mencakup sekitar 249-353 komoditas).
4. Uang Kartal : adalah uang kertas dan uang logam yang dikeluarkan oleh bank Indonesia sebagai alat pembayaran yang sah
5. Uang Giral : Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang terdiri atas rekening giro, kiriman uang (transfer) dan kewajiban segera lainnya antara lain simpanan berjangka yang telah jatuh waktu
6. Uang kuasi : Simpanan rupiah milik penduduk pada sistem moneter yang untuk sementara waktu kehilangan fungsinya sebagai alat tukar. Uang kuasi terdiri dari deposito berjangka, tabungan dalam rupiah dan valuta asing, dan giro dalam valuta asing.
7. M1 : adalah uang beredar dalam arti sempit yaitu meliputi uang kartal dan uang giral
M2 : adalah uang beredar dalam arti luas yaitu meliputi uang kartal, uang giral ditambah dengan uang kuasi
8. Pencatatan Statistik Ekspor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Ekspor Barang (PEB) dan Pemberitahuan Ekspor Barang tertentu (PEBT), dan pencatatan Statistik Impor berdasarkan dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB), yang diterima BPS dari kantor-kantor Bea dan Cukai.

Penjelasan Teknis

9. Sistem pengolahan adalah Carry over yaitu dokumen dari satu bulan tertentu penerimaannya ditutup setelah satu bulan pada bulan berikutnya, dokumen yang datang sesudah tanggal penutupan dianggap sebagai transaksi bulan berikutnya.
10. Klasifikasi jenis/kelompok barang yang digunakan dalam statistik Ekspor dan Impor adalah:
 - a. Harmonized System (HS), untuk keperluan pengenaan tarif
 - b. Standard International Trade Classification (SITC), penyusunannya ditekankan untuk keperluan Statistik Ekonomi.
 - c. International Standard Industrial Classification (ISIC), untuk mengelompokkan lapangan usaha yang ada dalam kegiatan ekonomi atau asal lapangan usaha suatu komoditi dihasilkan.
11. Broad Economic Category (BEC), untuk mengetahui penggunaan akhir dari suatu barang yaitu barang konsumsi, bahan baku dan penolong, dan barang modal.
12. General Agreement on Tariffs and Trade (GATT), untuk mengetahui barang primer yaitu SITC kepala 1, 2, 3, 4 dan 68, dan barang bukan primer yaitu SITC kepala 5, 6 kecuali 68, 7 dan 8.
13. Tamu Asing adalah setiap orang yang mengunjungi suatu negara di luar tempat tinggalnya, didorong oleh suatu atau beberapa keperluan tanpa bermaksud memperoleh penghasilan di tempat yang dikunjungi.
14. Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel adalah banyaknya malam kamar yang dihuni dibagi dengan banyaknya malam yang tersedia dikalikan 100%.
15. Rata-rata lamanya tamu menginap adalah banyaknya malam tempat tidur yang dipakai dibagi dengan banyaknya tamu yang datang menginap ke akomodasi.
16. Penduduk usia kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun lebih
17. Pekerja adalah seseorang yang melakukan kegiatan ekonomi dengan maksud untuk memperoleh pendapatan atau membantu memperoleh pendapatan/keuntungan, paling sedikit 1 jam tidak terputus dalam seminggu yang lalu, kegiatan tersebut termasuk pula kegiatan pekerja tidak dibayar yang membantu dalam suatu usaha /kegiatan ekonomi

Penjelasan Teknis

18. Pengangguran terbuka adalah mereka yang mencari pekerjaan atau mempersiapkan usaha, atau mereka yang tidak mencari pekerjaan karena merasa sudah tidak mungkin mendapatkan pekerjaan dan mereka yang sudah punya pekerjaan tetapi belum mulai bekerja
19. Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara atau wilayah. TPAK diukur sebagai persentase angkatan kerja (pekerja dan pengangguran) terhadap jumlah penduduk usia kerja
20. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) mengindikasikan tentang penduduk usia kerja yang termasuk dalam kelompok pengangguran. TPT diukur sebagai persentase pengangguran terhadap jumlah angkatan kerja
21. Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) mengindikasikan besarnya penduduk usia kerja yang bekerja atau sementara tidak bekerja di suatu negara atau wilayah. TKK diukur sebagai persentase orang yang bekerja terhadap jumlah penduduk yang termasuk angkatan kerja
22. Produktivitas pekerja menurut propinsi diukur dengan membagi PDRB dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap propinsi
23. Produktivitas pekerja menurut lapangan pekerjaan diukur dengan membagi PDB pada masing-masing lapangan pekerjaan dengan jumlah penduduk yang bekerja di setiap lapangan pekerjaan

Singkatan

ADB	:	Asian Development Bank
ADO	:	Asian Development Outlook
AFTA	:	Asia Pacific Free Trade Agreement
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
ASEAN	:	Association South East Asia Nation
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BES	:	Bursa Efek Surabaya
BI	:	Bank Indonesia
BKPM	:	Badan Koordinasi Penanaman Modal
bps	:	basis points
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
CIF	:	Cost Insurance and Freight
DTW	:	Daerah Tujuan Wisata
GDP	:	Gross Domestic Product
GKG	:	Gabah Kering Giling
IHK	:	Indek Harga Konsumen
IHSG	:	Indek Harga Saham Gabungan
IMF	:	International Monetary Fund
I - O	:	Input - Output
KHM	:	Kebutuhan Hidup Minimum
LDC	:	Least Developed Countries
NTP	:	Nilai Tukar Petani
OPT	:	Operasi Pasar Terbuka
PDB	:	Produk Domestik Bruto
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PUAB	:	Pasar Uang Antar Bank
SBI	:	Sertifikat Bank Indonesia
SITC	:	Standard International Trade Classification
SARA	:	Suku, Agama, Ras, dan Antar Golongan
SARS	:	Severe Acute Respiratory Syndrome
TDL	:	Tarif Dasar Listrik
TKK	:	Tingkat Kesempatan Kerja
TPAK	:	Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja
TPK	:	Tingkat Penghunian Kamar
TPT	:	Tingkat Pengangguran Terbuka
UMP	:	Upah Minimum Propinsi
Valas	:	Valuta Asing (Foreign Currency)
WEO	:	World Economic Outlook
Wisman	:	Wisatawan Mancanegara
WTC	:	World Trade Center
WTO	:	World Trade Organization

PENDAHULUAN



<http://www.bp.go.id>

Membaiknya kinerja perekonomian selama tahun 2004, yang ditunjukkan dengan meningkatnya kinerja beberapa indikator-indikator makro ekonomi, merupakan pondasi yang kuat bagi perkembangan perekonomian tahun 2005. Perekonomian pada tahun 2005 diperkirakan akan tumbuh lebih cepat dan stabilitas ekonomi semakin terjaga. Pada awal-awal tahun 2005, perkiraan tersebut tidak meleset. Hal ini ditunjukkan dengan semakin meningkatnya kinerja ekonomi yang mendorong peningkatan konsumsi dan kegiatan investasi sehingga mampu mendukung pencapaian tingkat pertumbuhan yang cukup tinggi. Pada triwulan awal tahun 2005 pertumbuhan ekonomi telah mencapai 6,3 persen (y-o-y), jauh lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan triwulan yang sama pada tahun 2004 yang tercatat sebesar 4,1 persen.

Namun perkembangan selanjutnya, pertumbuhan ekonomi Indonesia menghadapi beberapa kendala. Gejala eksternal yaitu melonjaknya harga minyak mentah, pengetatan kebijakan moneter global serta kenaikan suku bunga the Fed berpengaruh terhadap tertekannya kondisi makro ekonomi Indonesia. Hal ini ditunjukkan oleh melambatnya pertumbuhan ekonomi sejak triwulan II hingga triwulan akhir 2005. Perlambatan tersebut terutama disebabkan menurunnya daya beli masyarakat dan biaya produksi yang meningkat akibat kenaikan harga BBM. Selain itu pertumbuhan investasi yang menurun akibat iklim yang belum kondusif juga menyebabkan melambatnya pertumbuhan ekonomi.

Tekanan pada kestabilan ekonomi Indonesia juga ditunjukkan oleh melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS. Pengetatan kebijakan moneter dan kenaikan suku bunga the Fed berdampak pada menguatnya dolar terhadap hampir seluruh mata uang dunia termasuk rupiah. Di sisi internal meningkatnya permintaan valas untuk memenuhi kebutuhan impor terutama impor minyak oleh Pertamina dan pembayaran utang luar negeri juga mendorong terdepresiasi nilai rupiah.

Sementara itu tingginya harga minyak internasional telah menyebabkan membengkaknya subsidi BBM yang ditanggung

Pendahuluan

pemerintah. Di samping itu rendahnya harga BBM di dalam negeri dibandingkan dengan harga pasar menyebabkan peningkatan konsumsi BBM di masyarakat dan mendorong terjadinya penyelundupan BBM ke luar negeri. Dengan kondisi ini akhirnya pemerintah dengan berat hati terpaksa mengeluarkan kebijaksanaan menaikkan harga BBM. Dampak dari kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari 100 persen pada 1 Oktober 2005, adalah kenaikan harga berbagai barang dan jasa yang cukup tinggi. Hal ini mengakibatkan laju inflasi menembus angka dua digit sebesar 17,11 persen. Keadaan ini tentu memberatkan rakyat terutama untuk golongan bawah. Guna mengurangi dan meringankan dampak kenaikan harga BBM tersebut pemerintah memberikan kompensasi berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) terhadap rakyat miskin.

Di tengah situasi yang kurang menguntungkan tersebut, secara keseluruhan pertumbuhan ekonomi Indonesia selama tahun 2005 masih meningkat sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dibandingkan pertumbuhan tahun sebelumnya (5,1 persen). Namun demikian meningkatnya pertumbuhan ekonomi tersebut masih didominasi oleh sektor-sektor yang padat modal dan teknologi. Sementara sektor yang padat karya seperti sektor industri dan sektor pertanian justru mengalami perlambatan. Kondisi ini mengakibatkan semakin meningkatnya jumlah pengangguran.

Publikasi Laporan Perekonomian tahun 2005 ini menggambarkan keadaan perekonomian nasional selama tahun 2005. Laporan ini menyajikan perkembangan ekonomi yang meliputi perkembangan beberapa indikator makro seperti pertumbuhan ekonomi, inflasi, ekspor dan impor yang terangkum dalam Bab 2 yaitu tinjauan ekonomi. Perkembangan Produk Domestik Bruto diulas pada Bab 3, sementara Bab 4 mengulas perkembangan Indeks Harga Konsumen dan laju inflasi. Perkembangan tentang perdagangan luar negeri disajikan dalam Bab 5, dan perkembangan moneter disajikan pada Bab 6. Sementara Bab 7 menyajikan perkembangan penanaman modal baik Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) maupun Penanaman Modal Asing (PMA). Sedangkan dunia pariwisata yang meliputi

kunjungan wisatawan mancanegara, tingkat penghunian kamar hotel dan rata-rata lama menginap ditampilkan pada Bab 8. Pada Bab 9, disajikan tentang perkembangan ketenagakerjaan yang meliputi keadaan angkatan kerja dan keadaan pekerja.

<http://www.bps.go.id>

TINJAUAN EKONOMI

Ekonomi Dunia •
Ekonomi Indonesia •

2

<http://www.bkps.go.id>

Pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2005 mengalami perlambatan akibat melambungnya harga minyak dunia.

Perekonomian dunia yang sempat menunjukkan perkembangan yang cukup menggembirakan pada tahun 2004, pada tahun 2005 kembali mengalami perlambatan. Melambatnya perekonomian global terutama disebabkan oleh melambungnya harga minyak mentah dunia yang menembus angka US \$ 70 per barel. Tingginya harga minyak dunia tersebut disebabkan permintaan tinggi yang tidak diimbangi kapasitas penyediaan memadai dari pihak produsen. Selain itu kebijakan pengetatan moneter global juga menjadi salah satu pemicu melambatnya pertumbuhan ekonomi dunia tahun 2005.

Melemahnya perekonomian global juga berdampak pada melemahnya kinerja perekonomian Indonesia. Kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan tersebut, menyebabkan upaya menjaga momentum pertumbuhan ekonomi dan stabilitas makro mengalami gangguan yang cukup berarti. Indonesia sebagai *small open economy* dalam perekonomian global sangat mudah terpengaruh oleh perkembangan ekonomi internasional. Padahal perkembangan ekonomi internasional selama tahun 2005 bisa dikatakan tidak ramah bagi pertumbuhan ekonomi Indonesia, seperti melambungnya harga minyak dunia, melemahnya nilai tukar dolar AS, dan kenaikan tingkat suku bunga *The Fed*.

2.1 Ekonomi Dunia

Menurut Dana Moneter Internasional (IMF) dalam publikasi *World Economic Outlook (WEO)*, pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2005 diperkirakan mencapai 4,3 persen atau turun dibandingkan dengan tahun 2004 sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan ekonomi negara-negara maju pada tahun 2005 diperkirakan lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Negara-negara maju yang memberikan pengaruh besar kepada ekonomi dunia seperti Amerika Serikat, Jepang maupun Eropa menunjukkan pertumbuhan yang lebih lambat dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi negara-negara maju diperkirakan tumbuh sebesar 2,5 persen atau lebih rendah 0,8 persen dibandingkan tahun 2004. Sementara Amerika Serikat

Tabel 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Dunia, Negara-negara Maju, Negara Berkembang dan ASEAN, Economic Growth Rate of World, Advanced Economies Country, Development Country and ASEAN, 2001 - 2005 (%)

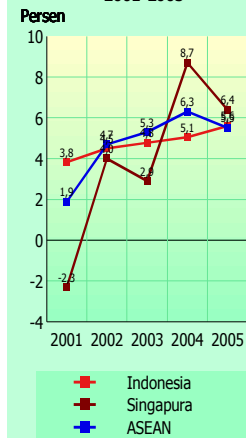
Kelompok Negara Group of Country	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Dunia/World ¹⁾	2,4	3,0	4,0	5,1	4,3
B. Negara-negara Maju ¹⁾ Advanced Economies Country	1,2	1,5	1,9	3,3	2,5
Negara-negara maju utama <i>Major Advanced Economies country</i>	1,0	1,1	1,8	3,2	2,5
Amerika Serikat/USA	0,8	1,6	2,7	4,2	3,5
Jepang/Japan	0,2	-0,3	1,4	2,7	2,0
Inggris/United Kingdom	2,2	2,0	2,5	3,2	1,9
Kanada/Canada	1,8	3,1	2,0	2,9	2,9
Kawasan Eropa/Euro area	1,7	0,9	0,7	2,0	1,2
Jerman/Germany	1,2	0,1	-0,2	1,6	0,8
Perancis/France	2,1	1,3	0,9	2,0	1,5
Italia/Italy	1,8	0,4	0,3	1,2	-
Spanyol/Spain	3,5	2,7	2,9	3,1	3,2
Negara-negara maju lainnya <i>Other Advanced Economies country</i>	1,7	3,2	2,4	3,9	2,8
C. Negara-negara Berkembang ¹⁾ Other Emerging Market and Developing Country	4,1	4,8	6,5	7,3	6,4
Afrika/Africa	4,1	3,6	4,6	5,3	4,5
Asia	5,6	6,6	8,1	8,2	7,8
Amerika Latin	0,5	-0,1	2,2	5,6	4,1
Timur Tengah/Middle East	3,7	4,2	6,5	5,5	5,4
Eropa Timur dan Tengah <i>Central and Eastern Europe</i>	0,2	4,4	4,6	6,5	4,3
<i>Commonwealth of Independent States</i>	6,3	5,3	7,9	8,4	6,0
D. Negara-negara ASEAN ²⁾ ASEAN Country	1,9	4,7	5,3	6,3	5,5
Malaysia	0,3	4,4	5,4	7,1	5,3
Philipina/Philippines	1,8	4,4	4,5	6,0	5,1
Singapura/Singapore	-2,3	4,0	2,9	8,7	6,4
Thailand	2,2	5,3	7,0	6,2	4,5
Indonesia ³⁾	3,83	4,38	4,72	5,05	5,60
Vietnam	6,9	7,1	7,3	7,8	8,4

Sumber : 1) *International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook (WEO) September 2005"*

2) *Asian Development Bank (ADB): "Asian Development Outlook (ADO) 2006"*

3) *Badan Pusat Statistik (BPS): Indikator Ekonomi/Statistics Indonesia : Economic Indicators*

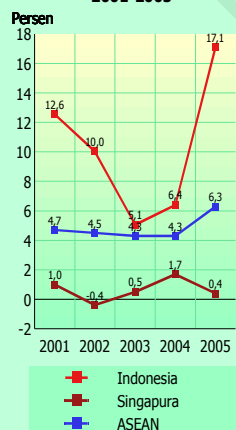
Gambar 2.1. Pertumbuhan Ekonomi Indonesia, Singapura dan ASEAN 2001-2005



diperkirakan akan mengalami pertumbuhan ekonomi sebesar 3,5 persen turun dibandingkan tahun 2004 yang tumbuh sebesar 4,2 persen. Sedangkan ekonomi Jepang turun dari 2,7 persen pada tahun 2004 menjadi 2,0 persen pada tahun 2005. Sementara pada kawasan Eropa, pertumbuhan ekonomi diperkirakan hanya tumbuh sebesar 1,2 persen.

Pertumbuhan ekonomi negara-negara berkembang pada tahun 2005 diperkirakan juga mengalami perlambatan. Akan tetapi dibandingkan dengan negara-negara maju, ekonomi negara-negara berkembang tumbuh jauh lebih tinggi. Ekonomi negara-negara berkembang diperkirakan tumbuh sebesar 6,4 persen pada tahun 2005, yang berarti lebih rendah dibandingkan dengan tahun sebelumnya sebesar 7,3 persen. Menurunnya pertumbuhan ekonomi tersebut disebabkan turunnya pertumbuhan ekonomi di semua kawasan yaitu kawasan Afrika, Amerika Latin, Eropa Timur dan Tengah, Asia, dan Timur Tengah serta kawasan *commonwealth of independent states*. Selain karena melambungnya harga minyak dunia, penurunan ekonomi negara berkembang juga karena dampak dari ketidakseimbangan ekonomi global, khususnya akibat terjadinya defisit di Amerika Serikat. Sementara pertumbuhan ekonomi tertinggi negara-negara berkembang tercatat di kawasan Asia yang tumbuh sebesar 7,8 persen, diikuti kawasan *Commonwealth of independent states* sebesar 6,0 persen. Tingginya pertumbuhan ekonomi di kawasan Asia terutama ditopang ekspansi pertumbuhan yang cepat yang terjadi di Cina dan India.

Gambar 2.2. Laju Inflasi Indonesia, Singapura dan ASEAN 2001-2005



Seperti halnya perekonomian negara-negara berkembang, perekonomian kelompok negara-negara ASEAN juga mengalami perlambatan pertumbuhan. Pada tahun 2005, pertumbuhan ekonomi kelompok negara-negara ASEAN menurut *Asian Development Bank (ADB)* dalam publikasi *Asian Development Outlook (ADO)* tumbuh sebesar 5,5 persen, lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2004 yang tumbuh sebesar 6,3 persen. Diantara negara-negara ASEAN, Myanmar mempunyai pertumbuhan ekonomi tertinggi yaitu mencapai 12,2 persen pada tahun 2005, diikuti negara Vietnam dan Kamboja yang sama-sama tumbuh sebesar 8,4 persen. Dari

sembilan negara ASEAN, sebanyak empat negara mengalami percepatan ekonomi yaitu Indonesia, Singapura, Kamboja dan Laos. Sementara lima negara ASEAN yang lain mengalami penurunan pertumbuhan dengan penurunan terbesar terjadi di negara Singapura yaitu dari 8,7 persen pada tahun 2004 menjadi 6,4 persen pada tahun 2005.

laju inflasi negara-negara maju selalu lebih rendah dibandingkan dengan negara-negara berkembang dan ASEAN

Melemahnya kinerja ekonomi global selama tahun 2005, diikuti juga dengan naiknya laju inflasi. Laju inflasi negara-negara di dunia selama tahun 2005 menurut IMF diperkirakan akan sedikit meningkat dibanding tahun 2004. Jika dilihat besarnya, laju inflasi di negara-negara maju selalu lebih rendah jika dibandingkan dengan laju inflasi negara-negara dalam kategori negara berkembang dan ASEAN. Hal ini menunjukkan bahwa negara-negara maju telah mampu mengendalikan laju inflasi pada level rendah.

Secara umum, laju inflasi di negara-negara maju pada tahun 2005 diperkirakan cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun 2004, kecuali Jerman, Perancis dan Italia yang dapat menekan laju inflasi sehingga lebih rendah dibandingkan tahun 2004. Sementara Jepang dalam lima tahun terakhir dapat mengendalikan laju inflasi sehingga selalu mengalami deflasi. Pada tahun 2005, negara Jepang mengalami deflasi sebesar 0,4 persen atau lebih rendah dari deflasi tahun 2003 sebesar 0,2 persen. Laju inflasi Amerika Serikat yang sempat naik pada tahun 2004 menjadi 2,7 persen, pada tahun 2005 kembali mengalami peningkatan laju inflasi menjadi 3,1 persen. Untuk negara maju lainnya, pada tahun 2005 diperkirakan memiliki laju inflasi sebesar 2,1 persen. Laju inflasi tersebut cenderung lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yang hanya mencapai 1,8 persen.

Laju inflasi negara-negara berkembang diperkirakan 5,9 persen pada tahun 2005.

Laju inflasi negara-negara berkembang diperkirakan mencapai 5,9 persen pada tahun 2005, atau naik sedikit dibandingkan tahun 2004 sebesar 5,8 persen. Kawasan negara berkembang yang mengalami peningkatan laju inflasi yaitu kawasan Afrika, kawasan Timur Tengah, dan kawasan *Commonwealth of independent states*. Sedangkan kawasan Amerika Latin dan kawasan Eropa Timur & Tengah mengalami

Tabel 2.2. Laju Inflasi Negara-negara Maju, Negara Berkembang dan ASEAN
Inflation Rate of Advanced Economies Country, Development Country and ASEAN, 2001- 2005 (%)

Kelompok Negara <i>Group of Country</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
A. Negara-negara maju ¹⁾ <i>Advanced Economies Country</i>	2,1	1,5	1,8	2,0	2,2
Negara-negara Maju utama <i>Major Advanced Economies Country</i>	1,9	1,3	1,7	2,0	2,1
Amerika Serikat/ <i>USA</i>	2,8	1,6	2,3	2,7	3,1
Jepang/ <i>Japan</i>	-0,7	-1,0	-0,2	-	-0,4
Inggris/ <i>United Kingdom</i>	1,2	1,3	1,4	1,3	2,0
Kanada/ <i>Canada</i>	2,5	2,3	2,7	1,8	2,2
Kawasan Eropa/ <i>Euro area</i>	2,3	2,3	2,1	2,1	2,1
Jerman/ <i>Germany</i>	1,9	1,3	1,0	1,8	1,7
Perancis/ <i>France</i>	1,8	1,9	2,2	2,3	1,9
Italia/ <i>Italy</i>	2,3	2,6	2,8	2,3	2,1
Spanyol/ <i>Spain</i>	2,8	3,6	3,1	3,1	3,2
Negara-negara maju lainnya <i>Other Advanced Economies country</i>	2,1	1,7	1,8	1,8	2,1
B. Negara-negara Berkembang ¹⁾ <i>Other Emerging Market and Developing Country</i>	6,7	5,9	6,0	5,8	5,9
Afrika/ <i>Africa</i>	12,2	9,6	10,4	7,8	8,2
Asia	2,7	2,1	2,6	4,2	4,2
Amerika Latin	6,1	8,9	10,6	6,5	6,3
Timur Tengah/ <i>Middle East</i>	5,4	6,5	7,1	8,4	10,0
Eropa Timur dan Tengah <i>Central and Eastern Europe</i>	19,4	14,7	9,2	6,5	4,8
<i>Commonwealth of Independent States</i>	20,3	13,8	12,0	10,3	12,6
D. Negara-negara ASEAN ²⁾ <i>ASEAN Country</i>	4,7	4,5	4,3	4,3	6,3
Malaysia	1,4	1,8	1,2	1,4	3,0
Philipina/ <i>Philippines</i>	6,1	2,9	3,5	6,0	7,6
Singapura/ <i>Singapore</i>	1,0	-0,4	0,5	1,7	0,4
Thailand	1,6	0,6	1,8	2,8	4,5
Indonesia ³⁾	12,55	10,03	5,06	6,40	17,11
Vietnam	-0,4	3,8	3,1	7,8	8,3

Sumber : 1) *International Monetary Fund (IMF): "World Economic Outlook (WEO), Source September 2006"*

2) *Asian Development Bank (ADB): "Asian Development Outlook (ADO) 2006"*

3) *Badan Pusat Statistik (BPS): Indikator Ekonomi/Statistics Indonesia : Economic Indicators*

penurunan laju inflasi. Kawasan negara berkembang *Commonwealth of independent states* pada tahun 2005 diperkirakan memiliki laju inflasi tertinggi yaitu sebesar 12,6 persen, diikuti kawasan Timur Tengah yang memiliki laju inflasi sebesar 10,0 persen. Sementara kawasan Eropa Timur dan Tengah mengalami laju inflasi terendah yaitu sebesar 4,8 persen.

Untuk kategori kelompok negara-negara ASEAN, berdasarkan perkiraan ADB laju inflasi pada tahun 2005 tercatat sebesar 6,3 persen atau mengalami peningkatan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 4,3 persen. Peningkatan laju inflasi terjadi di hampir semua negara-negara ASEAN, kecuali Laos dan Singapura yang justru mengalami penurunan laju inflasi. Diantara negara-negara ASEAN, Indonesia memiliki laju inflasi tertinggi yaitu sebesar 17,11 persen, diikuti Vietnam dan Philipina masing-masing memiliki laju inflasi sebesar 8,3 persen dan 7,6 persen. Sementara Singapura memiliki laju inflasi terendah diantara negara-negara ASEAN selama tahun 2005 dengan laju inflasi hanya sebesar 0,4 persen.

2.2. Ekonomi Indonesia

Kinerja perekonomian Indonesia selama empat tahun terakhir selalu mengalami percepatan pertumbuhan. Pada tahun 2003 ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 4,78 persen. Meskipun diwarnai dengan berlangsungnya proses pemilihan umum dan pemilihan presiden, pada tahun 2004 perekonomian Indonesia mampu tumbuh lebih tinggi lagi yaitu sebesar 5,05 persen. Pada tahun 2005, perekonomian Indonesia tumbuh tidak mencapai target. Dari target pertumbuhan sebesar 6,0 persen, ekonomi Indonesia hanya tumbuh 5,60 persen. Penurunan pertumbuhan ekonomi terasa pada triwulan terakhir tahun 2005 sebagai dampak pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) dua kali lipat, tepatnya tanggal 1 Oktober 2005. Kenaikkan tersebut serta merta membuat daya beli masyarakat turun yang kemudian berakibat pada penurunan nilai produksi.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB)

*Pertumbuhan ekonomi
Indonesia tahun 2005
mencapai 5,60 persen.*

Pertumbuhan PDB tahun 2005 terjadi pada semua sektor ekonomi.

atas dasar harga konstan 2000, tercatat sebesar 5,60 persen dengan nilai PDB sebesar Rp 1.749,5 triliun. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua sektor ekonomi, dimana berbagai sektor ekonomi pada tahun 2005 sangat dipengaruhi oleh sensitivitas masing-masing sektor ekonomi terhadap depresiasi nilai tukar dan perlambatan permintaan dunia. Tingkat sensitivitas tersebut dipengaruhi oleh struktur biaya dan ketergantungan terhadap bahan baku impor serta orientasi pasar produknya. Di samping itu, beberapa faktor yang sifatnya lebih spesifik seperti faktor cuaca dan kebijakan yang terkait dengan sektor tertentu juga memberikan dampak yang cukup besar. Beberapa sektor yang tumbuh melambat umumnya merupakan sektor yang terkait langsung dengan ekspor serta relatif sensitif terhadap perubahan harga BBM dan nilai tukar seperti sektor industri pengolahan dan pertanian. Sementara itu, berbagai sektor yang lebih berorientasi pada pasar domestik seperti sektor transportasi dan komunikasi; sektor perdagangan, hotel dan restoran; dan sektor listrik, gas dan air minum mencatat pertumbuhan yang relatif tinggi.

Konsumsi rumah tangga mempunyai kontribusi terbesar (65,41 persen) dalam pembentukan PDB tahun 2005.

Di sisi penggunaan pertumbuhan ekonomi tahun 2005 digerakkan oleh semua komponen PDB, dengan pertumbuhan terbesar pada komponen impor barang-barang dan jasa-jasa sebesar 12,35 persen. Sementara konsumsi rumah tangga merupakan komponen yang mempunyai kontribusi terbesar dalam pembentukan PDB tahun 2005 yaitu sebesar 65,41 persen. Angka tersebut mengalami sedikit penurunan dibandingkan tahun 2004 dimana kontribusinya mencapai 67,43 persen. Dilihat dari sisi harga berlaku, PDB per kapita tahun 2005 mencapai Rp 12.450,7 ribu, meningkat sebesar 18,51 persen dibandingkan tahun 2004.

Peningkatan pertumbuhan ekonomi selama tahun 2005 tidak dibarengi dengan rendahnya laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2005 tercatat sebesar 17,11 persen, jauh lebih tinggi dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 6,40 persen. Tingginya laju inflasi selama tahun 2005 terutama dipengaruhi oleh dampak signifikan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) baik melalui dampak langsung (*first round*) maupun dampak lanjutan (*second round*). Gangguan pasokan dan

**Tabel 2.3. Perkembangan Beberapa Indikator Ekonomi Indonesia
Economic Indicators of Indonesia, 2002-2005**

Indikator/Indicator	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertumbuhan Ekonomi/Economic Growth (%)	4,50 ¹⁾	4,78	5,05 ^{x)}	5,60 ^{xx)}
2. Inflasi/Inflation (%)	10,03	5,06	6,40	17,11
3. PDB Harga Konstan 2000 (Triliun Rp) GDP at Constant 2000 Market Prices (Trillion Rp)	1 505,2 ¹⁾	1 577,2	1 656,8 ^{x)}	1 749,5 ^{xx)}
4. PDB per Kapita Harga Berlaku (Ribu Rp) GDP per Capita at Current Market Prices (Thousand Rp)	8 645,1	9 429,5	10 506,2 ^{x)}	12 450,7 ^{xx)}
5. Neraca Perdagangan Luar Negeri (Juta US\$) Balance of Trade (Million US \$)	25 869,9	28 507,6	25 060,1	27 959,1
a. Ekspor/Export (Juta/Million US \$)	57 158,8	61 058,3	71 584,6	85 660,0
b. Impor/Import (Juta/Million US \$)	31 288,9	32 550,7	46 524,5	57 700,9
6. Investasi/Investment :				
a. PMDN/Domestic Investment (Miliar/Billion Rupiah)	25 262,3	48 484,8	36 747,6	50 577,4
b. PMA/Foreign Investment (Juta/Million US \$)	9 744,1	13 207,2	10 277,3	12 979,3
7. Suku Bunga Deposito Berjangka Bank Umum 1 bulan (%) ¹⁾	12,81	6,62	6,43	11,98
Interest rate of time deposits at commercial banks				
8. Jumlah Wisatawan Asing (Ribu orang) Number of Foreign Tourist (Thousand persons)	5 033,4	4 467,0	5 321,2	5 002,1
9. Produksi Padi/Production Of Paddy (GKG):				
a. Sawah/Wetland (Juta/Million Ton)	48,9	49,38	51,21	51,22 ^{x)}
b. Ladang/Dryland (Juta/Million Ton)	2,59	2,76	2,88	2,83 ^{x)}
10. Nilai Tukar Petani/Farmers' Term of Trade (rata-rata/Average):				
a. Jawa Barat	125,3	132,6	130,7	112,5
b. Jawa Tengah	113,3	124,1	117,7	92,3
c. Sumatera Barat	88,6	91,1	81,5	68,1
d. Sumatera Selatan	72,5	73,3	107,9	119,5
11. Penduduk Miskin/The Poor People (Juta / Million)	38,4 ²⁾	37,3 ³⁾	36,1 ³⁾	35,1 ³⁾
12. Tingkat Pengangguran Terbuka/Unemployment Rate	9,1	9,7	9,9	10,3

Sumber : BPS, Bank Indonesia, BKPM

Source : Statistics Indonesia, Banks of Indonesia, Investment Coordinating Board

Catatan : 1). Kondisi Desember/Condition at Desember

Notes 2). Hasil Susenas 2002 (Modul Konsumsi)/Susenas 2002 (Consumption Module)

3). Hasil Susenas Panel Modul Konsumsi 2003, 2004, 2005/Susenas Panel Consumption Module 2003, 2004, 2005

distribusi, tingginya ekspektasi inflasi, dan depresiasi nilai tukar rupiah turut memberikan tekanan harga yang semakin meningkat. Selain itu, beberapa kebijakan *administered prices*

lainnya seperti harga rokok, tarif tol dan PAM juga turut mendorong kenaikan harga-harga.

Laju inflasi tahun 2005 tercatat sebesar 17,11 persen

Laju inflasi pada tahun 2005 terjadi untuk semua kelompok barang dengan laju inflasi tertinggi pada kelompok transpor dan komunikasi yang mencapai 44,75 persen sebagai dampak langsung kenaikan harga BBM. Gangguan pasokan dan distribusi yang terjadi di tahun 2005 juga menyebabkan tingginya fluktuasi harga bahan makanan (*volatile food*) yang mencapai 13,91 persen. Gangguan pasokan dan distribusi ini, antara lain disebabkan oleh adanya penimbunan bahan-bahan pokok menyusul adanya kecenderungan kenaikan harga dan kelangkaan pasokan BBM di berbagai daerah, sehingga semakin meningkatkan tekanan inflasi. Sementara laju inflasi pada bulan Oktober tercatat paling tinggi selama tahun 2005 sebesar 8,70 persen. Tingginya laju inflasi bulan Oktober terutama dipicu oleh kenaikan harga BBM yang mencapai lebih dari 100 persen pada tanggal 1 Oktober 2005.

Suku bunga deposito berjangka bank umum 1 bulan sebesar 11,98 persen pada tahun 2005, meningkat dibanding tahun sebelumnya sebesar 6,43 persen

Seiring dengan tingginya laju inflasi selama tahun 2005, maka tantangan menjaga stabilitas moneter menjadi semakin berat di tengah kondisi perbankan domestik yang mengalami eksekusi likuiditas. Dalam situasi demikian, Bank Indonesia mengambil langkah konsisten untuk mengendalikan inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar melalui kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight biased*). Walaupun demikian, pada tahun 2005 suku bunga Deposito berjangka Bank Umum 1 bulan masih berada level yang cukup tinggi yaitu sebesar 11,98 persen (posisi Desember). Angka tersebut jauh lebih tinggi dibanding posisi Desember tahun sebelumnya 6,43 persen.

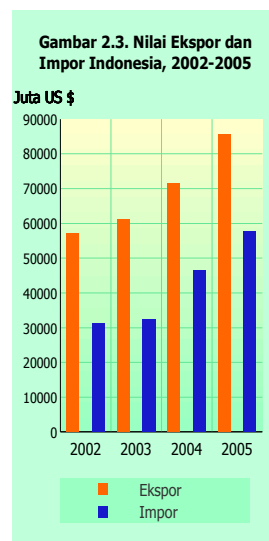
Selama tahun 2005, realisasi pertumbuhan ekonomi Indonesia meningkat dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sisi permintaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi di tahun 2005 tercermin pada pertumbuhan konsumsi dan investasi yang cukup tinggi. Pada semester pertama 2005 investasi tetap tumbuh tinggi. Memasuki semester kedua, kenaikan harga minyak dan pengetatan moneter dunia memberikan dampak pada pelemahan nilai tukar yang pada gilirannya memperlambat pertumbuhan investasi. Meskipun

demikian, pada tahun 2005 nilai investasi dalam negeri tercatat sebesar Rp 50.577,4 miliar atau mengalami peningkatan sebesar 37,63 persen dibandingkan tahun 2004 sebesar Rp 36.747,6 miliar. Demikian pula dengan investasi asing yang naik dari US \$ 10.277,3 juta menjadi US \$ 12.979,3 juta atau mengalami peningkatan sebesar 26,29 persen.

Di bidang perdagangan luar negeri, kebijakan-kebijakan perdagangan luar negeri Indonesia selain ditujukan untuk meningkatkan daya saing global produk Indonesia, juga untuk memacu pertumbuhan ekonomi dan menambah cadangan devisa. Kebijakan yang diambil pemerintah selain melalui peraturan yang mempermudah para eksportir dalam kepabeanaan, juga menjadi fasilitator dalam mencari pasar internasional bagi produk dalam negeri. Selain kebijakan ekspor, pemerintah juga mengeluarkan kebijakan-kebijakan di bidang impor yang ditujukan untuk menunjang serta mendukung pertumbuhan industri dalam negeri, khususnya yang berorientasi ekspor. Selain itu kebijakan impor juga ditujukan untuk tetap menjaga tersedianya kebutuhan barang dan jasa, dan meningkatkan pendayagunaan devisa dalam menjaga keseimbangan neraca pembayaran. Selama tahun 2005 neraca perdagangan luar negeri Indonesia tercatat surplus sebesar US \$ 28,0 miliar, lebih tinggi dibandingkan dengan tahun 2004 dengan surplus sebesar US \$ 25,1 miliar.

Nilai ekspor Indonesia selama empat tahun terakhir selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2003 nilai ekspor Indonesia tercatat sebesar US \$ 61,1 miliar. Kemudian pada tahun 2004 meningkat menjadi US \$ 71,6 miliar, atau naik sebesar 17,24 persen dibandingkan tahun 2003. Kemudian pada tahun berikutnya meningkat kembali sebesar 19,66 persen menjadi US \$ 85,7 miliar. Peningkatan tersebut didorong oleh meningkatnya ekspor migas sebesar 22,92 persen yaitu dari US \$ 15,6 miliar pada tahun 2004 menjadi US \$ 19,2 miliar pada tahun 2005. Sedangkan ekspor non migas naik sebesar 18,75 persen yaitu dari US \$ 55,9 miliar menjadi US \$ 66,4 miliar.

Neraca perdagangan luar negeri pada tahun 2005 surplus sebesar US \$ 28,0 miliar.



Sama seperti nilai ekspor, nilai impor selama empat tahun terakhir juga selalu menunjukkan peningkatan. Pada tahun 2003 nilai impor Indonesia sudah mencapai US \$ 32,6 miliar. Nilai tersebut kemudian meningkat sebesar 42,93 persen menjadi US \$ 46,5 miliar pada tahun 2004. Selanjutnya nilai impor Indonesia mengalami peningkatan lagi pada tahun 2004 sebesar 24,02 persen hingga mencapai US \$ 57,7 miliar. Jika dilihat dari ketiga kelompok barang terhadap total impor, kelompok bahan baku dan penolong memiliki nilai impor terbesar yaitu sebesar 77,63 persen dari total impor, kemudian disusul impor barang modal dan konsumsi masing-masing sebesar 14,36 persen dan 8,01 persen. Hal tersebut menunjukkan bahwa produksi dalam negeri masih belum mampu memenuhi kebutuhan bahan baku dan penolong yang sebagian besar digunakan untuk bahan baku industri.

Jumlah wisatawan asing pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,0 juta orang.

Pemasukan devisa negara selain dari ekspor barang dan jasa juga berasal dari sektor pariwisata. Peristiwa bom Bali II, bencana alam hingga kenaikan harga BBM yang memicu inflasi menjadi mimpi buruk bagi sektor pariwisata selama tahun 2005. Kelesuan sektor pariwisata terlihat dari tingkat kunjungan wisatawan mancanegara yang mengalami penurunan setelah sempat meningkat pada tahun 2004. Pada tahun 2005, jumlah wisatawan mancanegara yang berkunjung ke Indonesia tercatat sebesar 5,0 juta orang atau turun 6,0 persen dibandingkan tahun sebelumnya yang sebesar 5,32 juta orang. Faktor lain yang menyebabkan jumlah wisatawan mancanegara mengalami penurunan adalah adanya *travel warning* (larangan tidak bepergian) ke Indonesia dari beberapa negara seperti dari pemerintah Australia.

Produksi padi Indonesia pada tahun 2005 tercatat sebesar 54,06 juta ton gabah kering giling (GKG) atau mengalami sedikit penurunan sebesar 0,06 persen dibandingkan dengan produksi tahun 2004. Produksi padi tersebut sebagian besar merupakan padi sawah yaitu 51,22 juta ton dan sisanya merupakan padi ladang sebesar 2,83 juta ton. Penurunan produksi padi disebabkan oleh turunnya produksi padi ladang dari 2,88 juta ton pada tahun 2004 menjadi 2,83 juta ton pada tahun 2005. Sebaliknya produksi padi sawah meningkat

sebesar 0,03 persen dari 51,21 juta ton menjadi 51,2 juta ton. Penurunan produksi padi terutama terjadi karena berkurangnya luas panen yaitu dari 11,92 juta hektar pada tahun 2004 menjadi 11,82 juta hektar pada tahun 2005.

Sementara itu tingkat kesejahteraan petani yang diukur dengan Nilai Tukar Petani (NTP) propinsi-propinsi di pulau Jawa pada tahun 2005 menunjukkan perkembangan yang kurang menggembirakan. Seluruh propinsi di Jawa (Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Jawa Timur), semuanya mengalami penurunan NTP. NTP di Jawa Barat turun dari 130,7 pada tahun 2004 menjadi 112,5 pada tahun 2005, demikian pula NTP di Jawa Tengah yang turun lebih drastis dari 117,7 menjadi 92,3. Sementara dari 14 propinsi yang disurvei, sebanyak 7 propinsi mempunyai nilai NTP dibawah 100 yaitu propinsi Sumatera Utara, Sumatera Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Selatan. Bahkan NTP propinsi Sumatera Barat angkanya masih jauh dibawah 100 yaitu hanya sebesar 68,1. Hal ini berarti bahwa biaya hidup para petani di propinsi tersebut lebih tinggi dari pendapatan yang diperoleh dari usaha taninya atau dengan kata lain kesejahteraan petani di propinsi tersebut masih rendah.

Pada tahun 2005 jumlah penduduk miskin Indonesia (berdasarkan data hasil Susenas Panel Konsumsi Februari 2005) tercatat sebesar 35,1 juta jiwa atau 15,97 persen dari total penduduk Indonesia. Angka tersebut lebih rendah dibandingkan dengan jumlah penduduk miskin tahun 2004 yang sebesar 36,1 juta jiwa atau berkurang sebanyak 1 juta jiwa penduduk miskin. Dilihat dari persentase penduduk miskin (*Head Count Index*), penduduk miskin di perdesaan lebih besar dibandingkan dengan di perkotaan yaitu 19,51 persen di perdesaan berbanding 11,37 persen di perkotaan.

Penurunan jumlah penduduk miskin pada tahun 2005 tidak dibarengi dengan turunnya jumlah pengangguran. Dalam empat tahun terakhir Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2005 (keadaan bulan Februari), Tingkat Pengangguran Terbuka di Indonesia

Jumlah penduduk miskin sebesar 35,1 juta jiwa pada tahun 2005, lebih rendah dibanding tahun 2004 sebesar 36,1 juta jiwa.

terhitung sebesar 10,3 persen atau meningkat dibandingkan dengan tahun 2004 (keadaan Agustus) yang sebesar 9,9 persen. Bila dibandingkan menurut jenis kelamin, TPT perempuan lebih tinggi dibandingkan laki-laki; TPT perempuan sebesar 13,6 persen sedangkan TPT laki-laki sebesar 8,3 persen. Di sisi lain TPT di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan daerah perdesaan; TPT perkotaan sebesar 13,5 persen sedangkan TPT perdesaan sebesar 7,9 persen.

<http://www.bps.go.id>

PENDAPATAN NASIONAL

- Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku* •
- Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan* •
- Pendapatan Per Kapita* •

3

<http://www.bps.go.id>

Ekonomi Indonesia selama tahun 2005 tumbuh sebesar 5,60 persen lebih tinggi dari tahun 2004 yang sebesar 5,05 persen

Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan perkembangan Produk Domestik Bruto (PDB) atas dasar harga konstan 2000, dalam periode 2002-2005 selalu mengalami peningkatan meskipun tidak terlalu tinggi. Pertumbuhan ekonomi pada tahun 2005 tercatat sebesar 5,6 persen. Angka tersebut lebih tinggi dibanding tahun sebelumnya namun masih dibawah target pemerintah dalam APBN sebesar 6 persen. Selama tahun 2005 semua sektor mengalami pertumbuhan positif bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Namun dibandingkan dengan laju pertumbuhan tahun 2004 ada beberapa sektor yang mengalami perlambatan yaitu sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan dan komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan.

Mengingat porsi sektor industri pengolahan hampir mencapai sepertiga dari PDB maka pelemahan sektor ini akan berdampak cukup signifikan terhadap pertumbuhan PDB dan berbagai aspek dalam perekonomian, seperti penyerapan tenaga kerja dan penerimaan devisa dari ekspor. Sementara menurunnya pertumbuhan sektor pertanian pada tahun 2005 menunjukkan bahwa sektor penyerap tenaga kerja terbesar ini sangat dipengaruhi oleh kebijakan-kebijakan tarif pemerintah. Kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) sebanyak dua kali menyebabkan biaya angkut pertanian lebih tinggi, padahal harga barang yang dijual berharga murah sehingga mengakibatkan penghasilan petani anjlok. Kondisi ini menunjukkan bahwa sektor pertanian bukan merupakan lapangan usaha yang paling aman sebagai sumber pendapatan penduduk Indonesia.

Sedangkan dari sisi penggunaan atau pengeluaran, yang terdiri dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah, pembentukan modal tetap domestik bruto, ekspor dan impor juga mengalami pertumbuhan yang positif. Pada tahun 2005 penggerak utama pertumbuhan ekonomi berasal dari pengeluaran konsumsi rumah tangga, ekspor dan impor barang-barang dan jasa-jasa. Sementara pengeluaran konsumsi pemerintah menyumbang kurang dari 10 persen terhadap pembentukan PDB.

3.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 mencapai Rp 2.729,7 triliun. Bila dilihat perkembangannya sejak tahun 2002, selalu mengalami peningkatan. Berdasarkan kontribusinya menurut sektor ekonomi, maka selama kurun waktu 2002-2005 sektor industri pengolahan merupakan penyumbang terbesar terhadap total PDB. Kemudian berturut-turut diikuti oleh sektor perdagangan, hotel & restoran dan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan. Namun sejak tahun 2002, kontribusi sektor industri selalu mengalami penurunan pada setiap tahunnya. Bila pada tahun 2002 kontribusinya telah mencapai 28,72 persen, maka selanjutnya mengalami penurunan hingga menjadi 28,06 persen pada tahun 2005. Pada tahun 2005 sektor industri pengolahan memberikan nilai tambah sebesar Rp 766,0 triliun, sektor perdagangan, hotel dan restoran menyumbang sebesar Rp 429,9 triliun atau 15,75 persen, dan sektor pertanian, peternakan dan kehutanan sebesar Rp 365,6 triliun atau 13,39 persen. Sementara sektor-sektor lain memberikan kontribusi di bawah 10 persen, dengan kontribusi terkecil berasal dari sektor listrik, gas dan air minum yaitu hanya sebesar Rp 25,0 triliun atau 0,92 persen.

Berdasarkan PDB atas dasar harga berlaku tahun 2005, kontribusi sektor ekonomi menunjukkan bahwa 43,81 persen berasal dari sektor industri pengolahan serta sektor perdagangan, hotel dan restoran dengan kontribusi masing-masing sebesar 28,06 persen dan 15,75 persen. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, kontribusi sektor industri pengolahan dan sektor perdagangan, hotel dan restoran mengalami penurunan masing-masing sebesar 0,08 persen dan 0,50 persen. Sementara itu sektor-sektor lain yang juga mengalami penurunan kontribusinya adalah sektor pertanian, sektor listrik, gas dan air minum, sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan dan sektor jasa-jasa. Sementara sektor yang mengalami peningkatan kontribusinya adalah sektor pertambangan dan penggalian, sektor bangunan dan sektor pengangkutan dan komunikasi dengan peningkatan

Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia atas dasar harga berlaku pada tahun 2005 tercatat sebesar Rp. 2.729,7 triliun.

**Tabel 3.1. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Lapangan Usaha,
Gross Domestic Product at Current Market Prices by Industrial Origin,
2002-2005 (Miliar Rupiah / Billion Rupiahs)**

Lapangan Usaha <i>Industrial Origin</i>	2002 ^{r)}	2003	2004 ^{x)}	2005 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan / <i>Agriculture, Livestock, Forestry and Fisheries</i>	281 590,8 (15,46)	305 783,5 (15,19)	331 553,0 (14,59)	365 559,6 (13,39)
2. Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	160 921,4 (8,83)	167 572,3 (8,32)	196 111,7 (8,63)	285 086,6 (10,44)
3. Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	523 199,6 (28,72)	568 920,3 (28,25)	639 655,0 (28,14)	765 966,7 (28,06)
4. Listrik, Gas dan Air Minum <i>Electricity, Gas and Water Supply</i>	15 392,0 (0,84)	19 144,2 (0,95)	22 066,7 (0,97)	24 993,2 (0,92)
5. Bangunan / <i>Construction</i>	110 527,4 (6,07)	125 337,1 (6,22)	143 052,3 (6,29)	173 440,6 (6,35)
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran <i>Trade, Hotels and Restaurants</i>	312 186,9 (17,14)	335 100,4 (16,64)	369 361,1 (16,25)	429 944,0 (15,75)
7. Pengangkutan dan Komunikasi <i>Transport and Communication</i>	97 970,1 (5,38)	118 916,4 (5,91)	142 292,0 (6,26)	180 968,7 (6,63)
8. Keuangan, Real estat dan Jasa Perusahaan / <i>Financial, Real estate & Business Services</i>	154 442,3 (8,48)	174 074,5 (8,64)	194 429,3 (8,55)	228 107,9 (8,36)
9. Jasa-jasa / <i>Services</i>	165 602,9 (9,09)	198 825,9 (9,87)	234 620,4 (10,32)	275 640,9 (10,10)
Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestic Product</i>	1 821 833,4 (100,00)	2 013 674,6 (100,00)	2 273 141,5 (100,00)	2 729 708,2 (100,00)
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas <i>Gross Domestic Product Non Oil and Gas</i>	1 659 081,4 (91,06)	1 840 854,9 (91,42)	2 072 052,0 (91,15)	2 427 591,8 (88,93)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDB

Note Figure in paranthese are percentage of GDP

kontribusi terbesar terjadi pada sektor pertambangan dan penggalian yang naik sebesar 1,81 persen.

Jika dilihat dari sisi pengeluaran, selama kurun waktu 2002-2005 lebih dari 60 persen dari total PDB digunakan untuk keperluan konsumsi rumah tangga. Pada tahun 2003, PDB

Pendapatan Nasional

yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga atas dasar harga berlaku sebesar Rp 1.372,1 triliun atau sekitar 68,14 persen. Sedangkan pada tahun 2004 besarnya PDB yang digunakan untuk komponen tersebut adalah sebesar Rp 1.532,9 triliun. Memasuki tahun 2005, PDB yang digunakan untuk pengeluaran konsumsi rumah tangga mencapai nilai Rp 1.785,6 triliun. Meskipun secara absolut mengalami peningkatan, namun kontribusi pengeluaran untuk konsumsi rumah tangga ini dalam dua tahun terakhir mengalami penurunan yaitu dari tahun 2003 yang telah mencapai 68,14 persen turun menjadi 67,43 persen pada tahun 2004 dan turun lagi menjadi 65,41 persen pada tahun 2005.

Tabel 3.2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Berlaku menurut Penggunaan, Gross Domestic Product at Current Market Prices by Type of Expenditure, 2002-2005 (Miliar Rupiah / Billion Rupiahs)

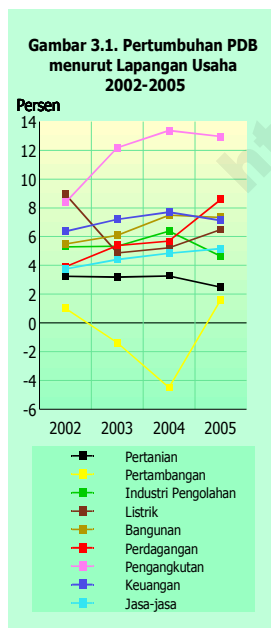
Lapangan Usaha <i>Industrial Origin</i>	2002 ^{r)}	2003	2004 ^{x)}	2005 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Private Consumption Expenditure</i>	1 231 964,5 (67,62)	1 372 078,0 (68,14)	1 532 888,3 (67,43)	1 785 596,4 (65,41)
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>General Government Consumption Expenditure</i>	132 218,8 (7,26)	163 701,4 (8,13)	191 055,6 (8,40)	224 980,5 (8,24)
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto / <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	353 967,0 (19,43)	392 788,6 (19,51)	492 849,9 (21,68)	599 795,2 (21,97)
4. a. Perubahan Inventori <i>Change in Inventory</i>	35 979,5 (1,97)	122 681,9 (6,09)	34 515,4 (1,52)	7 171,8 (0,26)
b. Diskrepansi Statistik <i>Statistical Discrepancy</i>	- 46 995,0 (2,58)	-185 355,2 (-9,20)	-83 963,4 (-3,69)	-6 170,2 (-0,23)
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa / <i>Export of Goods and Services</i>	595 514,0 (32,69)	613 720,8 (30,48)	729 320,5 (32,08)	915 610,1 (33,54)
6. Dikurangi : Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less : Import of Goods and Services</i>	480 815,4 (26,39)	465 940,9 (23,14)	623 524,8 (27,43)	797 275,6 (29,21)
7. Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestic Product</i>	1 821 833,4 (100,00)	2 013 674,6 (100,00)	2 273 141,5 (100,00)	2 729 708,2 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap PDB
Figure in paranthese are percentage of GDP

Kontribusi kedua terbesar dalam pembentukan PDB setelah komponen konsumsi rumah tangga selama tahun 2002-2005 adalah komponen ekspor barang dan jasa. Persentase PDB yang digunakan untuk ekspor barang dan jasa ini selama tahun 2002-2003 terlihat mengalami penurunan. Jika pada tahun 2002 PDB yang terserap untuk ekspor barang dan jasa sebesar 31,96 persen dari total PDB (berdasarkan harga berlaku), maka dalam tahun berikutnya turun menjadi 30,48 persen. Namun dua tahun terakhir mulai mengalami peningkatan yaitu pada tahun 2004 sebesar 32,08 persen dan 33,54 persen pada tahun 2005.

3.2. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan

Laju pertumbuhan perekonomian Indonesia yang digambarkan oleh perkembangan PDB atas dasar harga konstan 2000 pada kurun waktu 2002-2005 selalu mengalami pertumbuhan positif. Pada tahun 2002 perekonomian Indonesia tumbuh sebesar 4,50 persen dengan nilai PDB sebesar Rp 1.505,2 triliun. Setahun kemudian nilai PDB Indonesia naik menjadi Rp 1.577,2 triliun atau tumbuh sebesar 4,78 persen. Pada tahun 2005 kinerja perekonomian tumbuh sebesar 5,60 persen, dengan nilai PDB sebesar Rp 1.749,6 triliun.



Pertumbuhan perekonomian dalam empat tahun terakhir ini terjadi hampir di seluruh sektor kecuali sektor pertambangan dan penggalian. Sektor pertambangan mengalami penurunan dari tahun 2002-2004, namun pada tahun 2005 kembali mengalami kenaikan sebesar 1,59 persen. Pada tahun 2002 semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan pertumbuhan tertinggi terjadi pada sektor listrik, gas dan air minum yang tumbuh sebesar 8,94 persen dengan nilai Rp 9,9 triliun, disusul sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 8,39 persen. Selanjutnya pada tahun 2003 pertumbuhan PDB didorong oleh semua sektor kecuali pertambangan dan penggalian yang mengalami penurunan sebesar 1,37 persen dibanding tahun sebelumnya. Pertumbuhan tertinggi pada tahun 2003 terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,19 persen, disusul

Pendapatan Nasional

sektor sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan sebesar 6,73 persen serta diikuti sektor bangunan sebesar 6,10 persen. Kondisi ini juga terjadi pada tahun berikutnya yaitu tahun 2004. Sedangkan kondisi tahun 2005 semua sektor mengalami pertumbuhan positif dengan perkembangan

Tabel 3.3. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut Lapangan Usaha
Gross Domestic Product at Constant 2000 Market Prices by Industrial Origin,
2002-2005 (Miliar Rupiah / Billion Rupiahs)

Lapangan Usaha <i>Industrial Origin</i>	2002 ¹⁾	2003	2004 ^{x)}	2005 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pertanian, Peternakan, Kehutanan dan Perikanan <i>Agriculture, Livestock, Forestry and Fisheries</i>	231 613,5 (3,45)	240 387,3 (3,79)	248 222,8 (3,26)	254 391,3 (2,49)
2. Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	169 932,0 (1,00)	167 603,8 (-1,37)	160 100,4 (-4,48)	162 642,0 (1,59)
3. Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	419 387,8 (5,29)	441 754,9 (5,33)	469 952,4 (6,38)	491 699,5 (4,63)
4. Listrik, Gas dan Air Minum <i>Electricity, Gas and Water Supply</i>	9 868,2 (8,94)	10 349,2 (4,87)	10 889,8 (5,22)	11 596,6 (6,49)
5. Bangunan / <i>Construction</i>	84 469,8 (4,58)	89 621,8 (6,10)	96 333,6 (7,49)	103 403,8 (7,34)
6. Perdagangan, Hotel dan Restoran <i>Trade, Hotels and Restaurant</i>	243 266,6 (4,27)	256 516,6 (5,45)	271 104,9 (5,69)	294 396,3 (8,59)
7. Pengangkutan dan Komunikasi <i>Transport and Communication</i>	76 173,1 (8,39)	85 458,4 (12,19)	96 896,7 (13,38)	109 467,1 (12,97)
8. Keuangan, Real Estate dan Jasa Perusahaan / <i>Financial, Real Estate & Business Services</i>	131 523,0 (6,70)	140 374,4 (6,73)	151 187,8 (7,70)	161 959,6 (7,12)
9. Jasa-jasa / <i>Services</i>	138 982,4 (3,24)	145 104,9 (4,41)	152 137,3 (4,85)	159 990,7 (5,16)
Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestic Product</i>	1 505 216,4 (4,50)	1 577 171,3 (4,78)	1 656 825,7 (5,05)	1 749 546,9 (5,60)
Produk Domestik Bruto Tanpa Migas / <i>Gross Domestic Product Non Oil and Gas</i>	1 344 906,3 (5,09)	1 421 474,8 (5,69)	1 506 605,5 (5,99)	1 604 224,1 (6,48)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan (y-o-y)
Note Figures in parantheses are growth of rate (y-o-y)

tertinggi terjadi pada sektor pengangkutan dan komunikasi yang tumbuh sebesar 12,97 persen.

Ekonomi Indonesia pada tahun 2005 terutama digerakkan oleh konsumsi rumah tangga.

Jika dilihat dari sisi penggunaan, selama kurun waktu 2002-2005 pengeluaran konsumsi rumah tangga, pengeluaran konsumsi pemerintah dan pembentukan modal tetap domestik bruto selalu mengalami pertumbuhan positif. Pengeluaran konsumsi rumah tangga secara riil (atas dasar harga konstan 2000) pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp 920,7 triliun. Setahun kemudian pengeluaran tersebut

**Tabel 3.4. Produk Domestik Bruto Atas Dasar Harga Konstan 2000 menurut penggunaan,
Gross Domestic Product at Constant 2000 Market Prices by Type of Expenditure,
2002-2005 (Miliar Rupiah / Billion Rupiahs)**

Lapangan Usaha <i>Industrial Origin</i>	2002 ¹⁾	2003	2004 ^{x)}	2005 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Pengeluaran Konsumsi Rumah Tangga / <i>Private Consumption Expenditure</i>	920 749,6 (3,84)	956 593,4 (3,89)	1 004 109,0 (4,97)	1 043 805,1 (3,95)
2. Pengeluaran Konsumsi Pemerintah / <i>General Government Consumption Expenditure</i>	110 333,6 (12,99)	121 404,1 (10,03)	126 248,7 (3,99)	136 424,9 (8,06)
3. Pembentukan Modal Tetap Domestik Bruto / <i>Gross Domestic Fixed Capital Formation</i>	307 584,6 (4,69)	309 431,1 (0,60)	354 561,3 (14,58)	389 757,2 (9,93)
4. a. Perubahan Inventori <i>Change in Inventory</i>	13 085,0	45 996,7	23 501,8	4 323,6
b. Diskrepansi Statistik <i>Statistical Discrepancy</i>	9 546,6	-26 895,8	12 901,7	48 482,7
5. Ekspor Barang-barang dan Jasa-jasa / <i>Export of Goods and Services</i>	566 188,4 (-1,22)	599 516,4 (5,89)	680 465,7 (13,50)	739 006,9 (8,60)
6. Dikurangi : Impor Barang-barang dan Jasa-jasa <i>Less : Import of Goods and Services</i>	422 271,4 (-4,25)	428 874,6 (1,56)	544 962,5 (27,07)	612 253,5 (12,35)
7. Produk Domestik Bruto <i>Gross Domestic Product</i>	1 505 216,4 (4,50)	1 577 171,3 (4,78)	1 656 825,7 (5,05)	1 749 546,9 (5,60)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan laju pertumbuhan (y-o-y)
Note Figures in parantheses are growth of rate (y-o-y)

Pendapatan Nasional

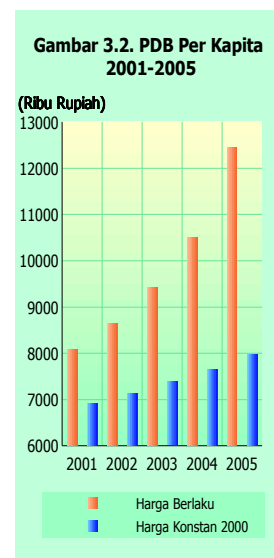
meningkat menjadi Rp 956,6 triliun atau naik sebesar 3,89 persen. Pada tahun 2004, pengeluaran konsumsi rumah tangga sudah mencapai Rp 1 004,1 triliun, dan pada tahun 2005 menjadi Rp 1.043,8 triliun atau naik sebesar 3,95 persen dari tahun sebelumnya.

Pengeluaran konsumsi pemerintah pada tahun 2002 tercatat sebesar Rp 110,3 triliun dan pada tahun 2003 meningkat menjadi Rp 121,4 triliun atau naik sebesar 10,03 persen. Selanjutnya pada tahun 2004 tercatat sebesar Rp 126,2 triliun atau meningkat 3,99 persen jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Keadaan ini terus meningkat hingga mencapai Rp 136,4 triliun pada tahun 2005 atau naik 8,06 persen dari tahun sebelumnya. Sementara untuk ekspor barang dan jasa juga mengalami kenaikan selama periode tersebut, walaupun pada tahun 2002 sempat mengalami penurunan sebesar 1,22 persen dari tahun sebelumnya. Kondisi ini juga dialami oleh impor barang dan jasa yang juga mengalami pertumbuhan negatif pada tahun 2002 sebesar 4,25 persen.

3.3. Pendapatan Per Kapita

PDB per kapita atas dasar harga berlaku menggambarkan besarnya nilai tambah domestik bruto per penduduk Indonesia secara nominal, sedangkan PDB per kapita atas dasar harga konstan 2000 berguna untuk mengetahui nilai tambah nyata serta pertumbuhan nyata per kapita. Perkembangan PDB per kapita atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan 2000 selama kurun waktu 2001 sampai 2005 menunjukkan peningkatan yang cukup berarti.

Nilai tambah domestik bruto per kapita atas dasar berlaku penduduk Indonesia pada tahun 2001 adalah sebesar Rp 8.080,5 ribu. Angka ini dari tahun ke tahun selalu menunjukkan peningkatan. Dalam tahun 2002 dan 2003, PDB perkapita masing-masing meningkat menjadi Rp 8.645,1 ribu dan Rp 9.429,5 ribu. Selanjutnya pada tahun 2004, PDB per kapita kembali meningkat sebesar 11,42 persen menjadi Rp 10.506,2 ribu dan pada tahun 2005, PDB per kapita Indonesia telah mencapai Rp 12.450,7 ribu.



**Tabel 3.5. Produk Domestik Bruto per Kapita
Per capita Gross Domestic Product,
2001-2005
(Ribu Rupiah/ Thousand Rupiahs)**

Tahun	Harga Berlaku <i>At Current Market Prices</i>	Harga Konstan 2000 <i>At Constant 2000 Market Prices</i>
(1)	(2)	(3)
2001	8 080,5	6 922,9
2002	8 645,1 ^{r)}	7 142,7 ^{r)}
2003	9 429,5	7 385,5
2004 ^{x)}	10 506,2	7 657,7
2005 ^{xx)}	12 450,7	7 980,0

PDB per kapita atas dasar harga berlaku meningkat dari Rp. 10.506,2 ribu pada tahun 2004 menjadi Rp. 12.450,7 ribu pada tahun 2005.

Bila ditinjau berdasarkan harga konstan 2000, PDB per kapita selama kurun waktu 2001 sampai 2005 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2001 PDB per kapita penduduk Indonesia tercatat sebesar Rp 6.922,9 ribu. Setahun kemudian PDB per kapita tersebut naik sebesar 3,18 persen. Selanjutnya pada tahun 2003 dan 2004 PDB per kapita meningkat lebih tinggi di banding peningkatan tahun sebelumnya yaitu sebesar 3,40 persen pada tahun 2003 dan sebesar 3,69 persen pada tahun 2004. PDB per kapita pada tahun 2005 telah mencapai Rp. 7.980,0 ribu.

INDEKS HARGA KONSUMEN DAN LAJU INFLASI

Indeks Harga Konsumen •
Laju Inflasi •

4

Laju inflasi selama tahun 2005 melonjak menembus angka dua digit

Melambungnya harga minyak mentah di pasaran internasional serta kondisi moneter global yang kurang menguntungkan selama tahun 2005 berpengaruh terhadap perkembangan laju inflasi Indonesia. Laju inflasi yang pada dua tahun sebelumnya dapat dipertahankan pada level satu digit, pada tahun 2005 tertekan menembus angka dua digit. Kondisi ini terjadi terutama setelah pemerintah mengeluarkan kebijaksanaan menaikkan harga Bahan Bakar Minyak (BBM). Tingginya harga minyak mentah, mau tidak mau membuat pemerintah harus mengambil keputusan yang cukup sulit yaitu mengurangi subsidi BBM. Langkah ini ditempuh guna mengurangi membengkaknya subsidi BBM yang akan berakibat pada tidak stabilnya keuangan negara. Kenaikan harga BBM selama tahun 2005 terjadi 2 kali yaitu tanggal 1 Maret dan 1 Oktober. Kenaikan harga BBM yang lebih dari 100 persen pada tanggal 1 Oktober tersebut langsung berdampak pada melonjaknya harga barang-barang dan jasa.

Faktor lain yang juga turut andil pada tingginya laju inflasi selama tahun 2005, adalah adanya gangguan pasokan atau distribusi barang. Hal ini terjadi akibat kenaikan harga dan kelangkaan BBM di beberapa daerah serta adanya upaya penimbunan bahan-bahan pokok oleh oknum menyusul adanya kecenderungan kenaikan harga. Selain itu, kebijaksanaan pemerintah menaikkan harga komoditas *administered price* lainnya seperti harga elpiji, cukai rokok, tarif tol, dan PAM juga turut memicu tingginya laju inflasi. Demikian pula dengan terdepresiasi nilai tukar rupiah terhadap dolar AS dan ekspektasi masyarakat terhadap inflasi yang masih cukup tinggi menjadikan laju inflasi selama tahun 2005 tidak dapat dipertahankan lagi pada level satu digit.

4.1. Indeks Harga Konsumen

Indeks Harga Konsumen (IHK) gabungan 45 kota pada tahun 2005 secara umum mengalami kenaikan. Secara rata-rata IHK tahun 2005 mencapai 125,09 jauh lebih tinggi dibanding rata-rata IHK tahun sebelumnya yang tercatat sebesar 113,25. Kenaikan terjadi pada seluruh kelompok pengeluaran dalam penghitungan IHK. Peningkatan tertinggi

Indeks Harga Konsumen & Laju Inflasi

**Tabel 4.1. Indeks Harga Konsumen Gabungan 45 Kota di Indonesia,
Consumer Price Indices for Each of the 45 Cities in Indonesia
2000-2005 (2002 =100)**

Tahun/Bulan Year/Month	Bahan Makanan Food-stuff	Makanan Jadi, Minuman,Rokok dan Tembakau Prepared Food, Beverages, Ciga- rette and Tobacco	Perumahan, Air,Listrik,Gas & Bahan Bakar Housing,Water, Electricity, Gas and Fuel	Sandang Clothing	Kesehatan Health	Pendidikan, Rekreasi, dan O.R Education, Recreation, and Sport	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan Transportation, Communication and Financial Services	Umum General
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
2000 ¹⁾	249,03	229,49	175,24	245,27	229,87	183,96	182,78	210,27
2001 ¹⁾	269,99	261,50	196,21	267,79	255,52	211,45	208,14	234,46
2002 ¹⁾	299,69	292,86	224,79	280,28	272,40	235,64	245,23	262,31
2003	100,84	108,61	111,80	104,38	106,09	108,46	106,71	106,78
2004	106,78	112,99	120,45	110,20	110,96	119,11	111,81	113,25
Januari	105,92	110,75	116,11	108,61	108,38	114,48	107,99	110,45
Februari	104,39	111,52	116,85	108,64	108,42	114,46	108,12	110,43
Maret	104,54	111,94	117,63	108,84	109,61	114,63	108,31	110,83
April	106,40	112,30	119,08	109,10	110,47	114,76	108,79	111,91
Mei	106,98	112,54	119,82	109,12	110,95	114,89	113,01	112,90
Juni	108,02	112,71	120,48	109,81	111,25	114,98	113,09	113,44
Juli	108,48	112,97	121,09	110,04	111,58	116,13	113,12	113,88
Agustus	106,17	113,36	121,88	110,30	111,69	122,05	113,57	113,98
September	104,73	113,56	122,43	110,63	111,87	124,52	113,61	114,00
Oktober	106,10	113,89	122,78	111,28	112,02	126,10	113,66	114,64
Nopember	108,53	114,65	123,09	112,71	112,24	126,15	114,20	115,66
Desember	111,10	115,70	124,19	113,36	113,06	126,20	114,25	116,86
2005	117,41	122,81	131,42	116,39	116,17	130,36	134,63	125,09
Januari	114,55	116,63	126,03	113,39	113,31	126,29	114,70	118,53
Februari	112,88	117,26	126,51	113,44	113,51	126,26	114,81	118,33
Maret	113,01	119,16	127,22	114,17	114,18	126,63	126,32	120,59
April	112,77	119,84	127,99	114,55	114,52	126,78	126,88	121,00
Mei	112,92	120,11	128,45	114,73	115,20	126,83	127,93	121,25
Juni	113,74	121,52	128,77	115,19	115,57	127,03	127,23	121,86
Juli	116,09	122,06	129,17	115,82	115,93	128,24	127,28	122,81
Agustus	116,25	122,68	129,83	116,32	116,47	132,46	127,39	123,48
September	116,73	124,10	130,45	117,69	117,47	134,35	127,91	124,33
Oktober	125,18	128,08	140,10	119,86	118,59	136,23	164,45	135,15
Nopember	128,27	130,72	141,00	120,25	119,29	136,63	165,32	136,92
Desember	126,55	131,56	141,50	121,21	119,99	136,60	165,38	136,86

Catatan : 1) Gabungan 43 kota/Composite of 43 Cities (1996 = 100)

terjadi pada kelompok pengeluaran transpor dan komunikasi yang meningkat dari 111,81 (rata-rata tahun 2004) menjadi 134,63 pada tahun 2005. Kelompok pengeluaran lain yang mengalami peningkatan cukup tinggi selama tahun 2005 adalah kelompok perumahan, kelompok bahan makanan dan kelompok makanan jadi, rokok dan tembakau.

Selama tahun 2005, kenaikan IHK tertinggi terjadi pada bulan Oktober, setelah terjadi kenaikan harga BBM yang mencapai 126 persen.

Jika dilihat pergerakan IHK per bulan selama tahun 2005, secara umum IHK mengalami kenaikan atau terjadi inflasi kecuali pada bulan Februari dan Desember 2005 yang mengalami deflasi. Kenaikan IHK tertinggi terjadi pada bulan Oktober setelah terjadi kenaikan harga BBM yang kedua. Kenaikan harga BBM yang mencapai 126 persen (rata-rata), mengakibatkan IHK melonjak mencapai 135,15 atau meningkat sebesar 8,70 persen dibanding IHK bulan sebelumnya. Kenaikan IHK pada bulan Oktober terjadi pada semua kelompok barang dengan kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok transpor dan komunikasi yang meningkat dari 127,91 pada bulan September menjadi 164,45 pada bulan Oktober atau meningkat sebesar 28,57 persen. Tingginya kenaikan IHK pada kelompok transpor dan komunikasi terutama disebabkan oleh meningkatnya IHK pada sub kelompok transpor yang meningkat cukup tinggi mencapai 41,69 persen.

Kelompok pengeluaran lain yang mengalami kenaikan IHK cukup tinggi pada bulan Oktober adalah kelompok bahan makanan dan kelompok perumahan dengan masing-masing kenaikan sebesar 7,24 persen dan 7,40 persen. Kenaikan IHK tertinggi pada kedua kelompok pengeluaran tersebut terjadi pada sub kelompok bumbu-bumbuan dan bahan bakar, penerangan & air yang meningkat masing-masing sebesar 29,10 persen dan 22,18 persen. Untuk IHK kelompok pengeluaran lainnya, juga mengalami peningkatan dengan kisaran antara 0,95 persen sampai 3,21 persen.

Sementara penurunan IHK atau deflasi terjadi pada bulan Februari dan Desember 2005. IHK bulan Februari tercatat sebesar 118,33 atau sedikit menurun dibanding bulan sebelumnya yang tercatat sebesar 118,53. Penurunan IHK

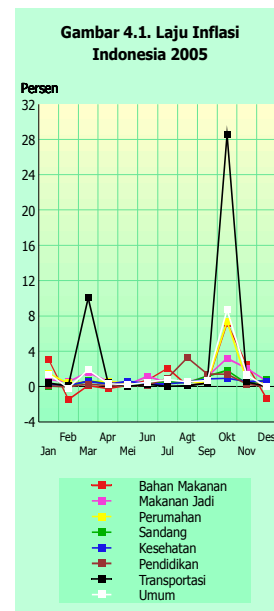
Indeks Harga Konsumen & Laju Inflasi

pada bulan Februari tersebut terutama disebabkan menurunnya IHK pada kelompok bahan makanan yaitu sebesar 114,55 menurun menjadi 112,88. Penurunan IHK kelompok bahan makanan diakibatkan oleh menurunnya harga bumbu-bumbuan yang menurun sebesar 13,32 persen. Sementara walaupun relatif kecil, kelompok pendidikan, rekreasi, dan olahraga juga memiliki andil dalam menyebabkan deflasi. IHK kelompok pengeluaran ini pada bulan Februari turun sebesar 0,03 persen. Seperti halnya pada bulan Februari, deflasi pada bulan Desember juga diakibatkan oleh menurunnya IHK pada kelompok bahan makanan dan kelompok pendidikan, rekreasi dan olah raga masing-masing sebesar 1,34 persen dan 0,02 persen.

4.2. Laju Inflasi

Laju inflasi yang dihitung berdasarkan pergerakan IHK pada tahun 2005 tercatat sebesar 17,11 persen. Angka ini jauh lebih tinggi dari laju inflasi pada tahun 2004 sebesar 6,40 persen, dan juga melampaui angka yang ditargetkan pemerintah yaitu berada dalam kisaran 6,0 + 1,0 persen. Melonjaknya laju inflasi tersebut diakibatkan meningkatnya harga barang-barang yang cukup tinggi sebagai dampak baik langsung maupun tidak langsung dari kenaikan harga BBM. Selama tahun 2005 seluruh kelompok pengeluaran mengalami kenaikan tingkat harga atau terjadi inflasi. Kenaikan tertinggi terjadi pada kelompok transpor dan komunikasi yang mencapai 44,75 persen. Tingginya laju inflasi kelompok transpor dan komunikasi terutama diakibatkan meningkatnya harga pada sub kelompok transpor yang mencapai 68,20 persen.

Kenaikan harga BBM juga berdampak pada kenaikan harga bahan bakar, penerangan dan air pada kelompok perumahan sebesar 29,50 persen. Hal ini mengakibatkan laju inflasi kelompok pengeluaran perumahan meningkat mencapai 13,94 persen. Sementara kelompok pengeluaran lain yang mengalami laju inflasi diatas 10 persen selama tahun 2005 adalah kelompok pengeluaran bahan makanan dan kelompok pengeluaran makanan jadi, minuman, rokok & tembakau.



**Tabel 4.2. Laju Inflasi Indonesia Menurut Kelompok Barang Kebutuhan
Inflation Rate of Indonesia by Commodity Group,
1998 – 2005, (%)**

Tahun/Bulan Year/Month	Bahan Makanan Food-stuff	Makanan Jadi, Minuman, Rokok dan Tembakau Prepared Food, Beverages, Cigarette and Tobacco	Perumahan, Air, Listrik, Gas & Bahan Bakar Housing, Water, Electricity, Gas and Fuel	Sandang Clothing	Kesehatan Health	Pendidikan, Rekreasi dan O.R Education, Recreation and Sport	Transpor, Komunikasi dan Jasa Keuangan Transportation, Communication and Financial Services	Umum General
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1998	118,37	94,32	47,47	98,69	86,14	38,01	55,55	77,63
1999	-5,25	3,60	5,23	6,54	3,87	5,29	5,15	2,01
2000	4,00	11,08	10,10	10,19	9,57	17,51	12,66	9,35
2001	12,03	14,48	13,59	8,14	8,92	11,90	14,16	12,55
2002	9,13	9,18	12,71	2,69	5,63	10,85	15,52	10,03
2003	-1,72	6,24	9,21	7,09	5,67	11,71	4,10	5,06
2004	6,38	4,85	7,40	4,87	4,75	10,31	5,84	6,40
2005	13,91	13,71	13,94	6,92	6,13	8,24	44,75	17,11
Januari	3,11	0,80	1,48	0,03	0,22	0,07	0,39	1,43
Pebruari	- 1,46	0,54	0,38	0,04	0,18	- 0,02	0,10	- 0,17
Maret	0,12	1,62	0,56	0,64	0,59	0,29	10,03	1,91
April	- 0,21	0,57	0,61	0,33	0,30	0,12	0,44	0,34
Mei	0,13	0,23	0,36	0,16	0,59	0,04	0,04	0,21
Juni	0,73	1,17	0,25	0,40	0,32	0,16	0,24	0,50
Juli	2,07	0,44	0,31	0,55	0,31	0,95	0,04	0,78
Agustus	0,14	0,51	0,51	0,43	0,47	3,29	0,09	0,55
September	0,41	1,16	0,48	1,18	0,86	1,43	0,41	0,69
Oktober	7,24	3,21	7,40	1,84	0,95	1,40	28,57	8,70
Nopember	2,47	2,06	0,64	0,33	0,59	0,29	0,53	1,31
Desember	- 1,34	0,64	0,35	0,80	0,59	- 0,02	0,04	- 0,04

Sumber : BPS (Indikator Ekonomi dan Warta IHK)

Tingginya laju inflasi pada kedua kelompok tersebut tidak terlepas dari adanya gangguan pasokan dan distribusi berkaitan dengan adanya kenaikan biaya transpor dan kelangkaan BBM di beberapa daerah akibat kenaikan harga BBM. Laju inflasi kelompok bahan makanan tercatat sebesar 13,91 persen, terutama didorong oleh meningkatnya harga pada padi-padian, umbi-umbian dan hasilnya serta bumbu-bumbuan yang meningkat masing-masing sebesar 26,06 persen dan 29,28 persen. Sementara tingginya laju inflasi

Indeks Harga Konsumen & Laju Inflasi

pada makanan jadi, minuman yang tidak beralkohol, serta tembakau & minuman beralkohol yang mencapai 14,91 persen, 13,89 persen dan 10,69 persen menyebabkan tingginya laju inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok & tembakau yaitu sebesar 13,71 persen.

Kelompok pengeluaran lain walaupun mengalami peningkatan namun masih dibawah 10 persen. Kelompok pengeluaran sandang selama tahun 2005 mengalami laju inflasi sebesar 6,92 persen. Laju inflasi yang cukup tinggi pada kelompok ini adalah barang pribadi dan sandang lain sebesar 17,64 persen. Sementara laju inflasi kelompok kesehatan tercatat sebesar 6,13 persen dan kelompok pendidikan, rekreasi & olah raga sebesar 8,24 persen.

Jika dilihat dari besarnya sumbangan/andil terhadap laju inflasi nasional yang sebesar 17,11 persen, kelompok pengeluaran transpor dan komunikasi merupakan penyumbang tertinggi sebesar 6,34 persen. Disusul kelompok pengeluaran perumahan dan bahan makanan masing-masing dengan sumbangan sebesar 3,89 persen dan 3,26 persen. Kelompok makanan jadi, minuman, rokok dan tembakau memberi andil sebesar 2,39 persen terhadap laju inflasi

Kelompok Transpor, komunikasi & jasa keuangan memberikan andil terbesar terhadap laju inflasi nasional pada tahun 2005.

**Tabel 4.3. Sumbangan Kelompok Pengeluaran terhadap Inflasi Nasional
Share Commodity Group to National Inflation Rate, 2005 (%)**

Kelompok Commodity Group	Sumbangan terhadap Inflasi Share to Inflation Rate
(1)	(2)
U M U M/General	17,11
Bahan Makanan/Foodstuff	3,26
Makanan Jadi, Minuman, Rokok & Tembakau/Prepared Food, Beverages Cigarette and Tobacco	2,39
Perumahan, Air, Listrik, Gas dan Bahan Bakar/Housing, Water, Electricity, Gas and Fuel	3,89
Sandang/Clothing	0,43
Kesehatan/Health	0,25
Pendidikan, Rekreasi & Olah Raga/ Education, Recreation, and Sport	0,55
Transpor, Komunikasi & Jasa Keuangan/ Transportation, Communication and Financial Services	6,34

Sumber/Source : Warta IHK

nasional, sementara kelompok pengeluaran lainnya yaitu sandang, kesehatan, dan pendidikan, rekreasi & olah raga masing-masing memberi andil sebesar 0,43 persen, 0,25 persen dan 0,55 persen.

Sementara jika dilihat berdasarkan jenis barang dan jasa, tarif angkutan dalam kota merupakan penyumbang terbesar terhadap laju inflasi nasional yaitu sebesar 2,79 persen. Disusul bensin dan minyak tanah dengan andil masing-masing sebesar 2,61 persen dan 1,61 persen. Beras yang merupakan komoditas strategis juga cukup besar sumbangannya terhadap laju inflasi yaitu sebesar 1,24 persen. Sementara sumbangan komoditas-komoditas lainnya masih dibawah satu persen.

Perkembangan laju inflasi di 45 kota di Indonesia pada tahun 2003 dan 2004 bergerak menuju angka yang berada pada level moderat. Pada periode tersebut sudah tidak ada satu kota pun yang mencatat inflasi lebih dari dua digit. Namun pada tahun 2005 laju inflasi seluruh kota yang dilakukan penghitungan IHK menembus angka dua digit. Laju inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh sebesar 41,11 persen, sedangkan terendah di Denpasar sebesar 11,31 persen. Menurut wilayah, laju inflasi di pulau Jawa berkisar antara 13 hingga 21 persen dengan inflasi tertinggi terjadi di Tasikmalaya (20,83 persen) dan terendah di Surakarta (13,88 persen). Sementara di luar pulau Jawa laju inflasi berkisar antara 11 hingga 42 persen, dengan laju inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh (41,11 persen) dan terendah di Denpasar (11,31 persen). Di Sumatera, laju inflasi tertinggi terjadi di Banda Aceh (41,11 persen) dan terendah di Batam (14,79 persen). Sedangkan di Sulawesi dan Kalimantan, laju inflasi tertinggi masing-masing terjadi di Kendari (21,45 persen) dan Balikpapan (17,28 persen), terendah masing-masing terjadi di Ujung Pandang/Makasar (15,20 persen) dan Banjarmasin (12,94 persen).

Pada tahun 2005 laju inflasi tertinggi terjadi di Kota Banda Aceh (41,11 persen), terendah di Kota Denpasar (11,31 persen).

Indeks Harga Konsumen & Laju Inflasi

Tabel 4.4. Laju Inflasi 45 Kota¹⁾ di Indonesia
Inflation Rate of 45 Cities in Indonesia,
2000 - 2005 (2002=100)

Kota	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Banda Aceh	10,57	16,60	10,14	3,50	6,97	41,11
Lhokseumawe	8,73	11,67	10,99	4,53	7,36	17,57
Medan	5,90	15,50	9,49	4,46	6,64	22,91
Padang Sidempuan	3,95	9,84	10,18	4,07	8,99 ^{†)}	18,47
Pematang Siantar	4,67	13,55	9,41	2,51	7,31 ^{†)}	19,67
Sibolga	6,95	8,66	11,58	3,94	6,64	22,39
Padang	10,99	9,86	10,22	5,55	6,98 ^{†)}	20,47
Pekanbaru	10,34	14,65	11,66	6,65	8,92	17,10
Batam	9,00	12,64	9,14	4,27	4,22	14,79
Jambi	8,40	10,11	12,62	3,79	7,25	16,50
Palembang	8,49	15,15	12,25	5,03	8,94	19,92
Bengkulu	8,21	10,58	10,11	4,14	4,67 ^{†)}	25,22
Bandar Lampung	10,18	12,94	10,32	5,44	5,22 ^{†)}	21,17
Pangkal Pinang	-	-	-	-	9,00 ^{†)}	17,44
Jakarta	10,29	11,52	9,08	5,78	5,87	16,06
Bandung	8,52	11,91	11,97	5,69	7,56	19,56
Serang/Cilegon	7,03	12,75	9,68	5,21	6,40	16,11
Tasikmalaya	4,57	16,71	10,29	3,88	5,92	20,83
Cirebon	6,52	12,93	10,53	3,35	3,27 ^{†)}	16,82
Semarang	8,73	13,98	13,56	6,07	5,98 ^{†)}	16,46
Tegal	7,85	11,26	11,27	1,86	5,25 ^{†)}	18,39
Surakarta	7,89	15,58	8,64	1,73	5,16	13,88
Purwokerto	10,02	11,76	8,77	2,89	6,32	14,54
Yogyakarta	7,32	12,56	12,01	5,73	6,95	14,98
Surabaya	10,46	14,13	9,15	4,79	6,06	14,12
Malang	10,62	12,45	9,74	3,23	6,28	15,74
Kediri	7,05	15,91	8,87	1,13	6,38	16,84
Jember	10,35	13,92	9,75	5,20	6,24	16,86
Denpasar	9,81	11,52	12,49	4,56	5,97 ^{†)}	11,31
Mataram	5,19	14,76	7,96	1,82	6,61 ^{†)}	17,72
Kupang	10,62	12,34	9,77	5,45	8,28	15,16
Pontianak	8,34	10,60	8,61	5,48	6,06 ^{†)}	14,43
Palangkaraya	8,57	13,35	9,18	5,68	7,25	12,12
Sampit	11,87	14,69	7,59	3,06	6,67	11,90
Banjarmasin	7,57	8,36	9,18	6,77	7,54	12,94
Samarinda	11,91	10,21	10,26	7,99	5,65 ^{†)}	16,64
Balikpapan	10,67	10,82	11,38	5,92	7,60	17,28
Manado	11,41	13,30	15,22	0,69	4,69 ^{†)}	18,73
Palu	8,11	18,73	13,36	5,84	7,01	16,33
Ujung Pandang/Makassar	9,73	11,77	8,25	3,01	6,47 ^{†)}	15,20
Kendari	11,25	12,56	10,35	2,41	7,72 ^{†)}	21,45
Gorontalo	-	-	-	-	8,64	18,56
Ambon	8,52	14,12	9,47	2,51	3,44	16,67
Ternate	14,51	13,71	6,40	6,27	4,82	19,42
Jayapura	10,23	14,00	13,91	8,39	9,45 ^{†)}	14,15
Nasional	9,35	12,55	10,03	5,06	6,40	17,11

Catatan/Note : 1) Sebelum tahun 2004 merupakan laju inflasi 43 kota/Prior to 2004, the inflation rate in 43 cities (1996=100)

PERDAGANGAN LUAR NEGERI

- Perkembangan Ekspor •*
- Perkembangan Impor •*
- Neraca Perdagangan Indonesia •*

5

<http://www.bp.go.id>

Kegiatan ekspor Indonesia dan pertumbuhannya dituntut untuk terus dipacu guna mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti yang ditargetkan oleh pemerintah. Ada dua hal penting yang menjadi alasannya. Pertama, semua negara berlomba untuk memacu tingkat pertumbuhan ekspor dan pertumbuhan ekonomi negaranya. Kedua, peningkatan ekspor dibutuhkan untuk meningkatkan cadangan devisa, memperkuat nilai tukar rupiah, dan mendorong terus pertumbuhan ekonomi.

5.1. Perkembangan Ekspor

Perkembangan nilai ekspor Indonesia selama periode 2001-2005 cukup menggembirakan karena terjadi peningkatan setiap tahun, dengan rata-rata pertumbuhan 11,30 persen per tahun. Pada tahun 2001 nilai ekspor Indonesia tercatat US\$ 56 320,9 juta. Kondisi keamanan di dalam negeri pada tahun 2002 yang belum kondusif, terbukti dengan terjadinya tragedi pemboman di Legian Bali pada 12 Oktober 2002 turut mempengaruhi kegiatan ekspor Indonesia, yang hanya tumbuh sebesar 1,49 persen menjadi US \$ 57 158,8 juta. Di tengah-tengah maraknya perdagangan bebas ASEAN atau AFTA dan grup perdagangan bebas dunia atau WTO, ternyata Indonesia mampu meningkatkan ekspor kembali sebesar 6,82 persen hingga mencapai US \$ 61 058,3 juta pada tahun 2003. Pada dua tahun terakhir pertumbuhan ekspor melaju lebih cepat, yaitu tumbuh 17,24 persen pada tahun 2004 menjadi US \$ 71 584,6 juta. Kemudian pada tahun 2005 meningkat kembali menjadi US \$ 85 660,0 juta atau tumbuh sebesar 19,66 persen.

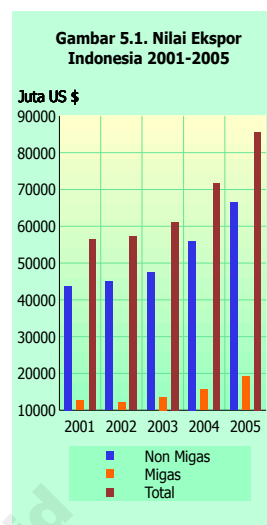
Nilai ekspor Indonesia tahun 2005 naik 19,66 persen dibanding tahun sebelumnya

Kinerja ekspor Indonesia sampai saat ini masih didukung oleh komoditi non migas yang menghasilkan devisa cukup tinggi. Sebagai penyumbang terbesar ekspor Indonesia, kontribusinya pada periode 2001 - 2005 berfluktuatif berkisar antara 77 persen sampai 79 persen. Sementara perkembangan pertumbuhan nilai ekspor non migas selama lima tahun terakhir tidak jauh berbeda polanya dengan perkembangan total nilai ekspornya. Pada tahun 2001

Perdagangan Luar Negeri

dominasi ekspor non migas menyumbang devisa negara sebesar US \$ 43 684,6 juta, meningkat menjadi US \$ 45 046,1 juta pada tahun 2002 atau naik sebesar 3,12 persen. Sampai akhir tahun 2003 nilai ekspor non migas Indonesia tercatat sebesar US \$ 47 406,6 juta atau naik 5,24 persen. Peningkatan nilai ekspor non migas pada dua tahun terakhir cukup tinggi, masing-masing menjadi US \$ 55 939,3 juta pada tahun 2004 dan US \$ 66 428,5 juta pada tahun 2005, dengan rata-rata peningkatan sebesar 18,38 persen per tahun.

Selama kurun waktu 2001-2005 ekspor migas memberikan sumbangan rata-rata lebih dari 21 persen terhadap total nilai ekspor. Pada tahun 2002 nilai ekspor migas Indonesia mengalami penurunan sebesar 4,14 persen dibanding tahun sebelumnya, atau turun dari US \$12 636,3 juta menjadi US \$ 12 112,7 juta. Penurunan tersebut terjadi terutama disebabkan oleh turunnya ekspor minyak mentah sebesar 8,52 persen dan ekspor gas sebesar 2,70 persen. Penurunan nilai ekspor minyak mentah ini lebih dipengaruhi



Tabel 5.1. Nilai Ekspor Indonesia Menurut Migas dan Non Migas, Indonesian Export Value by Oil & Gas and Non Oil & Gas 2001 – 2005 (Juta/Million US \$)

Ekspor/Export	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas/Oil & Gas	12 636,3	12 112,7	13 651,7	15 645,3	19 231,5
Minyak Mentah/Crude Petroleum	5 714,7	5 227,6	5 621,0	6 241,4	8 145,8
Hasil Minyak/Petroleum Product	1 189,4	1 307,4	1 553,8	1 654,4	1 932,0
Gas/Gas	5 732,2	5 577,7	6 476,9	7 749,6	9 153,7
Non Migas/Non Oil & Gas	43 684,6	45 046,1	47 406,6	55 939,3	66 428,5
Sektor Pertanian/ Product of the Agriculture Sector	2 438,5	2 568,3	2 526,2	2 496,2	2 880,3
Sektor Industri/ Product of the Industrial Sector	37 671,1	38 729,6	40 880,0	48 677,3	55 593,7
Sektor Tambangdan Lainnya/Product of the Mining Sector and the other	3 575,0	3 748,2	3 995,7	4 765,8	7 954,5
Jumlah/Total	56 320,9	57 158,8	61 058,3	71 584,6	85 660,0

Sumber / Source : Indikator Ekonomi / Economic Indicators

oleh gejolak naik turunnya harga minyak mentah di pasaran internasional yang berkisar antara US \$ 19-22 per barel dan juga volume ekspor minyak mentah yang menurun karena terbatasnya produksi di dalam negeri.

Ekspor migas mulai bergairah kembali pada tahun 2003 setelah tahun sebelumnya mengalami kelesuan di pasar ekspor, yaitu meningkat menjadi US \$ 13 651,7 juta atau meningkat sebesar 12,71 persen dibanding tahun sebelumnya, dan meningkat kembali pada tahun 2004 sebesar 14,60 persen menjadi US \$ 15 645,3 juta. Nilai ekspor migas mencapai puncaknya pada tahun 2005 yang mencapai US \$ 19 231,5 juta atau meningkat cukup pesat sebesar 22,92 persen.

Nilai ekspor migas mencapai puncaknya pada tahun 2005 yang mencapai US\$ 19 231,5 juta.

5.1.1. Ekspor Beberapa Komoditi Penting

Untuk meningkatkan kinerja di bidang ekspor, pemerintah telah mengambil langkah-langkah dengan menghilangkan hambatan-hambatan di bidang ekspor baik yang bersifat administratif maupun birokratif melalui berbagai kebijaksanaan. Bagi pemerintah dewasa ini yang terpenting adalah mengenai kebijaksanaan deregulasi yang dapat mengangkat sektor riil sehingga dapat menambah keunggulan bagi komoditas ekspor Indonesia. Disamping itu sektor riil menjadi andalan untuk mengatasi masalah pengangguran, kemiskinan, mengurangi ketimpangan antar kelompok pendapatan, dan mencegah kerawanan sosial.

Upaya lain yang dilakukan adalah dikeluarkannya SKB (Surat Keputusan Bersama) tentang Pertukaran Dokumen/Data Secara Elektronik antara Direktorat Jendral Perdagangan Luar Negeri, Direktorat Jendral Perdagangan Dalam Negeri, Direktorat Jendral Bea dan Cukai, dan Direktorat Jendral Pajak. Tujuan SKB adalah meningkatkan pengamanan dan kelancaran arus barang/dokumen ekspor dan impor, untuk memberikan pelayanan yang lebih baik bagi dunia usaha (*Good Governance*), serta mengantisipasi gerak perdagangan dunia yang berkembang semakin dinamis dan sedang mengalami transformasi menuju era masyarakat informasi sebagai akibat kemajuan teknologi informasi yang pesat. Dengan adanya operasionalisasi pertukaran data elektronik secara terpadu,

dapat menjadi satu alternatif untuk mencegah penyelundupan administratif dan fisik, serta mencegah adanya transshipment yang merugikan negara. Diharapkan dari kerjasama ini dapat memberikan kontribusi yang signifikan bagi peningkatan pendapatan negara dari sektor pajak maupun perolehan devisa dari peningkatan ekspor non migas, yang akan memberikan multiplier efek bagi peningkatan cadangan devisa, perkembangan industri dalam negeri, investasi dan kesempatan kerja, yang pada gilirannya akan menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Ekspor hasil pertanian Indonesia pada tahun 2001 tercatat sebesar US 2 438,5 juta dan meningkat 5,32 persen pada tahun 2002 menjadi US \$ 2 568,3 juta. Namun dua tahun berikutnya secara berturut-turut ekspor hasil pertanian mengalami penurunan, masing-masing sebesar 1,64 persen pada tahun 2003 dan sebesar 1,19 persen pada tahun 2004. Keadaan tersebut terjadi karena produk pertanian Indonesia masih kalah bersaing di pasar ekspor dengan negara lain seperti China yang mulai aktif melakukan ekspansi di sektor pertanian, khususnya tanaman hortikultura, disamping negara tetangga Malaysia dan Thailand. Turunnya ekspor hasil pertanian pada tahun 2003 disebabkan oleh turunnya ekspor biji coklat dan hasil pertanian lainnya. Sedangkan penurunan ekspor pada tahun 2004 lebih disebabkan karena turunnya ekspor udang dan rempah-rempah. Meskipun masih dalam kondisi persaingan ketat dengan negara lain, ekspor hasil pertanian mulai menunjukkan titik cerah kembali pada tahun 2005 yang mengalami peningkatan ekspor sebesar 15,39 persen, atau naik dari US \$ 2 496,2 juta menjadi US \$ 2 880,3 juta. Dengan potensi keanekaragaman hasil pertanian yang dimiliki, seharusnya Indonesia dapat merebut peluang pasar yang besar dan lebih luas. Selain itu strategi pengembangan industri Indonesia seharusnya berbasis pertanian, yaitu dengan mengembangkan agroindustri dan menghilangkan segala hambatan yang membuat rendahnya daya saing di pasar dunia.

Produk pertanian Indonesia kalah bersaing dengan China, Malaysia, dan Thailand.

Tabel 5.2. Ekspor Komoditi Penting Indonesia
Export of Primary Commodity Indonesia, 2001 – 2005
(Juta/Million US \$)

Komoditas Ekspor <i>Export Commodity</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Ekspor Hasil Pertanian Export of Agricultural Products	2 438,5	2 568,3	2 526,2	2 496,2	2 880,3
Udang/Shrimps	940,1	840,4	852,7	824,0	846,9
Ikan/Fish	358,8	377,6	424,1	470,8	480,5
Kopi/Coffee	182,5	218,8	251,0	281,5	497,7
Biji Coklat/Cocoa Beans	276,5	521,3	410,4	370,4	468,2
Rempah-rempah/Spices	174,2	186,1	186,3	153,7	153,3
Hasil Pertanian Lainnya <i>Other Agricultural Products</i>	506,4	424,1	401,7	395,8	433,7
Ekspor Hasil Industri Export of Industrial Product	37 671,1	38 729,6	40 880,0	48 677,3	55,593,7
Pakaian Jadi/Garments	4 476,7	3 887,2	4 037,9	4 351,9	4 967,0
Kayu Olahan/ <i>Processed Wood</i>	3 265,2	3 251,5	3 161,5	3 247,7	3 086,5
Tekstil Lain/Other Textile	3 198,9	3 075,9	3 064,6	3 354,6	3 704,0
Alat-alat Listrik/ <i>Electrical Apparatus</i>	2 605,0	2 700,1	3 120,5	3 486,1	4 364,1
Kertas & Barang dari kertas/Paper & paper goods	2 034,3	2 097,4	2 007,3	2 228,9	2 324,8
Hasil Industri Lainnya <i>Other Industrial Products</i>	22 091,0	23 717,5	25 498,2	32 008,1	37 147,3
Ekspor Hasil Tambang Export of Mining Products	3 569,6	3 743,6	3 995,7	4 761,4	7 946,8
Batu Bara/Coal	1 617,5	1 762,4	1 980,1	2 748,8	4 354,0
Bijih Tembaga/Copper Ore	1 585,3	1 755,5	1 854,7	1 802,4	3 311,1
Hasil Tambang Lainnya <i>Other Mining Products</i>	366,8	225,7	160,9	210,2	281,7

Sumber/Source : Indikator Ekonomi /Economic Indicators

Beberapa hasil pertanian yang masih bisa berkompetisi dengan negara-negara lain diantaranya seperti komoditas udang, ikan, kopi, biji coklat dan rempah-rempah. Maraknya praktek transshipment oleh segelintir pengusaha yang ingin mencari keuntungan besar dengan cara mengimpor dari negara yang terkena anti dumping telah berimplikasi buruk bagi usaha budidaya udang, sehingga berdampak pada perkembangan ekspornya. Nilai ekspor udang sebagai komoditas primadona produk pertanian menunjukkan nilai yang fluktuatif dan cenderung menurun selama periode tahun 2001-

2005, dengan rata-rata laju pertumbuhan minus 2,43 persen. Kondisi terparah terjadi pada ekspor udang tahun 2002, yang sempat merosot sebesar 10,61 persen dibanding tahun sebelumnya, atau turun dari US \$ 940,1 juta menjadi US \$ 840,4 juta. Penurunan ini merupakan dampak dari kebijakan pengetatan impor udang yang dilakukan oleh negara-negara Uni Eropa dan Amerika Serikat (*Kompas*, 30-12-2003). Sampai akhir tahun 2005, nilai ekspor udang baru mencapai US \$ 846,9 juta, hanya meningkat 2,78 persen dibanding tahun sebelumnya. Jika dilihat kontribusinya terhadap total nilai ekspor non migas, ekspor udang pada periode yang sama juga mengalami penurunan setiap tahunnya, dari 2,15 persen pada tahun 2001 menjadi 1,27 persen pada tahun 2005

Udang sebagai primadona ekspor hasil pertanian nilai ekspornya berfluktuatif dan cenderung mengalami penurunan selama kurun 2001-2005.

Kegiatan ekspor sangat terkait erat dengan kinerja industri di dalam negeri. Untuk memperkuat daya saing di sektor industri perlu adanya kerjasama dan perlu didukung oleh kebijakan yang dapat mendorong industri untuk dapat bersaing di pasar bebas, karena pangsa pasar merupakan hal terpenting bagi pelaku usaha di sektor industri. Sektor industri sebagai sektor unggulan ekspor non migas, menyumbang rata-rata antara 84 persen sampai 87 persen selama tahun 2001-2005. Selama kurun waktu tersebut, perkembangan nilai ekspor industri meningkat setiap tahun, dengan rata-rata peningkatan 10,41 persen per tahun. Peningkatan tertinggi dicapai pada tahun 2004 yang meningkat sebesar 19,07 persen dibanding tahun sebelumnya, atau naik dari US \$ 40 880,0 juta menjadi US \$ 48 677,3 juta. Posisi ekspor hasil industri sampai akhir 2005 mencapai US \$ 55 593,7 juta, atau meningkat 14,21 persen.

Industri pakaian jadi dan industri tekstil lain merupakan penyumbang devisa terbesar di sektor industri, karena memiliki daya saing yang relatif baik di pasar internasional. Hal ini disebabkan Indonesia memiliki industri yang lengkap dari hulu ke hilir, yakni dari produk benang (pemintalan), pertununan, rajutan, dan produk akhir. Untuk industri tekstil, sampai saat ini Indonesia menjadi negara pengekspor ke-11 terbesar di dunia dengan pangsa pasar 3,15 persen dari total pasar tekstil dunia. Sedangkan ekspor pakaian jadi menempati urutan

ke-9 dengan pangsa pasar 4,45 persen dari total nilai pasar tekstil dunia. Perkembangan ekspor pakaian jadi sempat terpuruk pada tahun 2002 yang turun sebesar 13,17 persen dibanding tahun sebelumnya. Namun di tahun-tahun berikutnya meningkat terus dan puncaknya terjadi pada tahun 2005 yang meningkat sebesar 14,13 persen, atau meningkat dari US \$ 4 351,9 juta menjadi US \$ 4 967,0 juta. Sementara ekspor tekstil lain pada tahun 2002-2003 turun masing-masing sebesar 3,85 persen dan 0,37 persen, tetapi pada dua tahun berikutnya mengalami peningkatan cukup signifikan, masing-masing sebesar 9,46 persen pada tahun 2004 dan 10,42 persen pada tahun 2005. Posisi akhir nilai ekspor tekstil lain pada tahun 2005 mencapai US \$ 3 704,0 juta.

Selama periode 2001-2004, sumbangan nilai ekspor hasil pertambangan baru sekitar 8 persen terhadap total nilai ekspor non migas, namun pada tahun 2005 sumbangannya meningkat hampir 12 persen. Perkembangan laju pertumbuhan ekspor hasil pertambangan juga meningkat terus selama tahun 2001-2005. Pada tahun 2001 nilai ekspor hasil tambang baru mencapai US \$ 3 569,6 juta, meningkat menjadi US \$ 4 761,4 juta pada tahun 2004 atau meningkat rata-rata sebesar 10,25 persen per tahun. Setahun kemudian ekspor hasil pertambangan meningkat dengan tajam sebesar 66,90 persen menjadi US \$ 7 946,8 juta. Penyumbang terbesar nilai ekspor hasil pertambangan adalah hasil batu bara dan bijih tembaga. Peningkatan ini dipengaruhi oleh meningkatnya nilai ekspor hasil tambang batu bara sebesar 58,40 persen dan lonjakan nilai ekspor bijih tembaga sebesar 83,71 persen. Padahal di tahun sebelumnya nilai ekspor bijih tembaga sempat turun 2,82 persen. Secara nominal, posisi nilai ekspor batu bara pada tahun 2005 mencapai US 4 354,0 juta dengan sumbangan sekitar 7 persen terhadap total ekspor non migas, sedangkan nilai ekspor bijih tembaga mencapai US \$ 3 311,1 juta dengan sumbangan sekitar 5 persen dari total ekspor non migas.

Nilai ekspor hasil pertambangan meningkat tajam pada tahun 2005, sebesar 66,90 persen.

Ekspor Indonesia menurut golongan barang SITC meliputi golongan barang kode 0 hingga 9. Penyumbang terbesar terhadap total nilai ekspor adalah kode 3 yaitu untuk

Perdagangan Luar Negeri

bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya. Pada tahun 2001 nilai ekspor barang berkode 3 tersebut tercatat sebesar US \$ 14 273 juta, kemudian turun sebesar 2,56 persen menjadi US \$ 13 908 juta pada tahun 2002. Menginjak tahun 2003 sampai akhir tahun 2005 kegiatan ekspor barang kode 3 mulai bergairah kembali terlihat dari nilai ekspornya yang terus meningkat dari US \$ 15 710 juta pada tahun 2003 menjadi US \$ 23 717 juta pada tahun 2005. Ekspor golongan barang SITC yang cukup tinggi juga sumbangannya terhadap total ekspor adalah hasil industri menurut bahan (SITC kode 6). Keadaan ekspor dari golongan barang SITC kode 6 sama dengan golongan barang SITC kode 3 dimana pada tahun 2002 mengalami penurunan 2,44 persen dibanding tahun sebelumnya. Pada tahun 2003 sampai tahun 2005 mengalami peningkatan setiap tahunnya, yaitu dari US \$ 11 177 juta pada tahun 2003 menjadi US \$ 14 401 juta pada tahun 2005. Sumbangan nilai ekspor golongan

**Tabel 5.3. Nilai Ekspor Indonesia menurut Golongan Barang SITC
Export Value by SITC Commodity Groups, 2001 – 2005
(Juta/Million US \$)**

SITC	Golongan Barang Commodity Groups	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup <i>Food and Live Animals</i>	3 254	3 606	3 665	3 968	4 575
1	Minuman dan Tembakau <i>Beverages and Tobacco</i>	292	267	223	279	342
2	Bahan Mentah <i>Raw Materials, Inedible</i>	4 188	4 522	5 318	6 433	9 018
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb <i>Fuels, Lubricants etc</i>	14 273	13 908	15 710	18 561	23 717
4	Minyak/lemak Nabati & Hewani <i>Animal & Vegetables Oil and Fats</i>	1 446	2 655	3 012	4 493	5 027
5	Bahan Kimia/ <i>Chemical</i>	2 835	2 969	3 386	4 016	4 493
6	Hasil Industri menurut Bahan <i>Manufactured goods</i>	11 200	10 927	11 177	12 866	14 401
7	Mesin & Alat Pengangkut <i>Machinery & Transport Equipment</i>	9 105	9 788	9 772	11 523	13 603
8	Hasil Industri Lainnya <i>Misc. Manufactured Articles</i>	9 289	8 194	8 485	9 197	10 274
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya <i>Commodities & Other Special Transactions</i>	439	322	310	249	210
Jumlah/Total		56 321	57 159	61 058	71 585	85 660

Sumber/Source : Indikator Ekonomi/*Economic Indicators*

barang kode 3 dan kode 6 pada tahun 2005 masing-masing sebesar 27,69 persen dan 16,81 persen terhadap total nilai ekspor.

5.1.2. Ekspor Menurut Negara Tujuan

Salah satu tantangan yang dihadapi kinerja ekspor Indonesia adalah menghadapi persaingan global di pasar internasional. Untuk itu pemerintah perlu melakukan diversifikasi produk dan meningkatkan standar mutu produk dalam negeri. Upaya ini dilakukan dengan cara mengolah bahan baku menjadi produk ekspor yang lebih kompetitif, sehingga dapat meningkatkan daya saing dan nilai tambah di pasaran dunia. Disamping itu pemerintah juga perlu mengadakan pengembangan diversifikasi negara tujuan ekspor dengan cara membuka pangsa pasar baru seperti negara-negara Timur Tengah, Afrika dan Amerika Latin. Ini berarti pemerintah perlu menggalakkan ekspor non migas ke pasar-pasar yang baru tanpa meninggalkan pasar yang selalu menjadi negara tujuan ekspor yang utama selama ini. Pangsa pasar Uni Eropa menjadi peluang baik bagi ekspor Indonesia, karena Eropa telah mengeluarkan kebijakan dibidang perdagangan dengan negara-negara kurang berkembang dan miskin (*least developed countries* – LDC) (Republika 26 Oktober 2001). Kebijakan tersebut berupa liberalisasi akses ke pasar Uni Eropa untuk semua ekspor dari negara-negara LDC tersebut. Termasuk juga bagi produk-produk sensitif seperti beras dan gula. Kebijaksanaan ini bersifat unilateral dan tidak terikat dengan perjanjian apapun dengan Amerika Serikat, Kanada dan Jepang.

Negara tujuan ekspor utama adalah Jepang dengan kontribusi berkisar antara 21-23 persen selama periode 2001-2005.

Pada tabel 5.4 dapat dilihat, bahwa peluang pasar ekspor Indonesia terbesar adalah ke negara Jepang, terutama ekspor komoditi gas dan minyak bumi. Amerika Serikat merupakan pasar ekspor terbesar kedua dan banyak menyerap komoditi udang yang sempat terancam embargo akibat praktek transshipment oleh segelintir oknum pengusaha. Selain itu negara yang sangat potensial menjadi tujuan ekspor Indonesia diantaranya adalah negara-negara ASEAN khususnya negara Singapura dan Malaysia, serta negara-negara Uni Eropa.

Perdagangan Luar Negeri

Selama kurun waktu 2001-2005, ekspor yang berhasil terserap ke Jepang menunjukkan kontribusi yang fluktuatif berkisar antara 21 persen sampai 23 persen terhadap total eksportnya. Pada tahun 2002 nilai ekspor Indonesia ke Jepang turun 7,42 persen, menjadi US \$ 12 045,1 juta dari US \$ 13 010,2 juta pada tahun 2001. Titik cerah kembali mewarnai ekspor Indonesia ke Jepang pada tahun 2003 yang naik 12,94 persen menjadi US \$ 13 603,4 juta. Puncaknya terjadi pada tahun 2004, dimana nilai ekspor Indonesia ke Jepang meningkat lebih tinggi sebesar 17,34 persen menjadi US \$ 15 962,1 juta. Pada tahun 2005 ekspor ke Jepang meningkat lebih lambat hanya 13,07 persen menjadi US \$ 18 049,1 juta.

Kinerja ekspor Indonesia ke negara Jepang mencapai puncaknya pada tahun 2004, yang meningkat 17,34 persen.

Negara tujuan ekspor Indonesia terbesar kedua adalah Amerika Serikat. Sampai akhir tahun 2001 Amerika Serikat mampu menyerap ekspor Indonesia sebesar US \$ 7 748,7 juta, dengan kontribusi sebesar 13,76 persen terhadap total nilai ekspor. Dua tahun berikutnya berturut-turut ekspor ke Amerika Serikat sempat melemah, yaitu turun masing-masing sebesar 2,45 persen pada tahun 2002 dan 2003, dengan kontribusi masing-masing 13,22 persen tahun 2002 dan 12,08 persen pada tahun 2003. Memasuki tahun 2004 ekspor Indonesia ke Amerika Serikat mulai bergairah kembali, dimana nilai eksportnya meningkat 18,90 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Peningkatan terjadi lagi pada tahun 2005 sebesar 12,56 persen atau secara nominal naik dari US \$ 8 767,3 juta menjadi US \$ 9 868,5 juta.

Nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mengalami peningkatan selama periode 2001-2005, baik pertumbuhan maupun kontribusinya setiap tahun. Sebagian besar ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN adalah ke Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2001 nilai ekspor ke negara-negara ASEAN sebesar US \$ 9 507,1 juta, kemudian pada tahun berikutnya meningkat 4,48 persen menjadi US \$ 9 933,3 juta. Walaupun pada tahun 2002 nilai ekspor ke negara-negara ASEAN meningkat tetapi nilai ekspor Indonesia ke negara Singapura menurun 0,28 persen. Nilai ekspor ke negara-negara ASEAN kembali mengalami

Tabel 5.4 Ekspor Indonesia menurut Negara Tujuan
Export by Country of Destination,
2001-2005 (Juta/ Million US \$)

Negara Tujuan <i>Country of Destination</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	9 507,1 (16,88)	9 933,3 (17,38)	10 725,5 (17,56)	12 997,7 (18,16)	15 824,9 (18,47)
(Malaysia)	1 778,6 (3,16)	2 029,9 (3,55)	2 363,6 (3,87)	3 015,9 (4,21)	3 431,3 (4,01)
(Muangthai)	1 063,6 (1,89)	1 227,5 (2,15)	1 392,7 (2,28)	1 976,2 (2,76)	2 246,5 (2,62)
(Singapura/Singapore)	5 363,9 (9,52)	3 349,1 (9,36)	5 399,8 (8,84)	6 001,1 (8,38)	7 836,6 (9,15)
2. Hongkong	1 290,3 (2,29)	1 242,4 (2,17)	1 183,4 (1,94)	1 387,4 (1,94)	1 492,3 (1,74)
3. Jepang/Japan	13 010,2 (23,10)	12 045,1 (21,07)	13 603,4 (22,28)	15 962,1 (22,30)	18 049,1 (21,07)
4. Asia Lainnya/Rest of Asia	11 862,5 (21,06)	13 142,2 (22,99)	14 907,3 (24,41)	17 834,8 (24,91)	23 396,3 (27,31)
5. Amerika Serikat/U.S.A	7 748,7 (13,76)	7 558,8 (13,22)	7 373,7 (12,08)	8 767,3 (12,25)	9 868,5 (11,52)
6. Amerika Lainnya/ Rest of America	1 383,5 (2,46)	1 365,7 (2,39)	1 246,3 (2,04)	1 567,5 (2,19)	1 794,7 (2,1)
7. Australia & Oceania Lainnya/Rest of Oceania	2 086,0 (3,70)	2 154,9 (3,77)	2 038,5 (3,34)	2 144,7 (3,00)	2 588,5 (3,02)
8. Afrika/Africa	1 181,9 (2,10)	1 235,0 (2,16)	1 250,3 (2,05)	1 359,5 (1,90)	1 669,0 (1,95)
9. Uni Eropa/European Union	7 745,0 (13,75)	7 898,1 (13,82)	7 956,7 (13,03)	9 005,6 (12,58)	10 238,4 (11,95)
(Inggris/United Kingdom)	1 383,1 (2,46)	1 252,3 (2,19)	1 135,9 (1,86)	1 295,1 (1,81)	1 291,5 (1,51)
(Belanda/Netherland)	1 498,2 (2,66)	1 618,4 (2,83)	1 401,6 (2,30)	1 797,6 (2,51)	2 233,5 (2,61)
(Jerman/Germany)	1 297,0 (2,30)	1 269,9 (2,22)	1 416,7 (2,32)	1 654,5 (2,31)	1 781,6 (2,08)
10. Eropa Lainnya/ Rest of Europe	505,8 (0,90)	583,3 (1,02)	773,2 (1,27)	558,3 (0,78)	738,3 (0,86)
Jumlah/Total	56 320,9 (100,00)	57 158,8 (100,00)	61 058,3 (100,00)	71 584,6 (100,00)	85 660,0 (100,00)

Catatan/Note : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap total
Figures in bracket one percentage of total

Sumber/Source : Indikator Ekonomi /Economic Indicators

peningkatan pada tahun 2003 sebesar 7,98 persen atau menjadi US \$ 10 725,5 juta. Nilai ekspor meningkat semakin cepat selama dua tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan 21,46 persen per tahun. Secara nominal, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai US \$ 15 824,9 juta pada tahun 2005. Sementara itu peningkatan kontribusi ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN beranjak dari 16,88 persen pada tahun 2001, menjadi 18,47 persen pada tahun 2005.

Negara-negara Uni Eropa termasuk negara tujuan ekspor Indonesia yang cukup potensial, dimana sebagian besar ekspor Indonesia ditujukan ke Belanda, Jerman dan Inggris. Pada tahun 2002 nilai ekspor ke negara-negara Uni Eropa mengalami peningkatan sebesar 1,98 persen, atau naik dari US \$ 7 745,0 juta menjadi US \$ 7 898,1 juta dengan kontribusi sebesar 13,82 persen. Pada tahun 2003 nilai ekspor Indonesia ke negara Uni Eropa mengalami sedikit kenaikan 0,74 persen menjadi US \$ 7 956,7 juta, tetapi kontribusinya menurun hanya 13,03 persen. Hal ini disebabkan oleh turunnya ekspor ke Belanda dan ke Jerman yang cukup signifikan. Posisi nilai ekspor Indonesia ke negara-negara Uni Eropa pada tahun 2004 dan tahun 2005 masing-masing sebesar US \$ 9 005,6 dan US \$ 10 238,4 juta, atau meningkat rata-rata 13,44 persen per tahun. Sedangkan kontribusi terhadap total nilai ekspornya turun dari 12,58 persen menjadi 11,95 persen.

Pada tahun 2005, nilai ekspor Indonesia ke negara-negara ASEAN mencapai US\$ 15 824,9 juta.

5.2. Perkembangan Impor

Berbagai masalah yang dihadapi oleh pemerintah Indonesia berkaitan dengan kegiatan impor merupakan dampak dari globalisasi yang menuntut adanya keterbukaan ekonomi suatu negara terhadap kegiatan perdagangan antar negara. Untuk mengatasi masalah-masalah yang muncul tersebut pemerintah memberlakukan kebijaksanaan deregulasi baru guna menyelaraskan kebijaksanaan yang saling terkait satu sama lain.

Salah satu masalah yang akan dibenahi oleh pemerintah adalah keterlambatan proses impor barang dari sejak kapal tiba sampai barang keluar dari kawasan pelabuhan (*impor*

clearance). Untuk mempercepat proses kegiatan impor tersebut, langkah yang diambil pemerintah adalah mengadakan kerjasama dengan ASEAN menerapkan sistem perdagangan dan kegiatan ekspor dan impor secara terpadu (*ASEAN Single Window*). Jika ASW ini diterapkan, dapat menjadi terobosan memperbaiki kinerja pelabuhan dan kegiatan ekspor dan impor, sehingga seluruh kegiatan pengeluaran barang dan pengurusan dokumen dilakukan dengan sistem on line sehingga importir cukup mengurus proses pengeluaran barang dan dokumen hanya lewat komputer. Untuk mengimplementasikan ASW, masing-masing negara ASEAN harus membuat Tim Koordinasi Kelancaran Arus Barang Ekspor dan Impor.

Nilai impor tahun 2005 mencapai US \$ 57 700,9 juta atau naik 24,02 persen dibandingkan tahun sebelumnya.

Perkembangan impor Indonesia selama tahun 2001 sampai dengan 2005 menunjukkan peningkatan setiap tahunnya. Pada dua tahun pertama pertumbuhan impor masih terkendali, yaitu hanya meningkat 1,06 persen pada tahun 2002 dan meningkat lagi pada tahun 2003 sebesar 4,03 persen. Namun mulai tahun ketiga terjadi kenaikan impor yang cukup mengejutkan. Nilai impor Indonesia meningkat sebesar 42,93 persen, atau naik dari US \$ 32 550,7 juta menjadi US \$ 46 524,5 juta pada tahun 2004. Kemudian pada tahun 2005 nilai impor Indonesia tumbuh melemah meskipun masih cukup tinggi, menjadi US \$ 57 700,9 juta atau tumbuh sebesar 24,02 persen.

**Tabel 5.5. Nilai Impor Indonesia menurut Migas dan Non Migas
Impor Value Indonesian by Oil & Gas and Non Oil & Gas,
2001 – 2005 (Juta/ Million US \$)**

Impor/Import	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Migas/Oil & Gas	5 471,8	6 525,8	7 610,9	11 732,0	17 457,7
Non Migas/ Non Oil & Gas	25 490,3	24 763,1	24 939,8	34 792,5	40 243,2
Jumlah/Total	30 962,1	31 288,9	32 550,7	46 524,5	57 700,9

Sumber / Source : Indikator Ekonomi / *Economic Indicators*

Perdagangan Luar Negeri

Nilai impor Indonesia di dominasi oleh impor non migas, karena impor non migas sangat berkaitan dengan pertumbuhan investasi dan kegiatan industri di dalam negeri, terutama untuk memenuhi kebutuhan bahan baku industri yang belum dapat di produksi di dalam negeri. Kondisi impor non migas pada tahun 2002 masih dapat dikendalikan, terlihat dari nilainya yang mengalami penurunan dari US \$ 25 490,3 juta pada tahun 2001 menjadi US \$ 24 763,1 juta pada tahun 2002 atau turun 2,85 persen. Demikian juga dengan impor non migas tahun 2003 hanya menunjukkan sedikit kenaikan, yaitu 0,71 persen atau menjadi US \$ 24 939,8 juta. Usaha pemerintah untuk mempertahankan impor non migas supaya pertumbuhannya relatif kecil kandas pada tahun 2004 karena terjadi kenaikan yang cukup tinggi sebesar 39,50 persen atau mencapai US \$ 34 792,5 juta. Pada tahun 2005 impor non migas tetap meningkat, meskipun melemah hanya 15,67 persen. Berbeda dengan nilai nominalnya yang terus meningkat, kontribusi nilai impor non migas terhadap total nilai impor menurun setiap tahunnya, yaitu dari 82,33 persen pada tahun 2001 menjadi 69,74 persen pada tahun 2005.

Untuk memenuhi kebutuhan migas di dalam negeri yang masih kurang jika hanya mengandalkan produksi di dalam negeri, maka Indonesia perlu mengimpor migas. Kontribusi nilai impor migas terhadap total nilai impor Indonesia dari tahun 2001 - 2005 meningkat setiap tahunnya, dari 17,67 persen pada tahun 2001 menjadi 30,26 persen pada tahun 2005. Sebagaimana kontribusinya, nilai impor migas Indonesia dalam periode yang sama juga meningkat setiap tahunnya. Dalam dua tahun pertama (2002-2003), impor migas meningkat rata-rata sebesar 17,94 persen per tahun, atau naik dari US \$ 5 471,8 juta pada tahun 2001 menjadi US \$ 7 610,9 juta pada tahun 2003. Selanjutnya pada tahun 2004-2005 nilai impor migas tumbuh lebih tinggi dibanding tahun-tahun sebelumnya dengan rata-rata pertumbuhan 51,48 persen per tahun, hingga mencapai US \$ 17 457,7 juta pada tahun 2005. Tingginya kenaikan nilai impor migas ini karena pengaruh kenaikan harga minyak dunia yang mencapai US \$ 50 per barelnya. Berbagai usaha dilakukan untuk mengurangi i impor migas ini, diantaranya dilakukan oleh

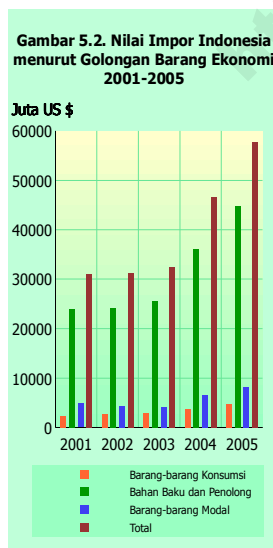
Kontribusi nilai impor migas terhadap total nilai impor meningkat hingga mencapai 30,26 persen pada tahun 2005.

PT. Pertamina yang berencana memangkas impor BBM pada Februari 2006 sampai 55 persen dari kondisi normal, (*Kompas*, 5 Januari 2006). Pengurangan ini dilakukan karena stok BBM di Pertamina masih melimpah, disamping itu konsumsi BBM di dalam negeri berkurang pasca kenaikan harga BBM per 1 Oktober 2005.

5.2.1. Impor Menurut Golongan Barang Ekonomi

Dalam kondisi ekonomi yang masih rentan seperti saat ini, kegiatan industri tetap mendapat perhatian dari pemerintah, khususnya industri pada sektor riil yang menjadi ujung tombak perekonomian Indonesia. Sektor riil harus tumbuh karena dapat diandalkan untuk meningkatkan devisa negara sehingga memberikan sumbangan berarti bagi penguatan keseimbangan sektor eksternal. Apalagi potensi pasar di dalam negeri tergolong besar.

Untuk memenuhi kebutuhan dari sektor industri tersebut Indonesia masih perlu mengimpor barang-barang, terutama bahan baku yang belum dapat diproduksi dan dipenuhi sepenuhnya oleh industri di dalam negeri. Selama periode 2001-2005 impor bahan baku masih mendominasi impor Indonesia, berkisar antara 77 sampai dengan 78 persen terhadap total impor Indonesia. Pada tahun 2001 nilai impor bahan baku tercatat US \$ 23 879,4 juta, naik sebesar 1,46 persen pada tahun 2002 menjadi US \$ 24 227,5 juta. Kemudian meningkat lagi pada tahun 2003 sebesar 5,24 persen, menjadi US \$ 25 496,3 juta. Keadaan ekonomi yang mulai stabil mendorong kegiatan industri di dalam negeri mulai bergairah kembali, sehingga kebutuhan akan bahan baku/penolong semakin meningkat ditandai dengan lonjakan pada tahun 2004 hingga mencapai US \$ 36 204,2 juta atau naik sebesar 42,00 persen. Impor bahan baku meningkat kembali pada tahun 2005 menjadi US \$ 44 792,0 juta atau naik 23,72 persen.



Impor Indonesia menurut barang ekonomi lainnya yang cukup tinggi nilainya adalah barang modal. Impor barang modal selama dua tahun (2002-2003) mengalami kemerosotan rata-rata sebesar 6,84 persen per tahun, demikian juga dengan kontribusinya turun dari 15,60 persen

Perdagangan Luar Negeri

Tabel 5.6 Nilai Impor Indonesia menurut Golongan Barang Ekonomi
Imports Value of Indonesian by Broad Economic Categories,
2001-2005 (Juta/Million US \$)

Tahun Year	Barang konsumsi Consumer goods	Bahan baku Raw materials	Barang modal Capital goods	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	2 251,2	23 879,4	4 831,5	30 962,1
2002	2 650,5	24 227,5	4 410,9	31 288,9
2003	2 862,8	25 496,3	4 191,5	32 550,7
2004	3 786,5	36 204,2	6 533,8	46 524,5
2005	4 620,5	44 792,0	8 288,4	57 700,9

Sumber/Source : Indikator Ekonomi /Economic Indicators

tahun 2001 menjadi 14,10 persen tahun 2002 dan 12,88 persen tahun 2003. Turunnya impor barang modal mengindikasikan berkurangnya investasi asing yang masuk ke Indonesia. Untuk mengantisipasinya adalah dengan jalan memproduksi barang modal di dalam negeri sehingga tidak terlalu terpengaruh pada berkurangnya investasi asing. Namun yang terpenting adalah mengkompensasi penurunan barang modal itu dengan meningkatkan kapasitas produksi. Pada tahun 2004 nilai impor barang modal mengalami lonjakan yang cukup tinggi yaitu sebesar 55,88 persen dibanding tahun sebelumnya, atau meningkat dari US \$ 4 191,6 juta menjadi US \$ 6 533,8 juta. Nilai impor barang modal kembali meningkat menjadi US \$ 8 288,4 juta (26,85 persen) pada tahun 2005, lebih lambat dibandingkan kenaikan di tahun sebelumnya.

Impor barang modal meningkat sebesar 26,85 persen pada tahun 2005 menjadi US \$ 8 288,4 juta.

Impor barang-barang konsumsi selama kurun waktu 2001-2005 menunjukkan peningkatan, dan pola laju pertumbuhannya berfluktuatif. Pada tahun 2002 impor barang-barang konsumsi meningkat 17,74 persen dibanding tahun sebelumnya, dengan nilai impor sebesar US \$ 2 650,5 juta. Tahun 2003 nilai impor barang konsumsi meningkat lagi meskipun hanya 8,01 persen dan puncaknya peningkatan tertinggi terjadi di tahun 2004, yaitu sebesar 32,27 persen dengan nilai impor mencapai US \$ 3 786,5 juta. Pada tahun 2005 impor barang-barang konsumsi meningkat lagi sebesar 22,03 persen.

Jika dilihat menurut golongan barang SITC, ada 2 golongan barang yang menyerap impor terbesar di Indonesia, yaitu mesin dan alat pengangkut (SITC kode 7) dan bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC kode 3). Sampai dengan tahun 2004, impor mesin dan alat pengangkut (SITC kode 7) masih mendominasi impor Indonesia, namun pada tahun 2005 impor bahan bakar, bahan penyemir, dan sebagainya (SITC kode 3) mengambil alih dengan sumbangan sebesar 30,35 persen terhadap total nilai impor, sementara mesin dan alat pengangkut (SITC kode 7) menduduki peringkat kedua sebesar 26,45 persen.

Nilai impor mesin dan alat pengangkut selama tahun 2001 - 2003 sempat mengalami penurunan, namun pada tahun 2004 meningkat drastis sebesar 42,12 persen menjadi US \$ 12 175 juta. Kemudian pada tahun 2005 meningkat

**Tabel 5.7. Nilai Impor Indonesia (CIF) menurut Golongan Barang SITC
Imports Value of Indonesian by Commodity Groups CIF
2001 – 2005 (Juta/Million US \$)**

SITC	Golongan Barang Commodity Groups	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
0	Bahan Makanan & Binatang Hidup <i>Food and Live Animals</i>	2 497	2 852	3 121	3 786	4 012
1	Minuman dan Tembakau <i>Beverages and Tobacco</i>	235	211	168	195	208
2	Bahan Mentah <i>Raw Materials, Inedible</i>	3 179	2 668	2 596	3 506	3 397
3	Bahan Bakar, Bahan Penyemir dsb <i>Fuels, Lubricants etc</i>	5 523	6 558	7 664	11 798	17 512
4	Minyak/lemak Nabati & Hewani <i>Animal & Vegetables Oil</i>	40	53	51	71	73
5	Bahan Kimia/Chemical	5 400	5 276	5 317	7 614	8 076
6	Hasil Industri menurut Bahan <i>Manufactured goods</i>	4 250	4 243	4 159	6 203	7 813
7	Mesin & Alat Pengangkut <i>Machinery & Transport Equipments</i>	9 050	8 606	8 567	12 175	15 262
8	Hasil Industri Lainnya <i>Misc. Manufactured Equipments</i>	779	815	899	1 176	1 344
9	Bahan & Transaksi Khusus Lainnya <i>Commodities & Other Special Transactions</i>	9	7	9	0	4
Jumlah/Total		30 962	31 289	32 551	46 524	57 701

Sumber/Source : Indikator Ekonomi /Economic Indicators

lagi menjadi US \$ 15 262 juta atau meningkat sebesar 25,36 persen. Pada periode yang sama nilai impor golongan barang SITC kode 3(bahan bakar, bahan penyemir dsb) meningkat terus setiap tahunnya dengan rata-rata peningkatan sebesar 34,49 persen per tahun, atau naik dari US \$ 5 523 juta pada tahun 2001 menjadi US \$ 17 512 juta pada tahun 2005.

5.2.2. Impor Menurut Negara Asal

Kebutuhan komoditi Indonesia yang belum dapat dipenuhi di dalam negeri mayoritas diimpor dari negara-negara di Asia terutama negara Jepang dan negara-negara ASEAN, khususnya Singapura. Secara umum impor Indonesia dari negara-negara lain pada tahun 2004 mengalami lonjakan dibanding tahun sebelumnya, terutama dari Muangthai yang naik lebih dari 60 persen. Demikian juga pada tahun 2005 impor dari negara-negara lain meningkat meskipun lebih lambat, kecuali impor dari negara-negara di Afrika dan Eropa lainnya.

Indonesia masih sangat tergantung dengan negara-negara ASEAN, terlihat dari nilai impor yang meningkat setiap tahunnya. Pada tahun 2002 impor dari ASEAN meningkat sebesar 23,90 persen, kemudian meningkat lagi 14,22 persen pada tahun 2003. Pada dua tahun terakhir (2004-2005) impor dari ASEAN meningkat cukup signifikan, rata-rata sekitar 48 persen per tahun atau secara nominal naik dari US \$ 7 729,9 juta pada tahun 2003 menjadi US \$ 17 039,9 juta pada tahun 2005. Seiring kenaikan nilai impor, kontribusi impor dari negara ASEAN juga meningkat setiap tahun, yaitu dari 17,64 persen pada tahun 2001 menjadi 29,53 persen pada tahun 2005, terhadap total nilai impor.

Dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 impor Indonesia dari Jepang terus mengalami penurunan rata-rata 5,04 persen per tahun, atau turun dari US \$ 4 689,5 juta menjadi US \$ 4 228,3 juta. Namun nilai impor dari Jepang pada tahun 2004 langsung naik cukup tinggi menjadi US \$ 6 081,6 juta atau naik 43,83 persen dari tahun sebelumnya, kemudian pada tahun 2005 meningkat kembali sebesar 13,56 persen, menjadi US \$ 6 906,3 juta.

Tabel 5.8. Impor Indonesia menurut Negara Asal
Imports of Indonesian by Country of Origin,
2001-2005 (Juta/Million US \$)

Negara Asal <i>Country of Origin</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. ASEAN	5 462,0 (17,64)	6 767,4 (21,63)	7 729,9 (23,75)	11 494,3 (24,71)	17 039,9 (29,53)
(Muangthai/Thailand)	986,0 (3,18)	1 190,7 (3,81)	1 701,7 (5,23)	2 771,6 (5,96)	3 447,0 (5,97)
(Malaysia)	1 005,5 (3,25)	1 037,4 (3,32)	1 138,2 (3,50)	1 681,9 (3,62)	2 148,5 (3,72)
(Singapura/Singapore)	3 147,1 (10,16)	4 099,6 (13,10)	4 155,1 (12,77)	6 082,8 (13,07)	9 470,7 (16,41)
2. Hongkong	257,3 (0,83)	240,7 (0,77)	222,2 (0,68)	266,7 (0,57)	291,1 (0,50)
3. Jepang/Japan	4 689,5 (15,15)	4 409,3 (14,09)	4 228,3 (13,38)	6 081,6 (13,07)	6 906,3 (11,97)
4. Asia Lainnya/ Rest of Asia	8 567,0 (27,67)	8 382,4 (26,79)	9 102,6 (27,96)	12 466,0 (26,79)	16 198,4 (28,07)
5. Amerika Serikat/ U S A	3 207,5 (10,36)	2 639,9 (8,44)	2 694,8 (8,28)	3 225,4 (6,93)	3 878,9 (6,72)
6. Amerika Lainnya/Rest of America	798,2 (2,58)	940,4 (3,01)	887,8 (2,73)	1 574,1 (3,38)	1 855,3 (3,22)
7. Australia & Oceania Lainnya Australia & Rest of Oceania	2 040,7 (6,59)	1 787,1 (5,71)	1 841,6 (5,66)	2 448,8 (5,26)	2 857,1 (4,95)
8. Afrika/Africa	1 370,8 (4,43)	1 664,3 (5,32)	1 590,5 (4,89)	2 340,7 (5,03)	1 606,6 (2,78)
9. Uni Eropa European Union (Jerman/Germany)	4 043,9 (13,07)	3 871,1 (11,43)	3 554,2 (11,00)	5 252,0 (11,29)	5 826,8 (10,10)
(Jerman/Germany)	1 300,5 (4,20)	1 224,3 (3,91)	1 181,2 (3,62)	1 734,0 (3,73)	1 780,8 (3,09)
10. Eropa Lainnya Rest of Europe	525,1 (1,70)	586,2 (1,87)	698,8 (2,15)	1 374,6 (2,96)	1 240,5 (2,15)
Jumlah/Total	30 962,1 (100,00)	31 288,9 (100,00)	32 550,7 (100,00)	46 524,5 (100,00)	57 700,9 (100,00)

Sumber/Source : Indikator Ekonomi /Economic Indicators

Setelah Singapura dan Jepang, yang merupakan negara asal impor Indonesia terbesar ketiga adalah Amerika Serikat. Nilai impor Indonesia dari Amerika Serikat pada tahun 2001 mencapai US \$ 3 207,5 juta yang turun pada tahun 2002 menjadi US \$ 2 639,9 juta atau turun sebesar 17,70 persen. Perkembangan impor Indonesia dari negara Amerika Serikat pada tahun 2003 mulai terjadi peningkatan meskipun hanya sebesar 2,08 persen. Namun sampai akhir tahun 2005 impor dari negara Amerika Serikat sudah mencapai US \$ 3 878,9

juta, dengan kenaikan rata-rata sekitar 20 persen per tahun. Meskipun nilai nominal impornya cenderung naik tiap tahun, tetapi kontribusi impor dari USA menurun dari 10,36 persen pada tahun 2001 menjadi 6,72 persen pada tahun 2005.

Perkembangan impor Indonesia dari negara-negara Afrika selama kurun waktu 2001-2005 menunjukkan pola yang berfluktuatif setiap tahunnya, baik nilai impor maupun kontribusinya. Nilai impor Indonesia dari negara-negara Afrika pada tahun 2001 tercatat US \$ 1 370,8 juta kemudian berfluktuatif hingga mencapai posisi sebesar US \$ 1 606,6 juta pada tahun 2005. Kontribusi impor dari Afrika sampai tahun 2004 masih bertahan sekitar 5 persen dari total impor Indonesia, namun pada tahun 2005 turun menjadi 2,78 persen di bawah posisi Jerman (3,09 persen).

5.3. Neraca Perdagangan Indonesia

Neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2001-2005 menunjukkan gambaran yang cukup menggembirakan. Secara keseluruhan neraca perdagangan Indonesia tetap pada posisi angka positif atau surplus, baik pada komoditi migas maupun non migas.

Pada tahun 2001 neraca perdagangan Indonesia mencapai surplus sebesar US \$ 25 358,8 juta, meningkat sebesar 2,02 persen menjadi US \$ 25 869,9 juta pada tahun 2002. Neraca perdagangan Indonesia bangkit kembali pada tahun 2003 hingga mencapai surplus US \$ 28 507,6 juta atau meningkat sebesar 10,20 persen dibanding tahun sebelumnya. Nilai ekspor yang cukup tinggi pada tahun 2004 diimbangi dengan nilai impor yang tinggi pula sehingga neraca perdagangan Indonesia di tahun 2004 hanya surplus sebesar US \$ 25 060,1 juta, lebih rendah 12,09 persen di banding tahun 2003. Setahun kemudian neraca perdagangan Indonesia meningkat kembali 11,57 persen menjadi US \$ 27 959,1 juta. Secara rata-rata neraca perdagangan Indonesia tumbuh 2,92 persen per tahun selama lima tahun terakhir.

Neraca perdagangan sektor non migas Indonesia pada tahun 2001 tercatat US \$ 18 194,3 juta. Dua tahun berikutnya

Selama periode 2001-2005, neraca perdagangan Indonesia selalu surplus. Pada tahun 2005, nilai surplusnya US \$ 28 miliar.

**Tabel 5.9. Neraca Perdagangan Indonesia
Indonesian Balance of Trade, 2001-2005
(Juta / Million US \$)**

Tahun Year	Migas Oil & Gas	Non Migas non Oil & Gas	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
2001	7 164,5	18 194,3	25 358,8
2002	5 586,9	20 283,0	25 869,9
2003	6 040,8	22 466,8	28 507,6
2004	3 913,3	21 146,8	25 060,1
2005	1 773,8	26 185,3	27 959,1

Sumber / Source : Indikator Ekonomi / *Economic Indicators*

neraca perdagangan non migas mencapai surplus US \$ 20 283,0 juta (2002), dan surplus sebesar US \$ 22 466,8 juta (2003), dengan rata-rata peningkatan sebesar 11,12 persen per tahun. Pada tahun 2004 neraca perdagangan sektor non migas surplus sebesar US \$ 21 146,8 juta tetapi bila dibandingkan tahun sebelumnya mengalami penurunan sebesar 5,88 persen. Hal ini terjadi karena peningkatan nilai impor lebih tinggi dibanding peningkatan nilai eksportnya. Sampai dengan akhir tahun 2005 posisi neraca perdagangan non migas surplus US \$ 26 185,3 juta, naik sebesar 23,83 persen.

Kondisi neraca perdagangan migas Indonesia selama lima tahun terakhir cenderung menurun. Pada tahun 2002 terjadi penurunan 22,02 persen, atau turun dari US \$ 7 164,5 juta menjadi US \$ 5 586,9 juta. Meskipun sempat naik sebesar 8,12 persen pada tahun 2003, namun pada dua tahun terakhir terjadi penurunan lagi. Penurunan yang terjadi di tahun 2004 sebesar 35,22 persen, atau turun dari menjadi US \$ 6 040,8 juta menjadi US \$ 3 913,3 juta. Neraca perdagangan migas kembali mengalami penurunan yang sangat tajam hingga hanya mencapai US \$ 1 773,8 juta atau turun sebesar 54,67 persen.

MONETER

- Uang Beredar •*
- Nilai Tukar Rupiah •*
- Suku Bunga •*

A large, bold, black number '6' is positioned on the right side of the page. It is set against a vertical teal gradient bar that transitions from a lighter shade at the top to a darker shade at the bottom.

Stabilitas moneter yang cukup terjaga selama tahun 2004, menghadapi tantangan pada tahun 2005. Faktor-faktor eksternal seperti melambungnya harga minyak mentah dunia dan pengetatan moneter global memberi andil yang cukup besar terhadap terganggunya stabilitas moneter yang tercermin pada melemahnya nilai tukar rupiah terhadap dolar AS serta tingginya laju inflasi selama tahun 2005. Guna menghadapi tekanan tersebut Bank Indonesia menerapkan kebijakan moneter yang cenderung ketat (*tight biased*) untuk mempertahankan momentum pemulihan ekonomi.

6.1. Uang Beredar

Kondisi moneter dalam triwulan I tahun 2005 menunjukkan uang kartal bergerak turun sedangkan uang giral bergerak naik searah pertumbuhan M2. Rata-rata per bulan uang kartal dan giral yang diedarkan selama triwulan awal 2005, masing-masing sebesar Rp 99,92 triliun dan Rp 149,78 triliun. Gabungan kartal dan giral, yang menggambarkan dimensi moneter M1, juga memperlihatkan gerakan merayap naik. Stabilitas moneter dalam negeri sedikit terganggu oleh adanya isu kenaikan harga BBM pada akhir triwulan I 2005. Kecuali Februari, selama triwulan ini, inflasi tercatat lebih dari satu persen, bahkan pada Maret inflasi mencapai 1,91 persen. Jika ditelusuri selama setahun lalu, inflasi triwulan I 2004 berkisar antara 0,02 hingga 0,57 persen.

Selama 2005 uang primer tumbuh rata-rata 1,90 persen per bulan.

Meningkatnya kegiatan perekonomian di dunia usaha yang ditandai oleh peningkatan investasi selama triwulan ini mendorong pertumbuhan uang primer walaupun telah terlihat tren peningkatan suku bunga dalam negeri. Selama tahun 2005 secara rata-rata uang primer tumbuh 1,90 persen per bulan. Secara agregat, kuantitas uang beredar masih berada di sekitar target indikatifnya. Besaran M1 misalnya, di awal tahun tercatat sebesar Rp 248,18 triliun, sedangkan untuk M2 sebesar Rp 1.015,87 triliun. Saat itu, komposisi kartal dan giral berkisar sekitar 41 persen dan 59 persen. Seiring dengan tetap kuatnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap perbankan, dua bulan berikutnya terjadi pergeseran komposisi pada giral hingga persinya mendekati 61 persen.

Moneter

Di sisi lain, kondisi pasar uang diwarnai dengan pergeseran portofolio dana, dari produk perbankan ke instrumen dana alternatif yang memiliki nilai pengembalian lebih cepat dan lebih menguntungkan. Walaupun demikian masyarakat masih cenderung memilih melakukan penempatan

**Tabel. 6.1 Perkembangan Uang Beredar dan Uang Primer,
Trend of Money Supply and Reserve Money
2004-2005 (Miliar / Billion Rupiah)**

Akhir Periode	Uang Beredar/Money Supply					Uang Primer/Reserve Money				
	M2					Uang Kartal		Giro	Giro Perusa-	Jumlah Total
	M1		Uang	Jumlah	Uang Kartal yang diedarkan <i>Currency</i>	Kas Bank <i>Cash in Vault</i>	Bank	Perusa- & Perorangan <i>Demand Private Enterprises and Individual Deposits</i>		
	Uang Kartal <i>Currency Outside Banks</i>	Uang Giral <i>Demand Deposits</i>	Jumlah Total <i>Money</i>	Quasi Quasi <i>Money</i>						
	[1]	[2]	[3]	[4]	[5]	[6]	[7]	[8]	[9]	[10]
2004										
Januari	90 619	125 724	216 343	730 934	947 277	90 619	15 182	39 284	1 494	146 579
Februari	86 846	132 187	219 033	716 712	935 745	86 846	14 877	39 334	1 461	142 518
Maret	86 881	132 205	219 086	716 161	935 247	86 881	15 472	38 878	1 585	142 816
April	90 527	124 920	215 447	715 384	930 831	90 527	15 373	38 790	1 651	146 341
Mei	90 650	133 040	223 690	729 271	952 961	90 650	16 131	39 103	1 648	147 532
Juni	97 574	137 152	234 726	741 440	976 166	97 574	15 990	41 010	1 893	156 467
Juli	97 220	140 839	238 059	737 032	975 091	97 187	15 815	60 757	779	174 538
Agustus	96 919	142 040	238 959	741 264	980 223	96 919	16 441	58 568	753	172 681
September	99 505	141 406	240 911	745 895	986 806	99 505	16 571	58 548	727	175 351
Oktober	105 760	141 843	247 603	748 332	995 935	105 760	17 523	61 089	723	185 095
Nopember	104 668	145 553	250 221	750 117	1 000 338	104 668	19 493	60 081	631	184 873
Desember	109 265	144 553	253 818	779 709	1 033 527	109 265	17 630	72 053	498	199 446
2005										
Januari	101 790	146 385	248 175	767 699	1 015 874	101 790	18 166	63 061	730	183 747
Februari	99 375	151 058	250 433	761 711	1 012 144	99 375	17 658	62 260	741	180 034
Maret	98 584	151 908	250 492	770 201	1 020 693	98 584	17 792	67 798	704	184 878
April	101 525	144 771	246 296	797 957	1 044 253	101 525	17 005	63 603	730	182 863
Mei	101 211	151 289	252 500	793 692	1 046 192	101 211	18 233	69 176	612	189 232
Juni	106 125	161 510	267 635	806 111	1 073 746	106 125	18 302	73 446	554	198 427
Juli	109 772	157 098	266 870	821 506	1 088 376	109 773	18 410	65 098	515	193 796
Agustus	109 126	165 715	274 841	841 033	1 115 874	109 126	19 614	65 782	486	195 008
September	114 998	158 956	273 954	876 497	1 150 451	114 998	19 873	89 079	464	224 414
Oktober	134 245	152 470	286 715	879 026	1 165 741	134 245	29 987	92 257	424	256 913
November	114 130	162 599	276 729	891 538	1 168 267	114 130	20 807	90 714	457	226 108
Desember	124 316	157 589	281 905	921 310	1 203 215	126 133	20 553	94 531	381	241 598

Sumber : Bank Indonesia

dananya dalam sistem perbankan. Tendensi ini membawa efek meningkatnya penciptaan uang di sistem perbankan tadi. Selama triwulan I tahun 2005 dimensi M2 cenderung naik meskipun pada bulan Februari besaran tadi sempat berkontraksi menjadi Rp 1.012,14 triliun. Pada bulan Maret besaran M2 meningkat menjadi Rp 1.020,69 triliun.

Sementara untuk M1 yang umumnya banyak menggambarkan kebutuhan transaksi masyarakat, selama Februari 2005 mencapai angka Rp 250,43 triliun. Di bulan berikutnya, M1 tetap tak jauh dari angka tersebut (Rp 250,49 triliun). Hal ini berarti besaran moneter tadi hanya naik sekitar Rp 0,06 triliun. Pada triwulan ini penyerapan likuiditas yang terjadi cukup besar tetapi dengan kecenderungan yang menurun. Gambaran ini tampak dari berkurangnya dana yang digunakan untuk operasi pasar terbuka (OPT) guna menyerap likuiditas di masyarakat. Seiring waktu berjalan, keperluan untuk piranti OPT mencapai Rp 153,78 triliun di awal tahun 2005. Namun hingga akhir triwulan I tahun 2005, dana OPT turun menjadi Rp 130,78 triliun.

Pada triwulan II tahun 2005 kondisi moneter masih mencatat adanya peningkatan jumlah uang primer. Uang primer pada triwulan ini mencapai Rp 190,17 triliun. Jika dibanding dengan triwulan sebelumnya, uang primer naik Rp 7,29 triliun atau tumbuh sekitar 3,98 persen. Kenaikan ini disebabkan oleh peningkatan yang terjadi pada uang kartal yang diedarkan di masyarakat dan bertambahnya giro bank mendominasi penurunan yang cukup tinggi pada giro perusahaan dan giro perorangan.

Meningkatnya kegiatan perekonomian nasional diiringi dengan laju inflasi mendorong relatif tingginya pertumbuhan uang primer. Jika dibandingkan dengan bulan sebelumnya, di akhir triwulan II tahun 2005 ini uang primer naik sekitar 4,86 persen. Kenaikan uang primer hingga menjadi Rp 198,43 triliun didorong oleh semua elemen yang tergabung didalamnya, kecuali untuk elemen yang berbentuk giro perusahaan dan giro perorangan yang turun sebesar 9,48 persen.

Jika dilihat dari sisi permintaan, triwulan II ini diwarnai dengan terjadinya permintaan masyarakat terhadap kartal yang cukup tinggi. Permintaan uang di triwulan ini kurang lebih membengkak Rp 4,92 triliun hingga mencapai Rp 106,13 triliun. Permintaan ini dirangsang oleh kebutuhan masyarakat untuk keperluan sekolah, seperti persediaan dana menjelang tahun ajaran baru dan liburan sekolah. Uang kartal yang terdiri dari pecahan uang kertas dan uang logam, selama triwulan II tahun 2005 ini, berada pada porsi 40 hingga 41 persen untuk membentuk uang dalam arti sempit (*narrow money*). Sementara sisanya merupakan komponen giral dengan porsi 59 hingga 60 persen.

Selama triwulan II tahun 2005 jumlah uang beredar (M1) naik 2,31 dibanding triwulan sebelumnya.

Selama triwulan II tahun 2005, uang beredar yang diwakili oleh komponen M1, kurang lebih mencapai Rp 255,48 triliun. Jika dibandingkan dengan triwulan sebelumnya, besaran moneter ini naik sekitar 2,31 persen. Ini berarti M1 telah bertambah Rp 5,78 triliun dari jumlah yang diedarkan di masyarakat dari triwulan sebelumnya.

Sementara untuk M2, di triwulan yang sama berada pada posisi Rp 1.054,73 triliun, atau naik cukup tinggi sebesar Rp 38,49 triliun. Kenaikan tersebut disebabkan oleh meningkatnya semua unsur M2 seperti M1 dan uang kuasi. Namun untuk uang kuasi, kenaikannya lebih tinggi daripada kenaikan M1, yaitu 4,27 persen berbanding 2,31 persen. Selama periode ini, kuasi dalam bentuk rupiah dan valas (dolar maupun mata uang asing lainnya), berada pada porsi sekitar 75 – 76 persen terhadap M2. Untuk kuasi itu sendiri, porsi terbesarnya adalah dalam bentuk rupiah yang bergerak di sekitar 61 hingga 62 persen .

Dari data yang ada, faktor-faktor yang menentukan uang beredar (aktiva luar negeri bersih, tagihan bersih pemerintah pusat, tagihan pada lembaga dan BUMN, serta tagihan pada swasta dan perorangan), semuanya mengalami kenaikan pada triwulan II tahun 2005 kecuali tagihan bersih kepada pemerintah pusat. Dibanding tahun sebelumnya, tagihan bersih kepada pemerintah pusat pada triwulan yang sama justru berlawanan arah, naik sekitar 1,29 persen. Faktor ini

Tabel 6.2. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Uang Beredar
Affecting Factor of Money Supply, 2004 - 2005
(Miliar/Billion Rupiah)

Tahun Year	Bulan Month	Aktiva Luar Negeri Bersih Net Foreign Assets	Tagihan Bersih pada Peme- rintah Pusat Net Claims on Central Government	Tagihan pada Lembaga dan BUMN Claims on Official Entities and State Enterprises	Tagihan pada Perusahaan Swasta dan Perorangan Claims on Private Enterprises and Individuals	Lainnya Bersih Net Other Items
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2004	Januari	269 713	486 229	21 518	440 310	- 270 493
	Februari	272 244	475 003	21 591	443 522	- 276 615
	Maret	275 819	443 440	22 803	454 703	- 261 518
	April	270 734	441 646	25 228	461 843	- 268 620
	Mei	302 573	442 009	26 252	478 647	- 296 520
	Juni	280 070	468 907	27 806	522 160	- 323 777
	Juli	265 103	476 648	26 281	524 851	- 317 792
	Agustus	264 686	474 424	25 996	541 563	- 326 446
	September	258 684	476 451	25 261	551 562	- 325 152
	Oktober	259 478	479 178	26 481	563 319	- 332 521
	November	260 328	479 344	25 919	568 832	- 334 085
	Desember	263 647	498 019	26 919	588 885	- 343 943
2005	Januari	260 068	488 807	25 321	587 531	- 345 853
	Februari	264 375	474 725	26 426	597 115	- 350 497
	Maret	268 482	456 274	28 527	612 463	- 344 783
	April	283 849	448 465	27 843	625 946	- 341 850
	Mei	256 245	453 507	30 708	643 866	- 338 134
	Juni	256 058	468 004	28 237	659 129	- 337 682
	Juli	255 733	478 469	27 678	671 730	- 345 234
	Agustus	269 931	477 519	28 752	694 151	- 354 479
	September	280 369	488 483	29 805	708 018	- 356 224
	Oktober	297 962	481 615	28 458	714 484	- 356 778
	November	307 190	476 217	27 700	714 220	- 357 060
	Desember	313 082	498 901	28 059	710 783	- 347 610

Sumber: Bank Indonesia

merupakan komponen terbesar kedua dari uang beredar setelah tagihan kepada lembaga dan BUMN.

Sampai akhir triwulan II tahun 2005, posisi M2 mencapai Rp 1.073,75 triliun, berarti ada kenaikan sekitar Rp 27,55 triliun dibanding bulan sebelumnya. Kenaikan M2 digerakkan oleh semua komponennya, kecuali dua komponen lain yang justru

berlawanan arah. Komponen-komponen ini adalah aktiva luar negeri bersih dan tagihan bentuk lainnya dalam tagihan pada lembaga dan BUMN, yang masing-masing turun sekitar 0,07 persen dan 8,05 persen dari bulan sebelumnya.

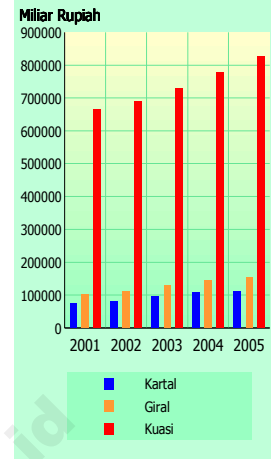
Memasuki triwulan III tahun 2005, kondisi moneter masih menunjukkan kecenderungan dimensi moneter yang meningkat guna mengakomodasi tekanan depresiatif terhadap rupiah yang berdampak pada inflasi. Bergulirnya roda perekonomian nasional sampai pada triwulan ini tetap disertai dengan inflasi pada level moderat. Di awal triwulan ini, inflasi tercatat mencapai 0,78 persen. Level harga menaik antara 0,04 persen untuk transportasi dan komunikasi, hingga 2,07 persen untuk kelompok pengeluaran bidang pendidikan, rekreasi dan olah raga. Terangkatnya harga-harga selama periode ini sangat beralasan, yakni berbarengan dengan peningkatan permintaan masyarakat.

Sebagai respon terhadap permintaan tersebut, penciptaan uang primer tetap tinggi. Rata-rata peredaran uang primer per bulan di triwulan III tahun 2005 sebesar Rp 204,41 triliun (naik 7,48 persen dibandingkan triwulan sebelumnya). Elemen yang mendorong kenaikan uang primer adalah peredaran kartal, kas bank, dan giro bank. Hingga akhir triwulan, uang primer berada di posisi Rp 224,41 triliun.

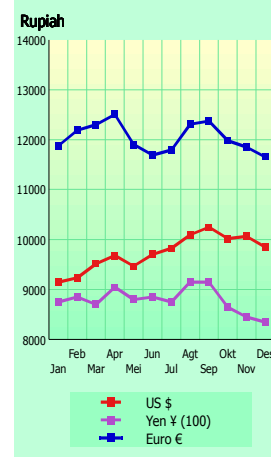
Untuk dimensi moneter lain seperti M1 dan M2, rata-rata per bulan masing-masing Rp 271,89 triliun dan Rp 1.118,23 triliun. Dua dimensi moneter ini meningkat secara bersama-sama. Ini terlihat dari rasio antara M1 dan M2 yang relatif tidak berubah selama triwulan III 2005, yaitu sekitar 24 persen.

Rata-rata uang primer pada triwulan akhir 2005, mencapai Rp 241,54 triliun, lebih tinggi 18,17 persen dibanding triwulan sebelumnya yang hanya mencapai Rp 204,41 triliun. Selama triwulan ini uang primer tercatat dua kali mengalami kenaikan, yaitu pada Oktober dan Desember. Pada Oktober 2005, uang primer sebesar Rp 256,91 triliun atau naik 14,48 persen. Gerakan ini memperlihatkan kebutuhan uang primer masyarakat naik hingga Rp 32,50 triliun dari bulan sebelumnya. Sedangkan pada akhir tahun 2005 uang primer

Gambar 6.1. Jumlah Uang Beredar 2001-2005



Gambar 6.2. Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Asing, 2005



Pada Desember 2005, uang primer meningkat di posisi Rp 241,60 triliun, seiring dengan bertambahnya keperluan masyarakat yang diwarnai beberapa hari besar penting.

berada di posisi Rp 241,60 triliun. Peningkatan ini seiring dengan bertambahnya keperluan masyarakat di akhir tahun yang banyak diwarnai beberapa peringatan hari besar penting. Pada akhir tahun ini, uang primer yang terdiri dari uang dalam bentuk kartal yang diedarkan, giro bank dan giro perusahaan atau perorangan kembali naik 6,85 persen (Rp 15,49 triliun). Kenaikan ini diyakini sebagai pola musiman, sejalan dengan semakin dekatnya perayaan hari-hari besar keagamaan tersebut. Sementara triwulan IV ini juga diwarnai dengan terjadinya penurunan uang primer yang cukup signifikan sebesar 11,99 persen pada bulan kedua. Penyusutan disebabkan oleh penurunan di semua komponennya kecuali untuk giro perusahaan dan giro perorangan. Seperti dapat dilihat, untuk komponen uang kartal dan kas bank masing-masing turun 14,98 persen dan 30,61 persen. Sedangkan untuk giro bank hanya turun 1,67 persen.

Pada Oktober 2005, besaran M1 dan M2 ada di posisi Rp 286,72 triliun dan Rp 1.165,74 triliun, atau masing-masing tumbuh 4,66 persen dan 1,33 persen dari posisi September 2005. Untuk M1, komponen kartal meningkat 16,74 persen, sedangkan komponen giral turun 4,08 persen. Sementara M2 mengalami kenaikan karena komponen kuasi juga tumbuh positif sebesar 0,29 persen. Uang beredar M1 dan M2 pada November 2005 masing-masing tumbuh -3,48 persen dan 0,22 persen. Posisi ini menempatkan dua besaran moneter tadi pada level Rp 276,73 triliun dan Rp 1.168,27 triliun. Pertumbuhan besaran M1 yang negatif mengakibatkan rasio M1 terhadap M2 juga mengalami penurunan, mencerminkan adanya penurunan besarnya permintaan di masyarakat.

Selama triwulan IV, komposisi M1 terhadap uang beredar berkisar antara 23 hingga 24 persen. Dibanding triwulan yang sama tahun lalu, dua besaran moneter ini naik 12,47 persen dan 16,75 persen. Hal ini mengindikasikan adanya kenaikan pola transaksi yang dilakukan masyarakat di akhir tahun.

6.2. Nilai Tukar Rupiah

Mengawali tahun 2005 nilai tukar rupiah menurut hasil survei yang dilakukan BPS di pasaran Jakarta, cenderung

mengalami tekanan. Jika dibandingkan dengan beberapa bulan di tahun sebelumnya, kurs tampak jauh lebih lemah. Hasilnya, pergerakan dari bulan ke bulan selama triwulan I tahun 2005 memperlihatkan adanya depresiasi yang kontinyu. Seperti awal tahun ini, nilai tukar rupiah sudah mencapai level psikologis Rp 9.215,- per dolar AS. Sementara dua bulan selanjutnya, rupiah terdepresiasi pada posisi Rp 9.239,- per dolar AS di Februari dan terus berlanjut sampai Maret pada level Rp 9.382,- per dolar AS. Pergerakan rupiah per minggu juga menunjukkan kecenderungan yang sama walaupun sempat mengalami penguatan di minggu terakhir Januari 2005. Rupiah berada pada level Rp 9.301,- per dolar AS di minggu pertama, kemudian menguat 152 poin ke posisi Rp 9.149,- per dolar AS di minggu kelima bulan yang sama. Sayangnya apresiasi rupiah tidak berlanjut ke minggu-minggu berikutnya, dan kembali merosot pada posisi lebih jauh.

Nilai tukar rupiah sepanjang tahun 2005 mengalami tekanan depresiatif.

Memasuki triwulan II tahun 2005, depresiasi rupiah tetap berlanjut. Seperti terlihat pada April 2005, rupiah berada di level Rp 9.682,- per dolar AS di minggu terakhir. Di bulan berikutnya, kurs sedikit membaik dan berada pada level Rp 9.467,- per dolar AS. Mengakhiri triwulan II ini, rupiah kembali terperosok hingga ke posisi Rp 9.705,- per dolar AS di minggu terakhir Juni 2005. Faktor eksternal yang mendorong depresiasi rupiah pada periode ini adalah melambungnya harga minyak dunia efek serta penguatan dolar AS berkaitan dengan ekspektasi kenaikan suku bunga bank sentral Amerika Serikat (*the Fed*).

Pada triwulan berikutnya tekanan terhadap rupiah semakin meningkat seiring dengan dinaikkannya suku bunga bank sentral Amerika Serikat (*the Fed*), terus meningkatnya harga minyak dunia, dan belum adanya repatriasi hasil ekspor. Akibatnya, selama triwulan III tahun 2005, nilai tukar rupiah terus terdepresiasi mulai dari Rp 9.819,- per dolar AS pada minggu pertama Juli hingga mencapai Rp 10.250,- per dolar AS pada minggu terakhir bulan September.

Pada triwulan IV tahun 2005 nilai tukar rupiah masih cenderung melemah. Pada minggu terakhir bulan Oktober

Tabel. 6.3 Perkembangan Nilai Tukar Mata Uang Asing terhadap Rupiah di Pasaran Jakarta
Trend of Foreign Exchange Rate in Jakarta Market 2004 - 2005

Periode / Period			U.S. \$	Yen – (100)	Euro •
(1)			(2)	(3)	(4)
2004	Januari	IV	8 417	79,43	...
	Februari	IV	8 439	77,83	...
	Maret	V	8 586	81,41	
	April	IV	8 631	79,06	10 275
	Mei	IV	9 290	83,00	...
	Juni	V	9 406	86,50	11 376
	Juli	IV	9 104	82,00	10 983
	Agustus	IV	9 257	83,50	11 289
	September	V	9 189	82,50	11 322
	Oktober	IV	9 099	84,50	11 582
	November	IV	8 994	86,50	11 756
	Desember	V	9 361	89,50	12 645
2005	Januari	IV	9 149	87,50	11 881
	Februari	IV	9 235	88,50	12 188
	Maret	V	9 518	87,00	12 301
	April	IV	9 682	90,50	12 505
	Mei	IV	9 467	88,00	11 906
	Juni	I	9 518	87,50	11 750
		II	9 543	89,50	11 740
		III	9 605	87,50	11 577
		IV	9 649	88,50	11 732
		V	9 705	88,50	11 693
	Juli	I	9 819	87,50	11 696
		II	9 770	87,50	11 904
		III	9 823	86,50	11 852
		IV	9 826	87,50	11 795
	Agustus	I	9 756	87,50	11 849
		II	9 791	87,50	12 082
		III	10 097	91,50	12 308
		IV	10 097	91,50	12 308
	September	I	10 091	91,00	12 430
		II	10 034	90,50	12 334
		III	10 222	91,50	12 385
		IV	10 250	91,50	12 376
	Oktober	I	9 985	85,50	11 838
		II	10 052	90,50	12 302
		III	10 060	86,50	12 045
		IV	10 020	86,44	11 977
	November	I	-	-	-
		II	10 027	86,00	11 791
		III	9 982	85,00	11 780
		IV	10 005	84,50	11 758
		V	10 067	84,50	11 852
	Desember	I	9 894	81,50	11 640
		II	9 779	81,50	11 704
		III	9 871	84,50	11 726
		IV	9 850	83,50	11 655

Sumber : Indikator Ekonomi, BPS

nilai tukar rupiah tercatat sebesar Rp 10.020,- per dolar AS. Satu bulan kemudian, yaitu minggu terakhir bulan Nopember rupiah kembali terdepresiasi menjadi Rp 10.067,- per dolar AS. Secara fundamental, permintaan valuta asing dinilai cukup tinggi, terutama karena adanya permintaan yang tinggi dari pihak korporasi yang belum sepenuhnya dapat diimbangi oleh sisi penyediaannya.

Pada akhir triwulan IV tahun 2005, kurs rupiah belum memperlihatkan adanya perbaikan yang berarti. Dari data *point to point*, rupiah berada pada posisi Rp 9.850,- per dolar AS (minggu terakhir), yaitu terapresiasi hanya 0,44 persen dari bulan sebelumnya. Transaksi menggunakan valuta asing oleh pelaku bisnis asing sebenarnya sudah cukup menjadi faktor yang dapat menempatkan rupiah ke posisi yang lebih baik. Namun, ternyata penyerapan valuta asing untuk perdagangan luar negeri jauh lebih besar sehingga menyebabkan sulitnya mendapatkan valuta asing sebagai alat transaksi perdagangan. Faktor lain yang ikut menekan rupiah adalah dinaikkannya harga BBM oleh pemerintah pada awal triwulan ini sehingga menyebabkan inflasi yang sangat tinggi di bulan Oktober sebesar 8,70 persen.

6.3. Suku Bunga

Kecenderungan peningkatan suku bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) telah terjadi sejak awal triwulan I tahun 2005. Kenaikan suku bunga SBI ini terkait dengan upaya otoritas moneter mengendalikan inflasi akibat pelemahan nilai tukar rupiah, permintaan dalam negeri, dan ekspektasi inflasi yang meningkat. Dalam upaya tersebut suku bunga SBI dinaikkan sebagai langkah untuk menyerap kelebihan likuiditas perbankan.

Pada triwulan I tahun 2005, suku bunga SBI 1 bulan berada pada posisi 7,44 persen. Ini berarti naik satu *basis points (bps)* dari triwulan sebelumnya. Di sisi lain, SBI 3 bulan naik 2 *bps* ke level 7,31 persen. Kecenderungan terus meningkatnya suku bunga FASBI, dibarengi dengan akses likuiditas di pasar mendorong suku bunga khususnya Pasar Uang antar Bank (PUAB) dengan tempo 1 hari (*overnight*) ikut

Tekanan depresiatif terhadap rupiah yang terus menerus sepanjang tahun 2005 mendorong kenaikan tingkat suku bunga instrumen moneter dan berdampak negatif pada pemberian kredit oleh perbankan.

terdorong naik sebanyak 143 bps ke level 6,22 persen pada transaksi pagi hari.

Untuk mengakomodasi terdepresiasinya rupiah hingga triwulan II 2005, Bank Indonesia menaikkan suku bunga instrumen moneter. Seperti terlihat pada suku bunga SBI jangka waktu 1 bulan dan 3 bulan, secara bertahap masing-masing dinaikkan menjadi 7,70 persen dan 7,51 persen selama April 2005. Hingga akhir triwulan II tahun 2005, suku bunga SBI terus dinaikkan menjadi 8,25 persen untuk SBI 1 bulan

Tabel 6.4. Suku Bunga Domestik
Domestic Interest Rate
2004 - 2005

Periode <i>Period</i>	Suku Bunga / <i>Interest Rate</i>				
	Pasar uang Antar Bank		Sertifikat Bank Indonesia		
	<i>Interbank Call Money</i>		<i>Bank Indonesia Certificate</i>		
	1 Hari <i>Overnight</i>	Keseluruhan <i>All Maturities</i>	1 Bulan <i>1 Month</i>	3 Bulan <i>3 Month</i>	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
2004	Januari	8,07	8,08	7,86	8,15
	Februari	7,61	7,60	7,70	7,70
	Maret	7,33	7,34	7,42	7,33
	April	7,17	7,19	7,33	7,25
	Mei	7,08	7,11	7,32	7,24
	Juni	7,03	7,05	7,34	7,25
	Juli	6,82	6,87	7,36	7,29
	Agustus	6,58	6,70	7,37	7,31
	September	6,65	6,79	7,39	7,31
	Oktober	6,83	6,88	7,41	7,30
	November	6,42	6,52	7,41	7,30
	Desember	4,79	5,05	7,43	7,29
2005	Januari	4,86	5,04	7,42	7,30
	Februari	4,68	4,98	7,43	7,27
	Maret	6,22	6,42	7,44	7,31
	April	6,34	6,50	7,70	7,51
	Mei	6,55	6,79	7,95	7,81
	Juni	7,83	7,30	8,25	8,05
	Juli	5,27	6,05	8,49	8,45
	Agustus	9,12	8,57	9,51	9,25
	September	6,18	8,68	10,00	9,25
	Oktober	8,31	9,12	11,00	12,09
	November	7,85	8,94	12,25	12,83
	Desember	9,36	10,18	12,75	12,83

Sumber : Bank Indonesia

dan 8,05 persen untuk SBI 3 bulan. Kenaikan suku bunga SBI yang sangat moderat ini berdampak pada pasar uang antara bank (PUAB). Di akhir triwulan ini suku bunga PUAB dengan tempo 1 hari (*overnight*) mencapai 7,83 persen atau naik 161 bps dari triwulan sebelumnya.

Seiring dengan fokus kebijakan menjaga stabilitas moneter, dalam tekanan yang terus berlangsung hingga triwulan III tahun 2005, suku bunga instrumen moneter kembali dinaikkan. SBI 1 bulan dan 3 bulan, masing-masing meningkat 24 *bps* dan 40 *bps* pada Juli 2005. Pada bulan ini SBI 1 bulan berada di level 8,49 persen, sementara untuk SBI 3 bulan di level 8,45 persen. Peningkatan suku bunga SBI tampaknya berdampak negatif terhadap suku bunga PUAB 1 hari. Pada periode yang sama, suku bunga PUAB 1 hari berada di posisi 5,27 persen, yang berarti turun 256 *bps* dari bulan sebelumnya. Hingga akhir triwulan III-2005, suku bunga SBI berada pada posisi 10,00 persen untuk periode 1 bulan dan 9,25 persen untuk periode 3 bulan.

Mengakhiri tahun 2005, suku bunga SBI 1 bulan meningkat 50 bps menjadi 12,75 persen.

Perkembangan suku bunga SBI selama triwulan IV tahun 2005 tetap memperlihatkan adanya peningkatan. Kenaikan suku bunga SBI per bulan selama triwulan ini dilakukan dengan tingkatan yang cukup tinggi untuk disesuaikan dengan *BI Rate* sebagai acuan.

Mencapai bulan Oktober 2005, instrumen moneter bergerak naik ke posisi 11,00 persen, atau lebih tinggi 100 *bps* dari posisi September. Di sisi lain, pada saat yang bersamaan SBI 3 bulan naik lebih tinggi yaitu 284 *bps* hingga mencapai 12,09 persen. Instrumen moneter tampaknya tetap mengindikasikan kecenderungan yang sama. Suku bunga SBI baik untuk 1 bulan maupun 3 bulan pada November 2005 dinaikkan lagi menjadi 12,25 persen dan 12,83 persen.

Mengakhiri tahun 2005, suku bunga SBI 1 bulan kembali menampakkan gejala-gejala peningkatan. Pada bulan terakhir triwulan IV, suku bunga SBI 1 bulan naik 50 *bps* menjadi 12,75 persen atau sama dengan suku bunga target - *BI Rate*. Sementara itu, suku bunga SBI 3 bulan bertahan pada posisi yang sama dengan bulan sebelumnya.

INVESTASI DAN PERDAGANGAN SAHAM

- Penanaman Modal Dalam Negeri •*
- Penanaman Modal Asing •*
- Bursa Efek Jakarta dan Surabaya •*

7

Penanaman modal atau investasi dalam suatu perekonomian sangat diperlukan baik untuk menunjang pertumbuhan ekonomi maupun perluasan tenaga kerja. Oleh karena itu pemerintah melakukan upaya secara intensif untuk menarik investor menanamkan modalnya di Indonesia antara lain dengan mempertahankan stabilitas ekonomi. Stabilitas ekonomi merupakan salah satu prasyarat untuk menggerakkan roda perekonomian agar pelaku ekonomi merasa aman dan tentram dalam melakukan aktivitasnya.

Kebijaksanaan tentang rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) ditetapkan oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 6 tahun 1968, kemudian disempurnakan dengan diberlakukannya Undang-Undang No.12 Tahun 1970. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas modal sendiri dan modal pinjaman. Jumlah kumulatif rencana PMDN adalah jumlah seluruh rencana PMDN yang disetujui pemerintah sejak tahun 1968 dengan memperhitungkan pembatalan, perluasan, perubahan, penggabungan, pencabutan, dan pengalihan status dari PMDN ke PMA atau sebaliknya.

PMDN Januari-Desember 2005 yang disetujui pemerintah mencapai Rp 50 577,4 miliar atau naik sebesar 37,63 persen dari PMDN tahun 2004.

Sedangkan kebijaksanaan tentang PMA yang disetujui pemerintah diatur dalam Undang-Undang No.1 tahun 1967 tentang PMA, kemudian disempurnakan dengan berlakunya Undang-Undang No.11 tahun 1970. Rencana PMA yang disetujui pemerintah adalah nilai investasi proyek baru, perluasan, dan alih status, yang terdiri atas saham peserta Indonesia, saham peserta asing, dan modal pinjaman.

7.1. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)

Dalam lima tahun terakhir nilai total PMDN yang disetujui pemerintah mengalami fluktuasi setiap tahunnya, dengan penurunan tertinggi terjadi pada tahun 2002 yaitu 56,94 persen, dimana dari nilai sebesar Rp 58 674,0 miliar pada tahun 2001 turun menjadi Rp 25 262,3 miliar pada tahun 2002. Tetapi sebaliknya di tahun 2003 nilai total investasi PMDN yang disetujui pemerintah mengalami kenaikan dengan nilai investasi Rp 48 484,8 miliar atau naik 91,93 persen

Investasi dan Perdagangan Saham

dibandingkan tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2004 total nilai investasi dari PMDN yang disetujui pemerintah kembali mengalami penurunan yaitu hanya mencapai RP 36 747,6 miliar atau turun 24,21 persen. Posisinya sampai akhir tahun 2005 nilai total PMDN kembali mengalami kenaikan walaupun nilai investasinya masih dibawah tahun 2001 yaitu hanya mencapai Rp 50 577,4 miliar atau naik 37,63 persen.

Rencana PMDN yang disetujui pemerintah bila dilihat menurut sektor menunjukkan bahwa sektor industri menjadi primadona bagi para pemodal untuk menanamkan modalnya. Sekalipun nilai investasi sektor tersebut berfluktuasi namun setiap tahun masih tetap menempati urutan pertama. Oleh karena itu sebagian besar dana pembangunan oleh pemerintah dialokasikan kepada sektor tersebut. Nilai investasi

Tabel 7.1. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah Menurut Sektor, Tahun 2001 – 2005 (Miliar rupiah)
Approved Domestic Investment Projects by Sector, 2001 - 2005 (Billions of Rupiahs)

Sektor / Sector	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan <i>Agriculture, Forestry, & Fisheries</i>	1 378,1 (2,35)	1 453,7 (5,75)	1 929,1 (3,98)	1 847,9 (5,03)	4 494,1 (8,89)
Pertambangan/ <i>Mining</i>	1 198,2 (2,04)	786,7 (3,11)	752,8 (1,55)	662,4 (1,80)	982,3 (1,94)
Industri/ <i>Manufacturing</i>	43 966,6 (74,93)	15 853,5 (62,76)	40 442,7 (83,41)	20 631,6 (56,15)	26 807,9 (53,00)
Angkutan/ <i>Transportation</i>	1 489,0 (2,54)	3 117,7 (12,34)	2 022,0 (4,17)	1 885,1 (5,13)	2 375,1 (4,70)
Listrik, Perdagangan, dan Jasa <i>Electricity, Trade, and Services</i>	1 635,2 (2,79)	1 612,6 (6,38)	633,4 (1,31)	9 695,4 (26,38)	10 330,4 (20,42)
Lainnya/ <i>Others</i>	9 006,9 (15,35)	2 438,1 (9,65)	2 704,8 (5,58)	2 025,2 (5,51)	5 587,6 (11,05)
Jumlah/ <i>Total</i>	58 674,0 (100,00)	25 262,3 (100,00)	48 484,8 (100,00)	36 747,6 (100,00)	50 577,4 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMDN
Figure in parantheses are percentage of total domestic Investment

Sumber : BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Februari 2006
Indonesian Financial Statistics, February 2006

yang terserap di sektor industri mencapai puncaknya pada tahun 2001 dengan nilai investasi Rp 43 966,6 milyar. Pada tahun 2002 nilai investasi sektor industri hanya menyerap Rp 15 855,5 miliar atau turun hingga 63,94 persen dan kembali mengalami kenaikan di tahun 2003 walaupun nilainya masih dibawah tahun 2001 dengan nilai investasi mencapai Rp 40 442,7 miliar. Pada tahun 2004 investasi di sektor industri kembali mengalami penurunan hingga 48,98 persen atau hanya menyerap nilai sebesar Rp 20 631,6 miliar.

Sampai akhir tahun 2005, PMDN yang disetujui pemerintah mengalami kenaikan di semua sektor.

Sektor yang cukup diminati atau yang menempati urutan kedua setelah industri setiap tahun selalu berubah. Pada tahun 2001 posisi ke dua ditempati oleh sektor lainnya (merupakan gabungan dari sektor bangunan, perhotelan, perumahan dan perkantoran) dengan nilai investasi sebesar Rp 9 006,9 miliar atau menyumbang sebesar 15,35 persen dari total nilai PMDN. Namun pada tahun 2002 sektor lainnya mengalami penurunan 72,93 persen dengan nilai investasi hanya sebesar Rp 2 438,1 miliar sehingga posisi ke dua digantikan oleh sektor angkutan dengan nilai investasi sebesar Rp 3 117,7 miliar. Pada tahun 2004 posisi ke dua ditempati oleh sektor listrik, perdagangan dan jasa dengan nilai investasi sebesar Rp 9 695,4 miliar atau menyumbang sekitar 26,38 persen. Investasi sektor ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali dibandingkan tahun sebelumnya.

Posisi nilai investasi dari masing-masing sektor sampai akhir tahun 2005 mengalami kenaikan dari tahun sebelumnya. Rencana PMDN yang disetujui pemerintah untuk sektor industri mencapai Rp 26 807,9 miliar atau naik 29,94 persen, dengan nilai kontribusi sekitar 53,00 persen dari total PMDN. Kemudian diikuti berturut-turut oleh sektor listrik, perdagangan dan jasa sebesar Rp 10 330,4 miliar atau naik 6,55 persen, sektor lainnya Rp 5 587,6 miliar atau naik 175,90 persen, sektor pertanian Rp 4 494,1 miliar atau naik 143,20 persen, sektor angkutan Rp 2 375,1 miliar atau naik 25,99 persen, dan urutan terakhir sektor pertambangan Rp 982,3 miliar atau naik 48,29 persen. Kontribusi sektor pengangkutan dan sektor pertambangan masih dibawah 5 persen terhadap total PMDN. Sektor pertanian menyumbang 8,89 persen terhadap

Investasi dan Perdagangan Saham

Tabel 7.2. Rencana Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, Tahun 2001 - 2005 (Miliar rupiah)
Approved Domestic Investment Projects by Island, 2001 - 2005 (Billions of Rupiahs)

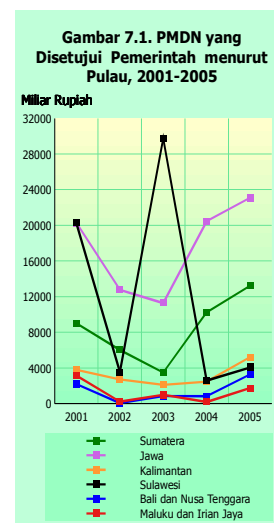
Tahun/ Year	Pulau/Island						Jumlah/ Total
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Maluku dan Irian Jaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001	9 023,1 (15,38)	20 283,8 (34,57)	3 776,8 (6,44)	20 265,0 (34,54)	2 187,7 (3,73)	3 137,5 (5,35)	58 673,9 (100,00)
2002	5 946,2 (23,54)	12 780,9 (50,59)	2 722,9 (10,78)	3 546,0 (14,04)	44,2 (0,17)	222,1 (0,88)	25 262,3 (100,00)
2003	3 500,9 (7,22)	11 283,4 (23,27)	2 100,2 (4,33)	29 766,9 (61,39)	834,6 (1,72)	998,8 (2,06)	48 484,8 (100,00)
2004	10 217,8 (27,80)	20 456,3 (55,67)	2 465,4 (6,71)	2 593,7 (7,06)	830,3 (2,26)	184,1 (0,50)	36 747,6 (100,00)
2005	13 235,9 (26,17)	23 086,8 (45,65)	5 212,2 (10,31)	4 034,4 (7,98)	3 279,2 (6,48)	1 728,9 (3,42)	50 577,4 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMDN
Figure in parantheses are percentage of total domestic investment

Sumber : BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Februari 2006
Indonesian Financial Statistics, February 2006

total PMDN, sedangkan kontribusi untuk sektor lainnya dan sektor listrik, perdagangan dan jasa sudah diatas 11 persen terhadap total PMDN.

Dari data rencana PMDN yang disetujui pemerintah terlihat bahwa Pulau Jawa masih menjadi lokasi yang paling banyak diminati oleh investor, dibanding pulau-pulau lainnya. Pada tahun 2001 sebagai lokasi penempatan rencana investasi dalam negeri yang utama, Pulau Jawa mampu menyerap sebesar Rp 20 283,8 miliar dengan kontribusi sebesar 34,57 persen. Pulau Sulawesi menempati urutan ke dua dengan nilai investasi sebesar Rp 20 265,0 miliar (34,54 persen) serta pulau Sumatera dengan nilai investasi hanya Rp 9 023,1 miliar (15,38 persen). Pada tahun 2002 nilai investasi yang terserap di pulau Jawa mengalami penurunan menjadi Rp 12 780,9 miliar, tetapi bila dilihat kontribusinya masih cukup tinggi yaitu mencapai 50,59 persen terhadap total PMDN. Namun pada tahun 2003 nilai investasi banyak terserap ke Pulau Sulawesi



Sampai akhir tahun 2005, nilai investasi di Pulau Jawa dan Sumatera menduduki peringkat teratas.

yaitu mencapai Rp 29 766,9 miliar, dengan kontribusi sebesar 61,39 persen. Sedangkan yang terserap di Pulau Jawa hanya 23,27 persen dari total PMDN atau sekitar Rp 11 283,4 miliar. Pada tahun 2004 nilai PMDN yang disetujui pemerintah kembali banyak terserap di Pulau Jawa yaitu mencapai Rp 20 456,3 miliar (55,67 persen) sementara nilai PMDN di Pulau Sumatera dan Pulau Sulawesi masing-masing mencapai Rp 10 217,8 miliar (27,80 persen) dan Rp 2 593,7 miliar (7,06 persen). Sampai akhir tahun 2005 nilai investasi yang diberikan bagi kegiatan perekonomian di Pulau Jawa dan Sumatera menempati urutan teratas, masing-masing sebesar Rp 23 086,8 miliar dan Rp 13 235,9 miliar dengan nilai kontribusi masing-masing sebesar 45,65 persen dan 26,17 persen terhadap total PMDN.

7.2. Penanaman Modal Asing (PMA)

Sebagai negara berkembang yang sedang membangun, Indonesia membutuhkan dana yang cukup besar untuk membiayai pembangunan. Di samping usaha memobilisasi dana dari dalam negeri, dana investasi dari luar negeri di luar pinjaman pemerintah juga terus diupayakan.

Saat ini ada kecenderungan investor asing mengalihkan investasinya dari negara maju ke negara-negara berkembang yang pertumbuhan ekonominya sedang meningkat. Hal ini merupakan peluang bagi pemerintah dalam upaya menarik minat investor asing menanamkan kembali modalnya di Indonesia. Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) sebagai badan yang bertanggung jawab dalam kegiatan penanaman modal terus mengembangkan peranannya dalam menumbuhkan investasi. Diharapkan BKPM dapat memperbaiki iklim investasi di Indonesia dengan melakukan perubahan yang menyeluruh dalam sistem perijinan investasi dan usaha, agar mampu mendorong investor untuk menanamkan modalnya di Indonesia.

Salah satu faktor yang menarik bagi investor asing untuk menanamkan modalnya di Indonesia adalah masih cukup tinggi potensi keuntungan investasi di Indonesia, hal tersebut tercermin dari selisih suku bunga dalam dan luar negeri yang

Investasi dan Perdagangan Saham

cukup tinggi. Selain itu faktor risiko investasi di Indonesia juga mulai membaik, di dorong oleh konsistensi dan koordinasi kebijakan moneter, fiskal dan sektor riil.

Aliran investasi asing ke pasar modal Indonesia dalam lima tahun terakhir menunjukkan pergerakan yang fluktuatif, disebabkan karena belum adanya pergerakan yang signifikan dalam fundamental perekonomian di dalam negeri. Belum masuknya investasi asing secara signifikan disebabkan karena investor asing sangat berhati-hati dan selektif untuk melakukan investasi dan kegiatan ekonomi di Indonesia. Hal ini terlihat dari rencana PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2001 tercatat US \$ 15 043,9 juta. Kemudian tahun 2002 nilai PMA yang disetujui pemerintah hanya sebesar US \$ 9 744,1 juta atau mengalami penurunan 35,23 persen. Pada tahun 2003

Tabel 7.3. Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Sektor, Tahun 2001 - 2005 (Juta US \$)
Approved Foreign Direct Investment Projects by Sector, 2001 - 2005 (Millions of US \$)

Sektor/ Sector	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, & Perikanan <i>Agriculture, Forestry, & Fisheries</i>	391,7 (2,60)	458,9 (4,71)	178,9 (1,35)	329,7 (3,21)	606,0 (4,67)
Pertambangan/ <i>Mining</i>	118,7 (0,79)	49,2 (0,50)	17,8 (0,13)	66,3 (0,64)	775,9 (5,98)
Industri/ <i>Manufacturing</i>	5 144,4 (34,20)	3 208,2 (32,92)	6 457,4 (48,89)	6 334,3 (61,63)	6 028,0 (46,44)
Angkutan/ <i>Transportation</i>	373,3 (2,48)	3 713,2 (38,11)	4 160,2 (31,50)	586,5 (5,71)	3 107,3 (23,94)
Listrik, Perdagangan, dan Jasa <i>Electricity, Trade, and Services</i>	1 899,1 (12,62)	1 764,9 (18,11)	1 106,7 (8,38)	1 079,7 (10,51)	301,0 (2,32)
Lainnya/ <i>Others</i>	7 116,7 (47,31)	549,7 (5,64)	1 286,2 (9,74)	1 880,8 (18,30)	2 161,1 (16,65)
Jumlah/ <i>Total</i>	15 043,9 (100,00)	9 744,1 (100,00)	13 207,2 (100,00)	10 277,3 (100,00)	12 979,3 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMA

Figures in parantheses are percentage of total foreign investment

Sumber : BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Februari 2006

Indonesian Financial Statistics, February 2006

Nilai PMA Januari - Desember 2005 naik 26,29 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

nilai PMA yang disetujui pemerintah mengalami kenaikan sebesar 35,54 persen menjadi US \$ 13 207,2 juta, namun turun kembali di tahun 2004 dengan nilai investasi sebesar US \$ 10 277,3 juta atau turun 22,18 persen dari tahun sebelumnya yang berarti ada penurunan minat investor dari luar untuk melakukan investasi baru di Indonesia. Rencana nilai investasi PMA yang disetujui oleh pemerintah sampai akhir tahun 2005 kembali mengalami kenaikan dan mampu menyerap investasi asing sebesar US \$ 12 979,3 juta atau naik sebesar 26,29 persen dari tahun sebelumnya.

Rencana PMA jika di lihat menurut sektor, pada tahun 2001 banyak terserap di sektor lainnya (gabungan dari sektor bangunan, sektor perhotelan, dan sektor perumahan dan perkantoran) dengan nilai investasi sebesar US \$ 7 116,7 juta atau menyumbang sebesar 47,31 persen terhadap total PMA. Selanjutnya di posisi ke dua adalah sektor industri dengan nilai investasi mencapai US \$ 5 144,4 juta dengan kontribusinya sebesar 34,20 persen. Jika pada tahun 2001 sektor angkutan menyumbang cukup kecil yaitu 2,48 persen (US \$ 373,3 juta), namun pada tahun 2002 sektor ini mengalami kenaikan yang sangat tinggi sekali hingga menempati urutan pertama dengan nilai investasi yang terserap sebesar US \$ 3 713,2 juta dengan kontribusi mencapai 38,11 persen dan posisi ke dua masih tetap sektor industri dengan nilai investasi US \$ 3 208,2 juta.

Pada tahun 2003 rencana PMA yang disetujui pemerintah terjadi pergeseran, sektor yang paling diminati oleh perusahaan PMA di Indonesia yaitu sektor industri dengan besar investasi mencapai US \$ 6 457,4 juta (48,89 persen), diikuti sektor angkutan diposisi ke dua dengan nilai investasi US \$ 4 160,2 juta. Sektor industri kembali menempati urutan pertama pada tahun 2004 walaupun banyaknya investasi yang terserap di sektor industri mengalami penurunan 1,91 persen hanya US \$ 6 334,3 tetapi secara kontribusi cukup tinggi dibandingkan tahun sebelumnya yaitu 61,63 persen dari total nilai PMA. Sedangkan di posisi ke dua adalah sektor lainnya dengan nilai investasi yang ditanamkan sebesar US \$ 1 880,8 juta (18,30 persen).

Investasi dan Perdagangan Saham

Sampai akhir tahun 2005 sektor industri masih menjadi primadona bagi investor asing untuk menanamkan modalnya, dengan nilai investasi yang terserap sebesar US \$ 6 028 juta (46,44 persen). Sektor yang cukup diminati investor asing di posisi ke dua adalah angkutan dengan nilai investasi yang terserap sebesar US \$ 3 107,3 juta (23,94 persen) dan urutan ke tiga adalah sektor lainnya, dengan investasi sebesar US \$ 2 161,1 juta (16,65 persen). Sedangkan investasi asing yang ditanamkan pada sektor pertambangan, sektor pertanian, serta sektor listrik, perdagangan dan jasa nilai investasi asing dibawah US \$ 780 juta.

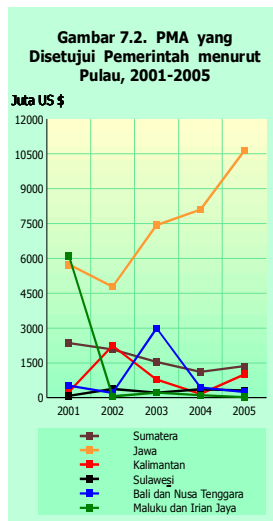
Investor asing pada tahun 2001 mulai mencoba menanamkan modalnya ke wilayah timur sehingga sebagian besar proyek PMA yang disetujui pemerintah berlokasi di pulau Maluku dan Irian Jaya yaitu 40,58 persen dari total nilai PMA atau senilai US \$ 6 104,9 juta. Namun tahun-tahun berikutnya investor asing kembali banyak menanamkan

Tabel 7.4. Rencana Penanaman Modal Asing (PMA) yang Disetujui Pemerintah menurut Pulau, Tahun 2001 - 2005 (Juta US \$)
Approved Foreign Direct Investment Projects by Island, 2001 - 2005 (Millions of US \$)

Tahun	Pulau						Jumlah
	Sumatera	Jawa	Kalimantan	Sulawesi	Bali dan Nusa Tenggara	Maluku dan Irian Jaya	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
2001	2 352,2 (15,64)	5 738,5 (38,14)	242,6 (1,61)	81,1 (0,54)	524,9 (3,49)	6 104,9 (40,58)	15 044,2 (100,00)
2002	2 078,2 (21,33)	4 780,9 (49,06)	2 236,6 (22,95)	380,2 (3,90)	208,5 (2,14)	59,7 (0,61)	9 744,1 (100,00)
2003	1 541,2 (11,67)	7 430,6 (56,26)	780,7 (5,91)	225,2 (1,71)	3 004,5 (22,75)	225,0 (1,70)	13 207,2 (100,00)
2004	1 111,6 (10,82)	8 100,0 (78,81)	158,6 (1,54)	363,2 (3,53)	433,2 (4,22)	110,9 (1,08)	10 277,3 (100,00)
2005	1 355,8 (9,98)	10 632,2 (78,30)	1 005,3 (7,40)	310,7 (2,29)	250,8 (1,85)	24,5 (0,18)	13 579,3 (100,00)

Catatan : Angka dalam kurung menunjukkan persentase terhadap jumlah PMA
Figures in parantheses are percentage of total foreign investment

Sumber : BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Februari 2006
Indonesian Financial Statistics, February 2006



modalnya ke pulau Jawa. Hal ini disebabkan karena perusahaan-perusahaan yang bergerak di bidang industri sebagian besar berada di Pulau Jawa. Proyek-proyek PMA yang disetujui pemerintah pada tahun 2002 dan 2003 kembali banyak terserap di pulau Jawa dengan nilai investasi masing-masing sebesar US \$ 4 780,9 juta dan US \$ 7 430,6 juta. Posisi kedua yang banyak menyerap PMA pada tahun 2002 adalah Kalimantan dengan nilai investasi sebesar US \$ 2 236,6 juta dan tahun 2003 adalah Bali dan Nusa Tenggara dengan nilai investasi sebesar US \$ 3 004,5 juta atau sebesar 22,75 persen dari total PMA yang disetujui pemerintah.

Pada tahun 2004 Pulau Jawa tetap menempati urutan pertama dalam penyerapan PMA yang disetujui pemerintah dengan nilai investasi sebesar US \$ 8 100,0 juta atau sebesar 78,81 persen dari total PMA dan urutan ke dua pulau Sumatera dengan investasi yang terserap sebesar US \$ 1 111,6 juta atau sekitar 10,82 persen dari total PMA. Sampai dengan akhir tahun 2005 nilai investasi asing yang terserap ke pulau Jawa semakin meningkat hingga mencapai US \$ 10 632,2 juta atau sebesar 78,30 persen. Sementara sekitar 9,91 persen dari total PMA atau sebesar US \$ 1 355,8 juta terserap ke pulau Sumatera dan sebesar US \$ 1 005,3 juta terserap di pulau Kalimantan.

7.3. Bursa Efek Jakarta dan Surabaya

Badan/Bursa Efek baru didirikan di Indonesia pada awal dekade 1980-an. Hingga saat ini hanya ada dua bursa efek, yakni Bursa Efek Jakarta (BEJ) dan Bursa Efek Surabaya (BES). Aktivitas yang terjadi di pasar modal pada BEJ dan BES antara lain kegiatan yang berkaitan dengan emisi saham dan obligasi, kapitalisasi pasar (saham), perdagangan saham, indeks harga saham yang terdiri dari IHSG.

Tabel 7.5. menunjukkan transaksi perdagangan saham di BEJ dan BES selama kurun waktu 2001 - 2005. Jumlah saham yang diperdagangkan di BEJ sebanyak 156,91 miliar lembar pada tahun 2001 dan posisi sampai akhir tahun 2002 jumlah saham yang terjual di Bursa Efek Jakarta (BEJ) sebanyak 168,66 miliar lembar atau terjadi kenaikan sebesar

Investasi dan Perdagangan Saham

7,49 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Sedangkan jumlah saham yang diperdagangkan hingga akhir 2003 sebanyak 231,62 miliar lembar terjadi kenaikan sebesar 37,33 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp 165,2 triliun. Transaksi perdagangan saham di BEJ mencapai puncaknya pada akhir tahun 2004 dimana jumlah sahamnya yang terjual mencapai 411,77 miliar lembar saham mengalami kenaikan sebesar 77,78 persen dengan nilai transaksi sebesar Rp 247,0 triliun. Posisi sampai akhir tahun 2005 jumlah saham yang terjual di BEJ mencapai 404,03 miliar lembar mengalami penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 1,88 persen namun untuk nilai transaksi lebih besar dari tahun lalu yaitu sebesar RP 408,6 triliun.

Jumlah saham yang diperdagangkan di Bursa Efek Surabaya (BES) tidak sebanyak jumlah saham yang diperdagangkan di BEJ. Transaksi perdagangan saham di BES pada tahun 2001 mencapai 14,41 miliar lembar saham, tetapi tidak diimbangi dengan nilai transaksi yang hanya mencapai Rp 2,9 triliun. Sedangkan sampai akhir tahun 2002 jumlah saham yang terjual di BES hanya mencapai 5,84 miliar lembar saham atau turun 59,47 persen dibanding saham yang terjual tahun sebelumnya tetapi nilai transaksinya sangat tinggi sekali yaitu mencapai Rp 11,61 triliun. Kondisi saham yang diperdagangkan hingga akhir 2003 sebanyak 9,51 miliar lembar atau senilai Rp 3,1 triliun namun meningkat tajam di akhir tahun 2004 dimana saham yang diperdagangkan sebanyak 18,74 miliar lembar saham dengan nilai transaksi Rp 8,2 triliun. Jumlah saham yang diperdagangkan sampai akhir tahun 2005 di BES hanya mencapai 15,74 miliar lembar saham atau turun 16,00 persen dengan nilai transaksi mencapai Rp 5,3 triliun.

Indeks harga saham merupakan indikator yang menggambarkan pergerakan harga saham. Sebagai besaran statistik, indeks harga saham juga sering digunakan untuk menggambarkan dan meramalkan kecenderungan pasar. Bagi pemodal, arti paling penting indeks harga saham adalah sebagai tolok ukur keuntungan (*capital gain*).

Sampai akhir tahun 2005, jumlah saham yang terjual di BEJ dan BES masing-masing 404,03 miliar lembar dan 15,74 miliar lembar.

**Tabel 7.5. Transaksi dan Indeks Saham di Bursa Efek Jakarta dan Surabaya,
Transaction and Index of Stock at The Jakarta and Surabaya
Stock Exchanges, 2001 - 2005**

Akhir Periode <i>End of Period</i>	Jumlah Saham yang Diperdagangkan (miliar lembar) <i>Volume of Transaction (Billions Number of Stocks)</i>		Nilai Transaksi (Miliar Rupiah) <i>Value of Transaction (Billions of Rp.)</i>		Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) <i>Composite Stock Price Index</i>	
	Jakarta	Surabaya	Jakarta	Surabaya	Jakarta	Surabaya
	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2001	156,91	14,41	99 547	2 854	392,03	220,89
2002	168,66	5,84	154 277	11 606	424,94	252,84
2003	231,62	9,51	165 160	3 124	679,30	375,02
2004	411,77	18,74	247 007	8 228	1 000,23	545,62
2005 ¹⁾	404,03	15,74	408 602	5 334	1 162,63	620,42

Catatan : 1) Dihitung berdasarkan data bulanan kumulatif Januari-Desember 2005
Calculated by cumulative January - December 2005

Sumber : BI, Statistik Ekonomi Keuangan Indonesia, Februari 2006
Indonesian Financial Statistics, February 2006

Indeks di bursa terdiri dari Indeks Harga Saham Individual dan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG). Kedua jenis indeks ini dihitung setiap hari dimana terjadi transaksi, dengan menggunakan harga saham terakhir yang terjadi di lantai bursa. Indeks Individual mencerminkan perkembangan harga suatu saham individu (*emiten*), sedangkan IHSG mencerminkan perkembangan harga saham gabungan seluruh peserta transaksi di bursa secara keseluruhan. Penghitungan IHSG pada masing-masing Bursa efek menggunakan hari dasar yang berbeda, dimana untuk BEJ penghitungan IHSG dengan menggunakan hari dasar tanggal 10 Agustus 1982 sedangkan di BES menggunakan hari dasar 19 September 1996.

Pada akhir tahun 2002 IHSG di Bursa Efek Jakarta tercatat 424,94 atau naik 32,91 poin dibanding penutupan tahun sebelumnya, dan pada akhir tahun 2003 IHSG meningkat berada diatas indeks penutupan tahun sebelumnya atau naik 254,36 poin yaitu 679,30. Sampai pada akhir tahun 2004 dimana IHSG ditutup pada posisi indeks jauh lebih tinggi bila

Investasi dan Perdagangan Saham

dibandingkan tahun sebelumnya yaitu tercatat 1 000,23 atau naik 320,93 poin. Pada akhir tahun 2005 IHSG ditutup pada posisi 1 162,63 atau naik 162,40 poin.

Posisi IHSG di Bursa Efek Surabaya (BES) selama tahun 2001 dan 2002 selalu ditutup dengan nilai indeks dibawah 300 point dimana posisi terendah terjadi pada tahun 2001 dengan posisi indeks 220,89. Sedangkan pada tahun 2003 IHSG ditutup pada posisi indeks 375,02. Sementara IHSG di BES sampai akhir tahun 2004 ditutup pada posisi 545,62 berada 170,6 poin di atas indeks penutupan tahun sebelumnya. Sampai akhir tahun 2005 Harga Indeks Saham Gabungan di Bursa Efek Surabaya tercatat 620,42 atau naik 74,82 poin dibanding penutupan tahun sebelumnya.

<http://www.bps.go.id>

PARIWISATA

- Kunjungan Wisman ke Indonesia •*
- Tingkat Penghunian Kamar Hotel •*
- Rata-rata Lama Menginap •*
- Penerimaan Devisa dari Wisatawan •*



Sektor pariwisata merupakan salah satu sektor yang perlu mendapat perhatian pada pembangunan dewasa ini karena selain merupakan sumber pemasukan devisa negara, juga sebagai pencipta lapangan kerja. Mengingat Indonesia merupakan negara yang banyak memiliki tempat wisata yang indah, dan banyak diminati oleh wisatawan mancanegara, maka sektor pariwisata perlu terus dikembangkan. Pembangunan pariwisata terutama ditujukan untuk memperbaiki atau memajukan industri pariwisata beserta subsektor pendukungnya. Tempat wisata yang telah ada terus ditingkatkan agar lebih menarik para wisatawan, juga menambah tempat wisata untuk daerah-daerah potensi wisata yang belum dikembangkan.

Terjadinya beberapa peristiwa peledakan bom yang mengguncang Indonesia membuat takut para wisatawan untuk berlibur ke Indonesia.

Namun selain potensi tempat wisata itu sendiri, perkembangan pariwisata sangat tergantung pada faktor-faktor eksternal. Sektor pariwisata sangat rentan terhadap beragam isu sosial, politik, ekonomi hingga keamanan negara. Indonesia sebenarnya mempunyai banyak potensi tempat wisata yang menarik. Namun berbagai masalah dan cobaan silih berganti menerpa industri pariwisata Indonesia.

Beberapa peristiwa peledakan bom menjadikan Indonesia dicap sebagai negara yang tidak aman terutama terhadap gangguan teroris. Ironisnya yang menjadi sasaran pihak teroris adalah warga asing ataupun aset-aset yang berkaitan dengan pihak asing. Kondisi ini membuat takut para wisatawan manca negara untuk berlibur ke Indonesia. Ditambah lagi dengan adanya larangan (*Travel warning*) beberapa negara terhadap warganegaranya yang akan berkunjung ke Indonesia berkaitan dengan situasi keamanan yang tidak mendukung ini jelas tidak mendukung sektor pariwisata di tanah air.

Selain teror bom, merebaknya wabah penyakit flu burung yang melanda kota-kota di Indonesia seperti Jakarta dan Bogor juga sempat berpengaruh terhadap industri pariwisata. Walaupun Indonesia dinyatakan bukan tempat yang terinfeksi, namun orang tetap takut untuk bepergian. Hal ini berakibat pada menurunnya jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia. Menurunnya wisatawan akan membawa dampak

pada lumpuhnya subsektor pendukung seperti perhotelan, penerbangan, kawasan wisata dan industri kerajinan.

8.1. Kunjungan Wisatawan Mancanegara ke Indonesia

Tidak seperti beberapa tahun sebelum krisis ekonomi melanda, dimana jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman) ke Indonesia selalu mengalami peningkatan setiap tahun, pada periode selanjutnya jumlah wisman berfluktuatif. Pada tahun 2000 jumlah wisman tercatat sebanyak 5,06 juta orang, kemudian pada tahun 2001 mengalami sedikit kenaikan menjadi 5,15 juta orang. Namun pada tahun 2002 hingga tahun 2003 jumlah wisman mengalami penurunan, dari 5,03 juta orang pada tahun 2002 menjadi 4,47 juta orang pada tahun 2003. Turunnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia ini erat kaitannya dengan sejumlah peristiwa peledakan bom dan meningkatnya kriminalitas yang terjadi sepanjang tahun 2002-2003. Pada tanggal 12 Agustus 2002 terjadi peledakan bom di Legian Kuta Bali, sehingga sangat berpengaruh pada kunjungan wisman ke Indonesia, karena tragedi bom tersebut menewaskan ratusan orang yang sebagian besar adalah wisman. Peristiwa tersebut langsung meluluhlantakkan bisnis pariwisata Indonesia khususnya Propinsi Bali yang merupakan daerah tujuan utama wisatawan di Indonesia. Bali yang penopang utama ekonominya sektor pariwisata benar-benar sangat terpukul. Sesaat setelah kejadian, terjadi pembatalan perjalanan ke Bali dari agen-agen perjalanan di seluruh dunia. Wisatawan yang masih tinggal di Balipun cepat-cepat meninggalkan Bali walaupun rencana liburan mereka belum selesai. Kunjungan wisman secara nasional pada tahun 2002, mengalami penurunan sebesar 2,33 persen.

Pada tahun 2005 jumlah wisatawan yang datang ke Indonesia turun 6,0 persen dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi keamanan yang kurang kondusif selama tahun 2003, nampaknya mulai berangsur-angsur membaik pada tahun 2004. Penyelenggaraan pemilu baik legislatif maupun presiden yang dikhawatirkan dapat memicu kerusuhan ternyata dapat berlangsung dengan sukses dan damai. Keadaan ini mendorong meningkatnya kembali kunjungan wisman ke Indonesia. Selama tahun 2004 sebanyak 5,23 juta orang wisman datang ke Indonesia, atau meningkat sebesar 19,12

persen dibanding tahun sebelumnya. Namun pada tahun 2005, industri pariwisata Indonesia kembali melemah, karena pada Oktober 2005 bom kembali mengguncang Bali tepatnya di Jimbaran dan Kuta yang merupakan lokasi favorit para turis, lebih dari seratus orang menjadi korban (meninggal dan luka). Peristiwa ini berdampak pada tahun 2005 jumlah wisman yang datang ke Indonesia kembali mengalami penurunan hingga mencapai 5,0 juta orang atau menurun sebesar 6,0 persen.

Tabel 8.1. Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia
Arrival of Foreign Tourist in Indonesia
2000-2005 (orang / person)

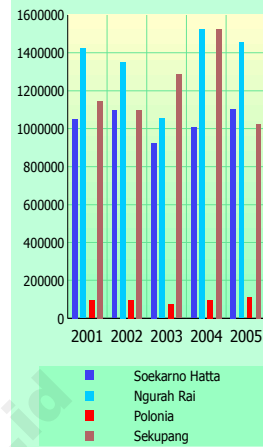
Tahun Year	Soekarno Hatta (Jakarta)	Ngurah Rai (Bali)	Polonia (Medan)	Sekupang (P. Batam)	Lainnya Other	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2000	1 029 888	1 468 207	84 301	1 134 051	1 347 770	5 064 217
2001	1 049 471	1 422 714	94 211	1 145 578	1 441 646	5 153 620
2002	1 095 507	1 351 176	97 870	1 101 048	1 387 799	5 033 400
2003	921 737	1 054 143	74 776	1 285 394	1 130 971	4 467 021
2004	1 005 072	1 525 994	97 087	1 527 132	1 165 880	5 321 165
2005	1 105 202	1 454 804	109 034	1 024 758	1 308 302	5 002 100
Januari	81 227	107 728	8 196	124 169	27 326	348 646
Februari	79 714	105 402	10 134	83 677	30 079	309 006
Maret	96 898	121 457	10 806	83 811	32 992	345 964
April	89 931	122 339	9 504	79 967	31 953	333 694
Mei	90 686	122 721	8 144	90 924	31 436	343 911
Juni	92 997	142 659	8 802	90 828	32 980	368 266
Juli	108 895	165 144	9 527	87 022	33 685	404 273
Agustus	108 492	163 606	9 641	77 993	32 435	392 167
September	99 494	168 170	9 909	76 942	32 802	387 317
Oktober	76 350	86 798	6 233	69 793	28 659	267 833
Nopember	85 139	67 687	8 531	68 539	31 204	261 100
Desember	95 379	81 093	9 607	91 093	35 005	312 177

Catatan : Angka bulanan merupakan jumlah wisatawan yang datang melalui
Note 13 pintu masuk/Monthly figure indicate number of foreign tourist
at 13 port of entry

Sumber : BPS (Statistik Kunjungan Tamu Asing dan Indikator Ekonomi)
Source Statistics Indonesia (Foreign Visitor Statistics and Economic Indicators)

Dilihat dari pintu masuk utama, kedatangan wisman ke Indonesia pada umumnya melalui Soekarno-Hatta (Jakarta), Ngurah Rai (Bali), Polonia (Sumatera Utara) dan Sekupang (Riau). Pada tahun 2005 dari keempat pintu utama tersebut kedatangan wisman terbesar adalah melalui bandara Ngurah Rai yaitu sebesar 1.454,8 ribu orang, kemudian berturut-turut Soekarno-Hatta, Sekupang dan Polonia masing-masing tercatat sebesar 1.105,2 ribu orang, 1.024,8 ribu orang dan 109,0 ribu orang. Jika dibandingkan dengan jumlah wisman yang datang pada tahun 2004, maka wisman yang datang melalui pintu masuk Sekupang dan bandara Ngurah Rai pada tahun 2005 mengalami penurunan masing-masing sebesar 32,90 persen dan 4,67 persen. Sedangkan dua pintu masuk lainnya yaitu Soekarno Hatta dan Polonia masing-masing meningkat sebesar 9,96 persen dan 12,30 persen (Tabel 8.1.)

Gambar 8.1. Jumlah Wisatawan Mancanegara yang Datang ke Indonesia, 2001-2005



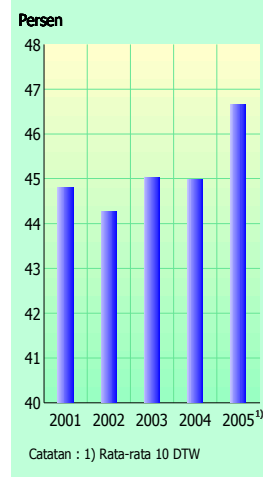
8.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel

Perkembangan industri pariwisata tidak lepas dari usaha akomodasi hotel berbintang melalui indikator Tingkat Penghunian Kamar (TPK) khususnya di 10 propinsi daerah tujuan wisata (DTW), yaitu: Sumatera Utara, Sumatera Barat, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Jawa Timur, Bali, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan.

Tingkat penghunian kamar (TPK) hotel berbintang selama periode 2000-2004 menunjukkan peningkatan tiap tahun kecuali tahun 2002 dan 2004 yang mengalami sedikit penurunan. Secara nasional TPK hotel berbintang selama periode tersebut berkisar antara 43,23 persen sampai dengan 44,98 persen. Sementara TPK untuk 10 DTW pada tahun 2005 tercatat sebesar 46,66 persen. Jika dibandingkan dengan keadaan sebelum krisis (1997) dengan tingkat penghunian kamar hotel sebesar 47,02 persen, maka tingkat penghunian kamar hotel selama periode 2000-2005 masih lebih rendah.

Bali yang merupakan daerah tujuan utama wisman ke Indonesia merupakan daerah dengan TPK hotel berbintang paling tinggi selama periode 2000-2002 yaitu sebesar 50,56 persen hingga 56,69 persen. Sementara pada tahun 2003 TPK tertinggi berada di Propinsi Sulawesi Utara dengan

Gambar 8.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di Indonesia, 2001-2005



Tabel 8.2. Tingkat Penghunian Kamar Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Room Occupancy Rate of Classified Hotels in 10 Provinces of Main Tourist Destination 2000-2005 (persen/per cent)

Daerah Tujuan Wisata Main Tourist Destination	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	39,96	44,12	39,57	38,20	37,15	41,06
Sumatera Barat	34,25	36,42	36,56	40,31	41,34	38,56
DKI Jakarta	42,46	46,14	48,08	48,76	51,80	55,45
Jawa Barat	35,24	37,36	37,83	40,05	37,28	36,54
Jawa tengah	39,47	40,00	40,61	40,52	40,38	39,20
DI Yogyakarta	42,82	40,57	40,94	47,99	46,89	43,16
Jawa Timur	41,26	43,27	46,73	44,70	44,10	42,22
Bali	55,87	56,69	50,56	48,70	51,10	49,24
Sulawesi Utara	39,78	33,29	44,13	49,68	47,24	53,19
Sulawesi Selatan	24,21	27,77	32,06	40,94	29,16	35,07
Indonesia	43,23	44,79	44,28	45,03	44,98	46,66 ¹⁾

Catatan/Notes : 1). Rata-rata 10 DTW / Average of 10 Main Tourist Destination

Rata-rata tingkat penghunian kamar hotel berbintang tertinggi di DKI Jakarta selama tahun 2005 sebesar 55,45 persen.

persentase sebesar 49,68 persen. Dan pada tahun 2004-2005 TPK tertinggi berada di Propinsi DKI Jakarta yaitu sebesar 51,80 persen dan 55,45 persen. Sedangkan TPK hotel terendah selama periode 2000-2005 terjadi di propinsi Sulawesi Selatan, yaitu sekitar 24,21 persen hingga 35,07 persen, kecuali pada tahun 2003 TPK terendah di Propinsi Jawa Barat sebesar 40,05 (Tabel 8.2).

8.3. Rata-rata Lama Menginap

8.3.1. Tamu Asing dan Dalam Negeri

Berbeda dengan Tingkat Penghunian Kamar (TPK) hotel berbintang yang cenderung meningkat, sebaliknya rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri justru mengalami penurunan. Secara nasional, rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri pada hotel berbintang selama periode 2000-2004 terus menurun. Rata-

rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri pada tahun 2000 tercatat sebesar 2,25 hari dan pada tahun 2001 mengalami penurunan menjadi 2,20 hari. Penurunan terus terjadi tiap tahun hingga pada tahun 2003 rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri hanya mencapai 1,99 hari. Kondisi yang sama terjadi pada Propinsi Bali yang merupakan daerah dengan rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri tertinggi. Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri di Propinsi Bali pada tahun 2000 telah mencapai 4,07 hari kemudian sedikit mengalami kenaikan pada tahun 2001 menjadi 4,15 hari, tetapi kemudian pada tahun 2002 hingga tahun 2004 terus mengalami penurunan hingga mencapai 3,62 persen.

Tabel 8.3 Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing dan Tamu Dalam Negeri di Hotel Berbintang Pada 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW)
Average Length of Stay of Foreign Guest and Domestic Guests at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination
2000-2005 (Dalam Hari / In Days)

Daerah Tujuan Wisata <i>Main Tourist Destination</i>	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	1,38	1,49	1,52	1,42	1,42	1,44
Sumatera Barat	1,92	1,76	1,70	1,79	1,66	1,48
DKI Jakarta	2,18	2,28	2,02	2,04	1,96	2,12
Jawa Barat	1,63	1,47	1,51	1,47	1,41	1,42
Jawa tengah	1,47	1,50	1,57	1,47	1,47	1,43
DI Yogyakarta	2,27	1,92	2,01	2,11	1,96	1,60
Jawa Timur	1,79	1,87	1,95	1,80	1,71	1,78
Bali	4,07	4,15	4,02	3,81	3,62	3,67
Sulawesi Utara	3,60	2,37	2,40	2,01	1,92	2,16
Sulawesi Selatan	1,89	2,19	2,11	1,92	1,82	1,81
Indonesia	2,25	2,20	2,12	1,99	2,00	2,06 ¹⁾

Catatan : 1). Rata-rata 10 DTW / *Average of 10 Main Tourist Destination*
 Notes

Sumber : BPS (Statistik Kunjungan Tamu Asing dan Indikator Ekonomi)
 Source : *Statistics Indonesia (Foreign Visitor Statistics and Economic Indicators)*

Rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri pada tahun 2005 sebesar 2,06 hari

Pada tahun 2004 rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri pada hotel berbintang tercatat sebesar 2,00 hari sedikit lebih tinggi jika dibandingkan tahun sebelumnya. Pada tahun 2005 rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri di 10 DTW sebesar 2,06 hari. Dari 10 DTW propinsi yang mempunyai rata-rata lama menginap tamu asing dan tamu dalam negeri tertinggi selama periode 2000-2005 adalah Propinsi Bali walaupun sempat mengalami turun naik. Sementara propinsi yang memiliki rata-rata menginap terendah adalah Propinsi Sumatera Utara pada tahun 2000 sebesar 1,38 hari. Kemudian pada 2001 dan 2002 bergeser ke Propinsi Jawa Barat sebesar 1,49 hari dan 1,51 hari. Tahun 2003 kembali diambil alih oleh Propinsi Sumatera Utara (1,42 hari). Sedangkan pada tahun 2004-2005 sebesar 1,41 hari dan 1,42 hari berada di Propinsi Jawa Barat kembali. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.3.

8.3.2. Tamu Asing

Rata-rata lama menginap tamu asing tertinggi pada tahun 2005 tercatat di Proinsi Bali (3,85 hari)

Rata-rata lama menginap tamu asing pada hotel berbintang di Indonesia selama kurun waktu tahun 2000-2004 menunjukkan angka yang berfluktuasi. Selama periode tersebut rata-rata lama menginap tamu asing tercatat di atas 3 hari, kecuali pada tahun 2003 turun mencapai 2,99 hari. Pada tahun 2005 rata-rata lama menginap tamu asing di 10 DTW tercatat 3,20 hari. Sementara bila dilihat dari 10 DTW, ternyata Bali masih merupakan tujuan wisata yang diminati bagi tamu asing, hal ini didukung dari data pada Tabel 8.4 pada tahun 2000-2002 dan tahun 2004-2005. Bali dapat mencapai angka tertinggi hingga 4,35 hari pada tahun 2001 dan terendah mencapai 3,75 hari pada tahun 2004. Selama periode 2000-2002 rata-rata lamanya tamu asing menginap di Bali menempati urutan teratas. Namun pada tahun 2003 rata-rata lama menginap tertinggi beralih ke Propinsi Sumatera Barat, yaitu sebesar 4,18 hari. Turunnya angka tersebut diduga karena pengaruh peledakan bom Bali yang terjadi pada tahun 2002-2003, sehingga banyak tamu asing yang takut mengunjungi pulau dewata ini, mengingat sasaran dari peledakan bom tersebut adalah wisatawan asing. Pada tahun-tahun selanjutnya Bali kembali tampil menjadi daerah tujuan

Tabel 8.4. Rata-rata Lama Menginap Tamu Asing Pada Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW), Average Length of Stay of Foreign Guest at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination 2000-2005 (Dalam Hari / In Days)

Daerah Tujuan Wisata Main Tourist Destination	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	2,12	2,29	2,91	3,26	1,84	1,95
Sumatera Barat	3,43	3,46	3,68	4,18	3,06	2,68
DKI Jakarta	2,61	2,85	2,80	2,64	2,48	2,65
Jawa Barat	2,77	2,32	2,30	3,37	3,23	3,30
Jawa Tengah	2,45	2,73	2,10	2,11	1,97	1,73
DI Yogyakarta	2,84	2,88	2,34	3,72	3,15	2,03
Jawa Timur	2,71	2,78	2,82	3,07	2,98	2,85
Bali	4,14	4,35	4,14	4,01	3,75	3,85
Sulawesi Utara	3,31	3,94	3,18	3,64	2,98	3,07
Sulawesi Selatan	2,47	3,45	2,77	2,07	2,91	2,62
Indonesia	3,26	3,31	3,09	2,99	3,04	3,20 ¹⁾

Catatan : 1). Rata-rata 10 DTW / Average of 10 Main Tourist Destination
Notes

Sumber : BPS (Statistik Kunjungan Tamu Asing dan Indikator Ekonomi)

Source : Statistics Indonesia (Foreign Visitor Statistics and Economic Indicators)

wisata yang memiliki rata-rata lama menginap tertinggi dibanding dengan 9 daerah tujuan wisata yang lain.

Sementara rata-rata lama menginap terendah bagi tamu asing berada pada Propinsi Sumatera Utara, pada tahun 2000-2001 yaitu sebesar 2,12 hari dan 2,29 hari. Propinsi Jawa Tengah pada tahun 2002 sebesar 2,10 hari. Propinsi Sulawesi Selatan pada tahun 2003 sebesar 2,07 hari. Tahun 2004 kembali Propinsi Sumatera Utara sebesar 1,84 hari dan pada tahun 2005 rata-rata terendah pada Propinsi Jawa Tengah sebesar 1,73 hari.

8.3.3. Tamu Dalam Negeri

Rata-rata lama menginap tamu dalam negeri pada hotel berbintang selama periode 2000 - 2004 terus mengalami penurunan tiap tahun. Pada tahun 2005 mencapai 1,73 hari

Tabel 8.5 Rata-rata Lama Menginap Tamu Dalam Negeri Pada Hotel Berbintang di 10 Propinsi Daerah Tujuan Wisata (DTW), Average Length of Stay of Domestic Guests at Classified Hotel in 10 Provinces of Main Tourist Destination 2000-2005 (Dalam Hari / In Days)

Daerah Tujuan Wisata Main Tourist Destination	2000	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sumatera Utara	1,27	1,35	1,28	1,19	1,35	1,37
Sumatera Barat	1,75	1,60	1,55	1,67	1,52	1,39
DKI Jakarta	2,03	2,10	1,78	1,89	1,82	1,98
Jawa Barat	1,52	1,39	1,41	1,38	1,31	1,32
Jawa Tengah	1,42	1,44	1,54	1,44	1,44	1,41
DI Yogyakarta	2,17	1,76	1,76	1,95	1,81	1,55
Jawa Timur	1,66	1,74	1,84	1,66	1,61	1,67
Bali	3,72	3,39	3,60	3,33	3,24	3,28
Sulawesi Utara	3,50	2,17	2,29	1,85	1,79	2,07
Sulawesi Selatan	1,76	1,98	2,03	1,84	1,74	1,75
Indonesia	1,83	1,78	1,72	1,71	1,68	1,73 ¹⁾

Catatan : 1). Rata-rata 10 DTW / Average of 10 Main Tourist Destination
Notes

Sumber : BPS (Statistik Kunjungan Tamu Asing dan Indikator Ekonomi)

Source : Statistics Indonesia (Foreign Visitor Statistics and Economic Indicators)

Rata-rata lama menginap tamu dalam negeri tertinggi pada tahun 2005 tercatat di Bali (3,28 hari)

karena masih merupakan rata-rata di 10 DTW. Sementara bila dilihat dari daerah tujuan wisatanya, maka rata-rata lama menginap tamu dalam negeri lebih lama menginap di Pulau Bali. Selama periode tersebut hanya Propinsi Bali yang mempunyai rata-rata menginap paling lama dibandingkan dengan daerah tujuan wisata yang lain, meskipun lamanya berfluktuasi namun cenderung menurun, yaitu dari 3,72 hari pada tahun 2000 hingga mencapai 3,28 hari pada tahun 2005. Sedangkan daerah yang memiliki rata-rata lama menginapnya terendah pada tahun 2000-2003 adalah Propinsi Sumatera Utara. Dan pada tahun 2004-2005 terendah pada Propinsi Jawa Barat, masing-masing sebesar 1,31 hari dan 1,32 hari.

8.4. Penerimaan Devisa dari Wisatawan Menurut Negara

Wisatawan mancanegara merupakan sumber pemasukan devisa yang cukup berarti bagi perekonomian Nasional. Penerimaan devisa dari 10 negara asal wisman dan negara-negara lainnya, sepanjang periode 2002–2005 sangat berfluktuasi. Pada tahun 2002 penerimaan devisa dari wisman tercatat sebesar US \$ 4.305,6 juta, kemudian pada tahun berikutnya turun menjadi US \$ 4.037,0 juta. Tetapi pada tahun 2004 penerimaan devisa negara mengalami kenaikan sebesar 18,85 persen menjadi US \$ 4.797,9 juta. Kemudian tahun 2005 kembali turun 5,75 persen menjadi US \$ 4.521,9 juta. Dari 10 negara asal utama wisman, selama periode 2002–2005, penerimaan devisa terbesar berasal dari wisatawan asal Singapura, yaitu berkisar antara US \$ 762,35 juta hingga US \$ 1.482,98 juta. Sedangkan penerimaan devisa terbesar kedua berasal dari negara Jepang yaitu berkisar antara US \$ 447,66 juta hingga US \$ 594,37 juta.

Seiring dengan besarnya penerimaan devisa dari wisman asal Singapura, jumlah wisman terbesar yang datang ke Indonesia juga berasal dari Singapura, yaitu sebesar 1.447,3 ribu orang pada tahun 2002, kemudian naik 1,52 persen pada tahun 2003 menjadi 1.469,3 ribu orang. Pada tahun 2004 jumlah ini mengalami kenaikan lagi sebesar 11,94 persen sehingga menjadi 1.644,7 ribu orang. Tetapi kemudian turun 17,33 persen pada tahun 2005 menjadi 1.359,8 ribu orang. Sementara negara yang paling sedikit menyumbangkan devisanya bagi Indonesia adalah Belanda, terlihat dari besarnya jumlah wisman yang datang selama periode 2002–2005, yaitu hanya berkisar 91,4 ribu orang (tahun 2003) hingga 115,2 ribu orang (tahun 2005).

Demikian pula halnya dengan jumlah wisman yang datang ke Indonesia, sempat mengalami penurunan pada tahun 2003 akibat peristiwa bom Bali, namun kondisi keamanan yang berangsur membaik pada tahun 2004 berdampak pada meningkatnya kunjungan wisatawan ke Indonesia. Dengan

Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara mencapai US \$ 4.521,90 juta pada tahun 2005

Tabel 8.6. Wisatawan yang datang ke Indonesia dan Penerimaan Devisa dari Wisatawan menurut Negara
Arrival of Foreign Tourist in Indonesia and Revenue from Foreign Tourist by Country
2002 - 2005

Negara <i>Country</i>	Wisatawan/ <i>Foreign Tourist</i> (Orang/ <i>Person</i>)				Penerimaan Devisa/ <i>Revenue</i> (Juta US \$/ <i>Million US \$</i>)			
	2002	2003	2004	2005 ^{x)}	2002	2003	2004	2005 ^{x)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
Malaysia	475 163	466 811	622 541	520 067	279,90	325,89	561,32	470,14
Singapura	1 447 315	1 469 282	1 644 717	1 359 755	762,35	791,72	1 482,98	1 229,22
Jepang	620 722	163 088	615 720	622 315	594,37	447,66	555,17	562,57
Korea, Rep	210 581	201 741	228 408	262 622	136,73	223,39	205,95	237,41
Taiwan	400 334	381 877	384 226	356 263	460,96	411,41	346,44	322,06
Jerman	142 649	113 895	134 625	143 468	145,12	134,70	121,39	129,70
Belanda	110 631	91 446	92 152	115 162	119,01	107,13	83,09	104,11
Inggris	160 077	98 916	113 578	137 232	170,81	107,54	102,41	124,06
Amerika Serikat	160 982	130 276	153 268	160 760	227,55	155,71	138,20	145,33
Australia	346 245	268 538	406 389	407 193	327,85	299,19	366,42	368,10
Lainnya	958 701	781 151	925 541	917 263	1 080,91	1 032,68	834,52	829,21
Jumlah/ <i>Total</i>	5 033 400	4 467 021	5 321 165	5 002 100	4 305,56	4 037,02	4 797,88	4 521,90

Sumber : BPS (Statistik Kunjungan Tamu Asing dan Indikator Ekonomi)
 Source : *Statistics Indonesia (Foreign Visitor Statistics and Economic Indicators)*

meningkatnya jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Indonesia pada tahun 2004, penerimaan devisa dari sektor pariwisata juga meningkat jika dibandingkan tahun 2003. Namun kondisi ini ternyata belum dapat dipertahankan, sehingga pada tahun 2005 jumlah wisman kembali mengalami penurunan sebesar 6,00 persen menjadi 5.002,1 ribu orang. Demikian pula dengan penerimaan devisa yang menurun sebesar 5,75 persen menjadi US \$ 4.521,9 juta. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada Tabel 8.6.

KETENAGAKERJAAN

- Keadaan Angkatan Kerja •*
- Keadaan Pekerja •*

9

<http://www.bp.go.id>

Masalah kesempatan kerja dan pengangguran menjadi topik penting dalam pembangunan perekonomian di tanah air. Oleh karena itu, penurunan angka pengangguran dengan menciptakan lapangan kerja merupakan target kebijakan ekonomi yang harus disepakati bersama. Untuk menciptakan lapangan kerja, pertumbuhan ekonomi yang dipercepat melalui iklim investasi yang baik dan didukung dengan serangkaian instrumen kebijakan dan campur tangan yang berkualitas baik mungkin dapat menjadi faktor penting dalam menyelesaikan masalah pengangguran. (Koran Tempo, 14 Januari 2002).

Merujuk pada Konvensi International Labour Organization (ILO), batasan penduduk usia kerja yang digunakan BPS adalah penduduk yang berusia 15 tahun ke atas, yang dibedakan atas Angkatan Kerja dan bukan Angkatan Kerja. Kelompok Angkatan Kerja mencakup penduduk yang bekerja dan penduduk yang mencari pekerjaan. Sementara bukan Angkatan Kerja adalah penduduk yang tidak aktif secara ekonomi, antara lain sekolah, mengurus rumah tangga dan lainnya.

Indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan ketenagakerjaan dalam bahasan ini adalah Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK), Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Tingkat Kesempatan Kerja (TKK), upah yang diterima pekerja, dan produktivitas pekerja. Penghitungan indikator-indikator tersebut bersumber dari pengolahan data Survei Angkatan Kerja Nasional (Sakernas).

9.1. Keadaan Angkatan Kerja

Laju pertumbuhan penduduk selama kurun 2000-2005 tercatat 1,34 persen, sejalan dengan pertumbuhan penduduk tersebut, penduduk usia kerja dan angkatan kerja juga bertambah. TPAK yang merupakan indikator untuk melihat perbandingan jumlah angkatan kerja terhadap jumlah penduduk usia kerja dalam kurun waktu 2001-2005 mencatat angka yang berfluktuasi dengan kisaran 67-69 persen setiap tahunnya.

Secara umum, apabila tingginya TPAK dikarenakan tingginya penduduk yang bekerja maka TPAK tersebut menunjukkan kinerja partisipasi angkatan kerja yang baik. Namun bila tingginya TPAK diiringi dengan rendahnya tingkat kesempatan kerja (persentase penduduk yang bekerja), hal ini cukup mengkhawatirkan, karena berarti penduduk yang mencari pekerjaan meningkat yang nantinya dapat memicu tingginya angka pengangguran.

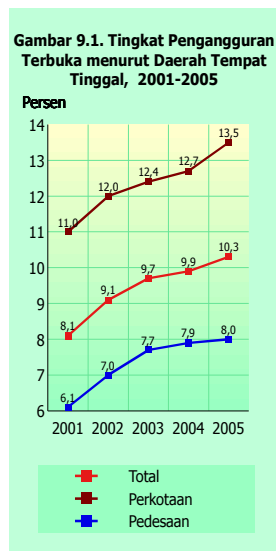
Terjadi perbedaan yang cukup mencolok antara partisipasi angkatan kerja di daerah perkotaan dan daerah perdesaan pada kurun waktu yang sama. TPAK di daerah perdesaan berkisar antara 71-73 persen, sedangkan di daerah perkotaan 62-63 persen. Hal ini disebabkan oleh corak perekonomian Indonesia yang masih agraris yang tercermin di daerah perdesaan, dimana persentase penduduk yang bekerja lebih banyak dibandingkan di perkotaan. Sebagian besar penduduk di perdesaan bekerja sebagai petani.

Kondisi ini dapat tercermin pula dari perbandingan besarnya TKK dan TPT antara perdesaan dan perkotaan. TKK di perdesaan terlihat lebih tinggi, yaitu berkisar antara 92-94 persen, sedangkan di perkotaan TKK berkisar antara 86-90 persen. Sementara itu, TPT di perdesaan berkisar antara 6-8 persen dan di perkotaan berkisar antara 11-14 persen.

Perkembangan kesempatan kerja dari tahun 2001 - 2005 terlihat semakin menurun dan disisi lain pengangguran terbuka semakin meningkat baik di perkotaan maupun perdesaan. Pada tahun 2001, tingkat pengangguran terbuka (TPT) hanya 8,1 persen, setahun kemudian naik 1 persen menjadi 9,1 persen, kemudian tahun 2003 menjadi 9,7 persen dan akhirnya pada tahun 2005 menjadi 10,3 persen. Ini berarti selama hampir lima tahun, telah terjadi peningkatan TPT sekitar 2,2 persen.

Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya, kondisi TPT selalu berbanding terbalik dengan TKK. Pada tahun 2001, TKK sekitar 91,9 persen kemudian pada tahun 2002 menurun menjadi 90,9 persen dan pada tahun berikutnya terus menurun hingga tahun 2005 menjadi 89,7 persen. Keadaan

Selama hampir lima tahun Tingkat Pengangguran (TPT) semakin meningkat dan sebaliknya Tingkat Kesempatan Kerja (TKK) semakin menurun



**Tabel 9.1. Indikator Ketenagakerjaan¹⁾ menurut Daerah Tempat Tinggal
Labour Force Indicators By Region,
2001-2005**

Daerah Tempat Tinggal <i>Region</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TPAK					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	63,0	62,6	62,6	62,6	63,2
Perdesaan/ <i>Rural</i>	73,1	72,0	72,1	71,5	71,9
Jumlah/ <i>Total</i>	68,6	67,8	67,9	67,5	68,0
TPT					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	11,0	12,0	12,4	12,7	13,5
Perdesaan/ <i>Rural</i>	6,1	7,0	7,7	7,9	8,0
Jumlah/ <i>Total</i>	8,1	9,1	9,7	9,9	10,3
TKK					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	89,0	88,0	87,6	87,3	86,5
Perdesaan/ <i>Rural</i>	93,9	93,0	92,3	92,1	92,0
Jumlah/ <i>Total</i>	91,9	90,9	90,3	90,1	89,7

Catatan/*Note* : 1) 2001 - 2004 merupakan kondisi Agustus/*condition August*
2005 merupakan kondisi Februari/*condition February*

Sumber/*source* : Sakernas/*National Labor Force Survey*

ini disebabkan oleh pertumbuhan ekonomi yang lebih didominasi oleh sektor yang cenderung padat modal dan teknologi yang cenderung menyerap sedikit tenaga kerja. Selain itu, kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) yang menyebabkan ongkos produksi naik, berimbas pada Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sebagian pegawai pada beberapa perusahaan.

Apabila dilihat berdasarkan propinsi, selama kurun waktu 2002 - 2005 wilayah yang memiliki TPT lebih dari 10 persen hampir setiap tahunnya adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sedangkan Propinsi yang memiliki TPT yang relatif rendah setiap tahunnya adalah Bali dan NTT yang memiliki TPT kurang dari 5,5 persen setiap tahunnya. Namun kondisi ini belum tentu menunjukkan kesejahteraan yang tinggi di kedua Propinsi tersebut, karena bisa saja jumlah penduduk

**Tabel 9.2. Indikator Ketenagakerjaan ¹⁾ menurut Propinsi
Labour Force Indicators By Province, 2002-2005**

Propinsi	TPAK				TKK				TPT			
	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
NAD	61,80	66,45	62,26	68,44	90,66	91,03	90,65	87,50	9,34	8,97	9,35	12,50
Sumatera Utara	69,96	69,65	68,56	71,94	89,70	88,98	88,92	89,02	10,30	11,02	11,08	10,98
Sumatera Barat	65,38	65,20	64,78	62,53	90,38	89,62	87,26	88,50	9,62	10,38	12,74	11,50
Riau	62,72	63,16	62,20	62,76	90,43	89,26	84,75	86,09	9,57	10,74	15,25	13,91
Jambi	68,00	67,91	67,25	65,97	94,22	93,50	93,96	91,41	5,78	6,50	6,04	8,59
Sumatera Selatan	70,47	74,24	72,22	71,23	91,86	90,92	91,63	91,44	8,14	9,08	8,37	8,56
Bengkulu	70,86	80,11	73,46	75,51	93,55	92,52	93,71	93,85	6,45	7,48	6,29	6,15
Lampung	70,32	70,42	70,17	68,86	91,68	90,86	92,62	93,15	8,32	9,14	7,38	6,85
Bangka Belitung	68,99	66,20	63,75	65,03	94,77	92,63	92,86	91,90	5,23	7,37	7,14	8,10
DKI Jakarta	60,83	60,45	61,93	63,08	85,61	85,14	85,30	85,27	14,39	14,86	14,70	14,73
Jawa Barat	63,33	61,44	62,45	62,88	86,81	87,51	86,31	85,27	13,19	12,49	13,69	14,73
Jawa Tengah	71,16	70,30	71,04	71,18	93,34	92,98	92,28	91,49	6,66	7,02	7,72	8,51
D.I. Yogyakarta	70,17	71,99	71,73	71,95	94,79	94,38	93,74	94,95	5,21	5,62	6,26	5,05
Jawa Timur	68,87	68,91	68,59	69,50	93,57	91,21	92,31	91,55	6,43	8,79	7,69	8,45
Banten	65,38	63,26	62,55	62,95	85,85	85,82	85,69	85,77	14,15	14,18	14,31	14,23
Bali	76,94	77,60	77,16	79,06	95,48	94,64	95,34	95,97	4,52	5,36	4,66	4,03
Nusa Tenggara Barat	72,40	75,93	72,16	70,58	93,06	93,66	92,52	91,07	6,94	6,34	7,48	8,93
Nusa Tenggara Timur	78,47	76,33	77,39	79,45	95,65	95,98	95,52	94,54	4,35	4,02	4,48	5,46
Kalimantan Barat	71,95	77,59	72,63	73,85	91,43	93,47	92,10	91,39	8,57	6,53	7,90	8,61
Kalimantan Tengah	69,49	76,38	69,88	73,21	93,62	92,41	94,41	95,15	6,38	7,59	5,59	4,85
Kalimantan Selatan	74,21	73,17	73,95	71,17	90,78	92,33	93,98	93,82	9,22	7,67	6,02	6,18
Kalimantan Timur	63,66	66,90	61,17	64,73	88,24	90,31	89,61	90,96	11,76	9,69	10,39	9,04
Sulawesi Utara	60,88	57,23	61,32	62,33	88,65	89,21	89,09	85,60	11,35	10,79	10,91	14,40
Sulawesi Tengah	71,69	68,59	68,50	66,90	91,94	95,36	94,15	92,37	8,06	4,64	5,85	7,63
Sulawesi Selatan	62,32	67,06	66,01	63,33	87,71	82,68	84,07	86,42	12,29	17,32	15,93	13,58
Sulawesi Tenggara	69,26	76,96	74,74	71,08	91,67	89,70	90,65	91,08	8,33	10,30	9,35	8,92
Gorontalo	57,90	62,01	61,28	62,84	86,83	89,83	87,71	90,21	13,17	10,17	12,29	9,79
Maluku	65,62	66,61	63,65	59,22	91,92	87,37	88,33	87,70	8,08	12,63	11,67	12,30
Maluku Utara	65,12	73,98	70,03	69,83	84,75	92,50	92,47	91,12	15,25	7,50	7,53	8,88
Papua	76,68	73,64	76,99	78,25	93,99	93,79	92,00	92,88	6,01	6,21	8,00	7,12

Catatan/Note : 1) 2001 - 2004 merupakan kondisi Agustus/condition August
2005 merupakan kondisi Februari/condition February

Sumber/source : Sakernas/National Labor Force Survey

yang bekerja justru kebanyakan adalah pekerja di pertanian atau buruh tidak dibayar. TPT dan TKK di propinsi lainnya dapat terlihat pada tabel berikut.

Sementara apabila kita membandingkan antara TKK laki-laki dan perempuan, terlihat adanya perbedaan yang cukup mencolok. TKK laki-laki cenderung lebih tinggi dari TKK perempuan, pada tahun 2005 TKK perempuan hanya 86,43 sementara TKK laki-laki 91,72. Demikian halnya dengan TPT. TPT laki-laki lebih rendah dari TPT perempuan, misalnya pada tahun 2005, TPT perempuan 13,57 sementara TPT laki-laki 8,28.

Dilihat dari perkembangannya, seperti daerah perkotaan dan perdesaan, TKK laki-laki maupun perempuan semakin menurun dan TPT semakin meningkat. Hal yang sangat meprihatinkan, mengingat faktor ketenagakerjaan

**Tabel 9.3. Indikator Ketenagakerjaan ¹⁾ menurut Jenis Kelamin
*Employment Indicators by Sex, 2001-1005***

Jenis Kelamin Sex	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
TKK					
Laki-Laki/ <i>Male</i>	93,41	92,53	92,11	91,89	91,72
Perempuan/ <i>Female</i>	89,45	88,25	87,32	87,11	86,43
Total/ <i>Male+Female</i>	91,90	90,94	90,33	90,14	89,74
TPT					
Laki-Laki/ <i>Male</i>	6,59	7,47	7,89	8,11	8,28
Perempuan/ <i>Female</i>	10,55	11,75	12,68	12,89	13,57
Total/ <i>Male+Female</i>	8,10	9,06	9,67	9,86	10,26
TPAK					
Laki-Laki/ <i>Male</i>	85,76	85,57	85,68	86,03	85,55
Perempuan/ <i>Female</i>	51,78	50,13	50,19	49,23	50,65
Total/ <i>Male+Female</i>	68,60	67,76	67,86	67,55	68,02

Catatan/*Note* : 1) 2001 - 2004 merupakan kondisi Agustus/*condition August*
2005 merupakan kondisi Februari/*condition February*

Sumber/*source* : Sakernas/*National Labor Force Survey*

berhubungan erat dengan kesejahteraan dan pertumbuhan ekonomi.

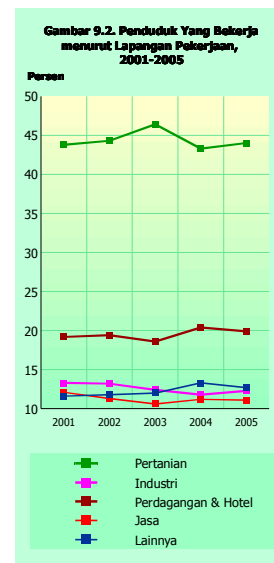
9.2. Keadaan Pekerja

9.2.1. Potensi Sektor Ekonomi

Indonesia merupakan negara yang berkembang dengan corak perekonomian agraris, dimana sebagian besar penduduknya hidup dari sektor pertanian. Hal ini dapat terlihat dalam tabel berikut yang menunjukkan hampir separuh dari penduduk Indonesia bertumpu pada sektor ini.

Dilihat dari perkembangannya sejak tahun 2001 hingga 2005, lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan, diminati penduduk yang bekerja dengan persentase sekitar 43-46 persen, dimana persentase pada tahun 2003 merupakan angka tertinggi yaitu 46,4 persen dan persentase pada tahun 2004 merupakan angka terendah yaitu 43,3 persen. Selanjutnya lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel menempati urutan kedua dengan persentase 18-21 persen, dengan persentase terendah terjadi pada tahun 2003 (18,6 persen) dan tertinggi pada tahun 2004 (20,4 persen). Hal ini tampaknya menggambarkan terjadinya perubahan minat penduduk dari lapangan pekerjaan pertanian, kehutanan, perburuan dan perikanan ke lapangan pekerjaan perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel pada tahun 2003 dan 2004. Sektor yang diminati pada urutan ketiga adalah industri pengolahan yang terdiri dari industri migas dan nonmigas, dengan persentase 11-14 persen dengan pola yang turun naik, dimana persentase pada tahun 2004 menunjukkan angka yang paling rendah yaitu 11,8 persen.

Sementara lapangan pekerjaan yang hanya diminati penduduk dengan persentase selalu di bawah 1 persen, adalah lapangan pekerjaan listrik, gas dan air dengan pola yang terlihat sangat konstan yaitu sekitar 0,2 persen setiap tahun. Sedangkan distribusi persentase penduduk menurut lapangan pekerjaan lainnya dapat terlihat pada tabel 9.4 di atas.



Tabel 9.4. Persentase Penduduk yang Bekerja¹⁾ menurut Lapangan Pekerjaan
Percentage of Population who Worked By Main Industry, 2001-2005

Lapangan Pekerjaan <i>Main Industry</i>	2001	2002	2003	2004	2005
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery</i>	43,8	44,3	46,4	43,3	44,0
Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	1,2 ²⁾	0,7	0,8	1,1	0,9
Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	13,3	13,2	12,4	11,8	12,3
Listrik, Gas dan Air <i>Electricity, Gas and Water</i>	-	0,2	0,2	0,2	0,2
Bangunan <i>Construction</i>	4,2	4,7	4,4	4,8	4,7
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel <i>Wholesale trade, Retail Trade, Restaurant and Hotel</i>	19,2	19,4	18,6	20,4	19,9
Angkutan, pergudangan dan Komunikasi <i>Transportation, Storage and Communication</i>	4,9	5,1	5,3	5,8	5,8
Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan <i>Financing, Insurance, Real Estate and Business Service</i>	1,2	1,1	1,4	1,2	1,1
Jasa Kemasyarakatan <i>Community, Social and Personal Service</i>	12,1	11,3	10,6	11,2	11,1

Catatan/Note : 1) 2001 - 2004 merupakan kondisi Agustus/*condition August*
 2005 merupakan kondisi Februari/*condition February*

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian ditambah Listrik, Gas dan Air
Summary between Mining and Quarrying with Electricity, Gas and Water

Sumber/source : Sakernas/*National Labor Force Survey*

9.2.2. Upah yang Diterima Pekerja

Dalam rangka pemerataan pembangunan ketenagakerjaan, pemerintah telah menciptakan suatu alat ukur yang berfungsi sebagai standar (patok duga) bagi setiap perusahaan untuk menentukan besaran upah yang layak diterima oleh semua pekerja. Penetapan besaran upah tersebut dilakukan oleh Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Depnakertrans) Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial melalui sebuah pengukuran yang menyesuaikan dengan

tingkat biaya hidup pekerja yang dikenal dengan Upah Minimum Regional (UMR). Namun instrumen tersebut sampai saat ini masih tidak lebih sebagai pita pengaman bagi perusahaan saja, sebab jika perusahaan mempunyai kemampuan yang memadai, maka upah yang dibayarkan seharusnya bisa lebih tinggi dari UMR yang telah ditetapkan. Hanya saja pemberlakuan UMR tersebut terbatas pada perusahaan-perusahaan besar saja, sementara hanya sebagian kecil pekerja yang tertampung pada perusahaan-perusahaan tersebut, sehingga upah yang diterima para pekerja di Indonesia masih banyak di bawah UMR yang ditetapkan. Adapun perkembangan tingkat upah pekerja yang merupakan rata-rata Upah Minimum Propinsi (UMP) beserta Kebutuhan Hidup Minimum (KHM) sejak tahun 2001 hingga tahun 2005, dapat terlihat dalam tabel berikut.

Rata-rata UMP pada tahun 2001 hanya sekitar Rp. 307 000, sedangkan KHM Rp. 343 000. Setahun berikutnya UMP naik menjadi sekitar Rp. 363 000, sementara KHM sekitar Rp. 417 000. Kondisi ini terus meningkat hingga tahun 2005, dimana UMP sebesar Rp. 508 000 dan KHM Rp. 602 000.

Bila dilihat perkembangannya, seharusnya UMP seiring dengan laju inflasi, ketika harga-harga naik tidak terlalu tinggi, UMP juga naik tidak terlalu tinggi dan ketika harga-harga

Tabel 9.5. UMP, KHM dan Laju Inflasi
UMP, KHM and Inflation Rate,
2001-2005, (Ribu Rupiah)/ (Thousand Rupiahs)

Tahun <i>Year</i>	Rata-Rata UMP <i>Average of UMP</i>	Rata-Rata KHM <i>Average of KHM</i>	Pertumbuhan UMP <i>UMPs Growth</i>	Laju Inflasi <i>Inflation Rate</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
2001	307,17	342,79	-	12,55
2002	362,74	416,89	18,09	10,03
2003	414,72	478,42	14,33	5,06
2004	458,50	494,94	10,56	6,40
2005	507,70	602,15	10,73	17,11

Sumber/Source: Depnakertrans, Ditjen Pembinaan Hubungan Industrial dan Warta IHK

melonjak tinggi, UMP pun mengalami pertumbuhan yang cukup tinggi. Namun kenyataan hal ini tidak terjadi, misalnya pada tahun 2005, laju inflasi mencapai angka hingga dua digit (17,11 persen), pertumbuhan UMP hanya sebesar 10,73 persen. Sementara pada tahun 2004, laju inflasi hanya 6,40 persen, pertumbuhan UMP sebesar 10,56 persen.

Upah yang diterima pekerja sudah selayaknya diberikan secara adil dan berimbang. Adil yaitu bahwa upah tersebut harus sesuai atau sebanding dengan jasa kerja yang diberikan oleh masing-masing pekerja dalam proses produksi ataupun sesuai dengan kebutuhan hidup masing-masing daerah. Mereka yang memberikan hasil atau kontribusi lebih besar patut menerima upah yang lebih tinggi. Berimbang artinya mereka yang menduduki jabatan yang serupa harus menerima upah yang kira-kira sama yang berarti tidak memandang jenis kelamin, suku bangsa, ras dan lain-lain. Namun tidak dapat dipungkiri bahwa adakalanya sistem pengupahan masih mengalami ketidakadilan dan ketidakberimbangan, antara lain dijumpai sistem pengupahan antara pekerja laki-laki dan perempuan yang selalu terlihat perbedaan.

Lain halnya dengan sistem pengupahan antara daerah perkotaan dan perdesaan, walaupun terlihat adanya perbedaan tetapi masih menunjukkan keadilan. Hal ini dikarenakan kebutuhan hidup di perdesaan memang relatif lebih rendah dibandingkan daerah perkotaan. Tabel berikut dapat menggambarkan tingkat upah pekerja menurut daerah tempat tinggal.

Seiring dengan terjadinya inflasi setiap tahun yang ditandai oleh peningkatan harga-harga barang, kebutuhan hidup semakin meningkat. Hal ini tentu saja mempengaruhi terhadap besaran upah. Sejak tahun 2001 hingga 2004 terlihat bahwa telah terjadi pergeseran besaran upah dari yang rendah ke upah yang lebih tinggi. Seperti yang terjadi pada tahun 2001, persentase penduduk yang memiliki upah kurang dari Rp. 200 000,- adalah 17,7 persen. Pada tahun 2002 turun menjadi 14,5 persen dan pada akhirnya hingga tahun 2004 semakin turun menjadi 9,9 persen. Demikian halnya

persentase penduduk dengan upah Rp. 200 000,- sampai Rp. 599 999,- pada tahun 2001 sebesar 49,2 persen, pada tahun 2002 turun menjadi 44,8 persen, hingga akhirnya pada tahun 2004 menjadi 38,5 persen.

Tabel 9.6. Distribusi Pekerja¹⁾ menurut Upah dan Daerah Tempat Tinggal
Distribution of Population Who Worked By Value of Wage and Region, 2001-2005 (%)

Daerah Tempat Tinggal <i>Region</i>	Besarnya Upah (Rp)/ <i>Value of Wage (Rp)</i>				Rata-Rata Upah Wage Average (Rp)
	< 200 000	200 000- 599 999	600 000- 999 999	≥ 1000 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2001					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	11,2	48,1	25,2	15,5	612 219
Perdesaan/ <i>Rural</i>	27,6	50,6	15,2	6,6	408 718
Perkotaan+Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	17,7	49,2	21,2	11,9	530 993
Tahun 2002					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	8,0	41,9	30,1	20,0	694 943
Perdesaan/ <i>Rural</i>	24,3	49,2	17,7	8,8	454 315
Perkotaan+Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	14,5	44,8	25,2	15,5	599 769
Tahun 2003					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	5,9	33,6	34,5	26,0	804 548
Perdesaan/ <i>Rural</i>	20,1	48,1	22,3	10,5	498 276
Perkotaan+Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	11,5	39,2	29,3	20,0	684 915
Tahun 2004					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	4,9	33,0	33,3	28,8	850 428
Perdesaan/ <i>Rural</i>	17,3	46,4	23,4	12,9	553 932
Perkotaan+Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	9,9	38,5	29,3	22,3	729 516
Tahun 2005					
Perkotaan/ <i>Urban</i>	6,1	33,3	32,2	28,4	845 603
Perdesaan/ <i>Rural</i>	18,6	46,1	22,7	12,6	542 842
Perkotaan+Perdesaan <i>Urban + Rural</i>	11,3	38,6	28,3	21,8	719 563

Catatan/Note : 1) 2001 - 2004 merupakan kondisi Agustus/*condition August*
 2005 merupakan kondisi Februari/*condition February*
 2) Sektor Pertambangan dan Penggalian ditambah Listrik, Gas dan Air
Summary between Mining and Quarrying with Electricity, Gas and Water

Sumber/source : Sakernas/*National Labor Force Survey*

Kondisi ini berbeda dengan persentase penduduk yang memiliki upah lebih dari Rp. 600 000,- yang semakin lama semakin meningkat. Pada tahun 2001, persentase penduduk yang memiliki upah lebih dari satu juta hanya 11,9 persen saja, pada tahun 2002 meningkat menjadi 15,5 persen kemudian pada tahun 2003 meningkat 4,5 persen menjadi 20,0 persen, hingga akhirnya pada tahun 2004 menjadi 22,3 persen. Namun pada tahun 2005 persentase penduduk dengan upah kurang dari Rp. 200 000 naik lagi menjadi 11,3 persen dan persentase penduduk yang memiliki upah lebih dari satu juta turun menjadi 21,8 persen.

Pada tahun 2005, rata-rata upah pekerja di pedesaan hanya Rp 542 842,- sementara di perkotaan Rp 845 603,-

Peningkatan upah secara nominal juga dapat terlihat dari rata-rata upah yang cenderung terus meningkat baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada tahun 2001 dan 2002 rata-rata upah tercatat di atas Rp. 500 000, kemudian pada tahun 2003 menjadi di atas Rp. 600 000 hingga akhirnya tahun 2004 hingga 2005 mencapai angka di atas Rp. 700 000. Namun hal kenaikan upah secara nominal belum tentu menunjukkan peningkatan kesejahteraan, karena seperti yang telah disebutkan di atas, harga-harga kebutuhan hidup juga meningkat.

Bila dibandingkan antara daerah perkotaan dan pedesaan, terlihat ada kecenderungan lebih tingginya upah yang diterima pekerja di perkotaan. Pada tahun 2001, persentase penduduk yang memiliki upah kurang dari Rp. 200 000,- di perkotaan hanya 11,2 persen, sementara di pedesaan sekitar 27,6 persen. Sedangkan persentase penduduk yang menerima upah lebih dari Rp. 1 000 000,- di perkotaan adalah 15,5 persen sementara di pedesaan hanya 6,6 persen. Perbedaan ini masih terlihat pada tahun-tahun berikutnya.

Ukuran lain yang dapat menunjukkan perbedaan upah yang diterima pekerja di pedesaan dan perkotaan adalah rata-rata upah. Misalnya pada tahun 2005, rata-rata upah pekerja di pedesaan hanya Rp. 542 842, sementara di perkotaan Rp. 845 603. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya, hal ini disebabkan biaya hidup di pedesaan lebih

rendah dibandingkan perkotaan, disamping lebih banyaknya pekerja tak dibayar dan pekerja di lapangan pekerjaan pertanian di perdesaan. Dengan kata lain, perbedaan pengupahan di perdesaan dan perkotaan disebabkan oleh jenis pekerjaan yang berbeda antara perkotaan dan perdesaan.

Besarnya upah antara laki-laki dan perempuan terlihat adanya perbedaan yang cukup berarti. Kondisi tersebut dapat disimak pada tabel 9.7. Pada tahun 2001 dan 2002, persentase perempuan jauh lebih tinggi dari pada laki-laki pada saat upah yang didapatkan kurang dari Rp. 200 000,-, sedangkan laki-laki memiliki persentase yang lebih tinggi pada saat tingkat upah di atas Rp. 200 000,-. Hal ini juga nampak ketika melihat rata-rata upah. Upah laki-laki selalu lebih besar dari perempuan. Misalnya pada tahun 2003 hingga 2005, upah laki-laki mencapai angka di atas Rp. 700 000,-, sementara perempuan tidak lebih dari Rp. 580 000,-.

Pada tahun 2001, persentase laki-laki yang mendapatkan upah kurang dari Rp. 200 000,- hanya 11,0 persen disisi lain perempuan mencapai 32,4 persen. Perbedaan yang mencolok ini masih terus terjadi pada tahun berikutnya, dimana persentase laki-laki dengan upah kurang dari Rp. 200 000,- hanya berkisar antara 5 sampai 11 persen, sementara perempuan sudah di atas 19 persen.

Kondisi ini menggambarkan ketimpangan sistem pengupahan yang cukup jelas antara pekerja laki-laki dan perempuan. Namun menjelang tahun 2003, persentase perempuan dengan upah Rp. 200 000,- sampai Rp. 599 999,- mulai lebih tinggi daripada laki-laki, yaitu 40,8 persen, sedangkan laki-laki 38,6 persen. Demikian halnya dengan kondisi tahun 2004, dimana persentase laki-laki dengan upah Rp. 200 000,- sampai Rp. 599 999,- hanya 36,6 persen sedangkan perempuan 42,8 persen.

Ketimpangan pengupahan ini dapat disebabkan oleh perbedaan jenis pekerjaan yang banyak dilakukan laki-laki dan perempuan. Namun apabila telah terjadi perbedaan pengupahan antara laki-laki dan perempuan dengan jenis

Perbedaan antara upah yang diterima pekerja laki-laki dengan pekerja perempuan cukup besar. Upah pekerja laki-laki di atas Rp 700.000,- sementara upah pekerja perempuan tidak lebih dari Rp 580.000,-.

pekerjaan yang sama, ini berarti telah terjadi pelanggaran terhadap Undang-Undang no. 80 tahun 1957 pasal 1 mengenai pengupahan yang sama untuk pekerjaan yang sama tanpa memandang jenis kelamin.

Tabel 9.7. Distribusi Pekerja ¹⁾ Menurut Upah dan Jenis Kelamin
Distribution of Population Who Worked By Value of Wage and Sex, 2001-2005 (%)

Jenis Kelamin Sex	Besar Upah (Rp)/ Value of Wage (Rp)				Rata-Rata Upah Wage Average (Rp)
	< 200 000	200 000- 599 999	600 000- 999 999	≥ 1000 000	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Tahun 2001					
Laki-Laki/Male	11,0	51,6	24,0	13,3	582 236
Perempuan/Female	32,4	43,7	15,2	8,8	419 004
Laki-Laki+Perempuan Male+Female	17,7	49,2	21,2	11,9	530 993
Tahun 2002					
Laki-Laki/Male	8,9	45,6	28,1	17,4	654 371
Perempuan/Female	27,2	42,9	18,6	11,3	475 192
Laki-Laki+Perempuan Male+Female	14,5	44,8	25,2	15,5	599 769
Tahun 2003					
Laki-Laki/Male	7,2	38,6	32,3	21,9	739 473
Perempuan/Female	22,2	40,8	21,9	15,1	549 098
Laki-Laki+Perempuan Male+Female	11,5	39,2	29,3	20,0	684 915
Tahun 2004					
Laki-Laki/Male	5,9	36,6	33,0	24,5	793 864
Perempuan/Female	19,7	42,8	20,5	17,0	576 132
Laki-Laki+Perempuan Male+Female	9,9	38,5	29,3	22,3	729 516
Tahun 2005 ¹⁾					
Laki-Laki/Male	6,7	36,9	32,2	24,2	792 163
Perempuan/Female	21,8	42,4	19,3	16,4	555 726
Laki-Laki+Perempuan Male+Female	11,3	38,6	28,3	21,8	719 563

Catatan/Note : 1) 2001-2004 merupakan kondisi Agustus/condition August

2005 merupakan kondisi Februari/condition February

2) Sektor Pertambangan dan Penggalian ditambah Listrik, Gas dan Air

Summary between Mining and Quarrying with Electricity, Gas and Water

Sumber/source : Sakernas/National Labor Force Survey

9.2.3. Elastisitas Kesempatan Kerja

Seperti kita ketahui bahwa tidak selamanya kenaikan output suatu sektor ekonomi selalu diikuti kenaikan kesempatan kerja pada sektor yang bersangkutan. Hal ini mungkin disebabkan perkembangan teknologi yang ditandai dengan terciptanya alat-alat industri yang lebih efisien dan efektif yang mampu menghasilkan output lebih banyak dibandingkan dengan tenaga manusia, atau dengan kata lain sektor tersebut lebih terfokus pada usaha yang padat modal bukan padat karya.

Besarnya pengaruh dari pergeseran peran sektor ekonomi terhadap kesempatan kerja dapat terlihat dari tingkat elastisitas. Tingkat elastisitas kesempatan kerja dihitung dengan cara membandingkan antara laju pertumbuhan kesempatan kerja dengan laju pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDB).

Berdasarkan hasil perhitungan PDB, rata-rata pertumbuhan PDB selama kurun waktu 2002-2004 adalah sebesar 5 persen per tahun. Sementara pertumbuhan kesempatan kerja selama periode yang sama adalah sebesar 1,13 persen pertahun. Sehingga tingkat elastisitas kesempatan kerja di Indonesia selama tahun 2002-2004 adalah sebesar 0,23 persen, yang berarti bahwa setiap kenaikan output dalam hal ini PDB sebanyak 1 persen akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,23 persen.

Selama kurun waktu 2000-2004, lapangan pekerjaan pertanian mencatat elastisitas yang negatif sebesar -0,01 persen. Hal ini menunjukkan bahwa lapangan pekerjaan tersebut inelastis, karena pertumbuhan nilai tambah justru mengurangi kesempatan kerja. Demikian pula dengan lapangan pekerjaan industri yang terdiri dari industri pengolahan; pertambangan dan penggalian; listrik, gas dan air serta bangunan dengan elastisitas sebesar - 0,24 persen. Ini berarti bahwa setiap kenaikan nilai tambah dari gabungan 4 lapangan pekerjaan tersebut justru akan mengurangi kesempatan kerja sebesar 0,24 persen.

*Tingkat elastisitas
kesempatan kerja di
Indonesia tercatat sebesar
0,23 persen selama tahun
2002-2004.*

Tabel 9.8. Elastisitas Kesempatan Kerja
Employment elasticities , 2002-2004

Lapangan Pekerjaan <i>Main Industry</i>	Rata-Rata Laju Pertumbuhan PDB (%)	Rata-Rata Laju Kesempatan Kerja (%)	Elastisitas Kesempatan Kerja
(1)	(2)	(3)	(4)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery</i>	4,51	-0,03	-0,01
Industri ¹⁾ <i>Manufacturing</i>	3,92	-0,93	-0,24
Jasa-jasa ²⁾ <i>Services</i>	6,52	3,51	0,54
Jumlah/ <i>Total</i>	5,03	1,13	0,22

Catatan/Note : 1) Industri pengolahan; Pertambangan dan penggalan; Listrik, gas dan air; Bangunan/ *Manufacturing industry: Mining and Quarrying: Electricity, gas and water: Construction*
2) Perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; Angkutan, pergudangan dan komunikasi; Keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan; Jasa kemasyarakatan/ *Wholesale, trade, retail trade, restaurant and hotel: Transportation, storage, and communication: Financing, insurance, real estate and business service: Community, social and personal*

Sementara itu, nilai tambah lapangan pekerjaan jasa-jasa yang terdiri dari perdagangan besar, eceran, rumah makan dan hotel; angkutan, pergudangan dan komunikasi; keuangan, asuransi, usaha persewaan, bangunan, tanah dan jasa perusahaan; jasa kemasyarakatan mengalami rata-rata pertumbuhan sebesar 6,56 persen (periode 2002-2004). Di sisi kesempatan kerja, lapangan pekerjaan ini mencatat rata-rata pertumbuhan sebesar 3,51 persen, sehingga elastisitasnya tercatat sebesar 0,54 persen, yang berarti bahwa kenaikan satu persen nilai tambah akan menciptakan kesempatan kerja sebesar 0,54 persen.

9.2.4. Produktivitas Pekerja

Kualitas dari seorang pekerja dapat terukur berdasarkan kemampuannya untuk menghasilkan barang dan jasa, dimana ukuran tersebut dinamakan produktivitas. Beberapa faktor

yang dapat meningkatkan produktivitas seseorang diantaranya pendidikan, pelatihan, pengalaman, keterampilan dan lain-lain.

Salah satu cara untuk mengukur produktivitas adalah membuat rasio antara PDB dengan jumlah pekerja. Produktivitas secara umum (termasuk minyak bumi dan gas) lebih besar daripada produktivitas sektor nonmigas. Hal ini dapat diartikan bahwa nilai output yang dihasilkan oleh sektor migas lebih tinggi dibandingkan dengan sektor nonmigas. Disamping itu, sektor migas lebih kapital intensif dibandingkan dengan sektor nonmigas yang antara lain mencakup sektor informal. Perbedaan ini akan semakin nampak bila diamati tingkat produktivitas menurut propinsi. Daerah-daerah yang merupakan penghasil migas terbesar akan memiliki tingkat produktivitas yang lebih tinggi, seperti misalnya Naggroe Aceh Darussalam, Riau dan Kalimantan Timur.

Tingkat produktivitas daerah penghasil migas cenderung lebih tinggi, seperti NAD, Riau dan Kalimantan Timur.

Pada tahun 2004, produktivitas di NAD jika memperhitungkan migas adalah sekitar 26 juta rupiah per pekerja namun apabila tidak memperhitungkan migas hanya sekitar 14 juta rupiah per pekerja. Di Riau, produktivitas pekerja jika memperhitungkan migas adalah sekitar 52 juta rupiah per pekerja namun apabila tidak memperhitungkan migas hanya sekitar 28 juta rupiah per pekerja. Sedangkan di Kaltim produktivitas pekerja jika memperhitungkan migas adalah sekitar 87 juta rupiah per pekerja namun apabila tidak memperhitungkan migas hanya sekitar 38 juta rupiah per pekerja.

Sama halnya dengan ketiga propinsi di atas, DKI Jakarta dan Papua memiliki nilai produktivitas yang lebih tinggi dibandingkan propinsi lainnya, namun perbedaannya terletak pada perbandingan produktivitas yang memperhitungkan migas dan tanpa migas. Pada kedua propinsi ini, produktivitas dengan migas atau tanpa migas terlihat hampir sama. Di DKI Jakarta, tingginya produktivitas lebih disebabkan karena nilai PDRB yang sangat besar mengingat DKI Jakarta merupakan ibu kota negara, dimana mobilitas barang dan manusia sangat mudah terjadi yang ditunjang oleh perkembangan teknologi memungkinkan roda perekonomian bergerak lebih cepat

dibandingkan daerah lainnya, sehingga walaupun jumlah pekerja sangat banyak produktivitas tetap tinggi. Sedangkan di Papua, tingginya produktivitas lebih disebabkan oleh PDRB yang besar namun tidak diiringi oleh banyaknya pekerja.

Tabel 9.9. Produktivitas Menurut Propinsi dan Komoditas
Productivity By Province and Commodity
(Juta Rupiah Per Pekerja) / (Million Rupiahs Per Worker),
2002-2004

Propinsi <i>Province</i>	2002		2003 ^{x)}		2004 ^{xx)}	
	Dengan migas	Tanpa migas	Dengan migas	Tanpa migas	Dengan migas	Tanpa migas
	<i>With Oil</i>	<i>Without Oil</i>	<i>With Oil</i>	<i>Without Oil</i>	<i>With Oil</i>	<i>Without Oil</i>
	<i>Gas</i>	<i>Gas</i>	<i>Gas</i>	<i>Gas</i>	<i>Gas</i>	<i>Gas</i>
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
NAD	27,52	14,08	26,74	13,42	26,05	14,30
Sumatera Utara	15,36	15,19	15,91	15,75	17,00	16,87
Sumatera Barat	14,51	14,51	14,71	14,71	15,59	15,59
Riau	48,55	24,29	48,74	25,48	51,66	28,24
Jambi	9,79	8,47	10,21	8,87	10,42	9,15
Sumatera Selatan	13,88	9,57	14,50	10,08	15,38	10,87
Bengkulu	7,08	7,08	7,31	7,31	8,18	8,18
Lampung	8,39	8,14	8,81	8,54	9,02	8,80
Bangka Belitung	15,99	15,99	16,21	16,21	15,88	15,88
DKI Jakarta	76,62	76,24	78,02	77,71	79,82	79,53
Jawa Barat	14,66	13,31	15,40	14,06	15,88	14,62
Jawa Tengah	8,12	7,64	8,46	7,94	8,74	8,19
D.I. Yogyakarta	8,93	8,93	9,08	9,08	9,49	9,49
Jawa Timur	12,84	12,81	13,42	13,39	13,94	13,90
Banten	15,31	15,31	16,22	16,22	16,72	16,72
Bali	10,38	10,38	10,62	10,62	10,88	10,88
Nusa Tenggara Barat	7,23	7,23	7,13	7,13	8,10	8,10
Nusa Tenggara Timur	4,65	4,65	4,74	4,74	4,87	4,87
Kalimantan Barat	11,01	11,01	11,07	11,07	12,51	12,51
Kalimantan Tengah	14,08	14,08	14,58	14,58	16,12	16,12
Kalimantan Selatan	12,75	12,39	12,95	12,61	13,02	12,69
Kalimantan Timur	86,59	34,27	81,04	33,14	87,45	37,58
Sulawesi Utara	14,19	13,62	14,62	14,05	13,93	13,41
Sulawesi Tengah	9,73	9,73	10,44	10,44	11,19	11,19
Sulawesi Selatan	10,91	10,87	11,37	11,32	11,71	11,66
Sulawesi Tenggara	8,16	8,16	8,31	8,31	9,04	9,04
Gorontalo	5,78	5,78	5,49	5,49	5,84	5,84
Maluku	6,40	6,37	6,74	6,71	6,95	6,92
Maluku Utara	7,21	7,21	5,83	5,83	6,06	6,06
Papua	23,58	22,59	23,54	22,47	21,65	20,58
Indonesia	16,43	14,68	17,02	15,34	17,72	16,13

Sumber/Source : diolah dari Sakernas dan Pendapatan Nasional

Ketenagakerjaan

Apabila dilihat berdasarkan lapangan pekerjaan, pertambangan dan penggalian memiliki produktivitas tertinggi, dengan nilai di atas 155 juta rupiah per tahun pekerja, dimana tahun 2002 mencapai angka tertinggi yaitu sebesar 269 juta rupiah per pekerja dan terendah pada tahun 2004 yaitu 155 juta rupiah per pekerja. Pada urutan kedua, Lapangan pekerjaan keuangan, asuransi, usaha persewaan bangunan, tanah dan jasa perusahaan mencatat nilai produktivitas sebesar 107 juta rupiah hingga 156 juta rupiah per pekerja. Sedangkan pada posisi terendah, ditempati oleh lapangan pekerjaan Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan

Tabel 9.10. Produktivitas Menurut Lapangan Pekerjaan
Productivity By Main Industry
(Juta Rupiah Per Pekerja) / (Million Rupiahs Per Worker),
2002-2004

Lapangan Pekerjaan <i>Main Industry</i>	2002	2003	2004 ^{x)}	2005 ^{xx)}
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, Perburuan dan Perikanan <i>Agriculture, Forestry, Hunting and Fishery</i>	5,73	5,65	6,23	6,08
Pertambangan dan Penggalian <i>Mining and Quarrying</i>	268,96	229,85	155,27	201,08
Industri Pengolahan <i>Manufacturing Industry</i>	34,63	38,43	42,38	42,2
Listrik, Gas dan Air <i>Electricity, Gas and Water</i>	55,35	69,08	47,93	62,08
Bangunan <i>Construction</i>	19,76	22,22	21,47	23,41
Perdagangan Besar, Eceran, Rumah Makan dan Hotel <i>Wholesale trade, Retail Trade, Restaurant and Hotel</i>	13,68	14,86	14,18	15,58
Angkutan, pergudangan dan Komunikasi <i>Transportation, Storage and Communication</i>	16,3	17,2	17,47	19,71
Keuangan, Asuransi, Usaha persewaan Bangunan, Tanah dan Jasa Perusahaan <i>Financing, Insurance, Real Estate and Business Service</i>	132,02	107,24	134,16	155,31
Jasa Kemasyarakatan <i>Community, Social and Personal Service</i>	13,42	14,67	14,4	15,13

Sumber/Source : diolah dari Sakernas dan Indikator Ekonomi

dengan nilai produktivitas tidak lebih dari 6,5 juta rupiah per tahun pekerja. Angka tersebut jauh di bawah produktivitas lapangan pekerjaan lainnya.

Berdasarkan hal tersebut, diperlukan suatu usaha yang mampu menciptakan penambahan output misalnya dengan cara meningkatkan investasi dan memanfaatkan sumber daya alam secara optimal dengan mengembangkan faktor teknologi industri yang berorientasi pada pertanian serta membangun tenaga kerja yang terampil dan unggul agar produktivitas di lapangan pekerjaan pertanian meningkat.

<http://www.bps.go.id>

<http://www.bp.go.id>
PENUTUP

10

Perekonomian global yang meningkat selama tahun 2004, mengalami perlambatan pada tahun 2005. Melemahnya kinerja perekonomian global tersebut disebabkan melambungnya harga minyak mentah yang mencapai US \$ 70 per barel. Menurut Dana Moneter Internasional (IMF), pertumbuhan ekonomi dunia pada tahun 2005 diperkirakan hanya sebesar 4,3 persen lebih rendah dibandingkan tahun 2004 sebesar 5,1 persen. Melemahnya perekonomian global juga diikuti oleh meningkatnya laju inflasi. Laju inflasi baik untuk negara-negara maju maupun negara-negara berkembang selama tahun 2005 meningkat dibanding tahun sebelumnya.

Kondisi perekonomian global yang kurang menguntungkan berdampak pada perekonomian Indonesia. Meningkatnya harga minyak mentah di pasaran internasional ditambah pengetatan kebijakan moneter global menggoyahkan kestabilan ekonomi Indonesia yang selama tahun 2004 sudah cukup baik. Kinerja beberapa sektor ekonomi seperti sektor pertanian, sektor industri pengolahan, sektor bangunan, sektor pengangkutan & komunikasi serta sektor keuangan, persewaan dan jasa perusahaan mengalami perlambatan dibanding tahun sebelumnya. Demikian pula dengan pertumbuhan investasi yang pada tahun 2004 cukup tinggi, pada tahun 2005 juga mengalami perlambatan. Namun demikian secara keseluruhan ekonomi Indonesia pada tahun 2005 masih tumbuh sebesar 5,6 persen, lebih tinggi dibanding tahun 2004 sebesar 5,1 persen. Pertumbuhan tersebut terjadi pada semua sektor ekonomi dengan pertumbuhan tertinggi dipegang oleh sektor pengangkutan dan komunikasi sebesar 12,97 persen.

Untuk menjaga kesinambungan fiskal yang disebabkan tingginya harga minyak dunia maka pemerintah terpaksa menaikkan harga BBM pada tahun 2005 sebanyak 2 kali. Kenaikan harga BBM kedua pada bulan Oktober yang mencapai 126 persen (rata-rata) mengakibatkan melonjaknya harga barang dan jasa. Kenaikan harga BBM juga menyebabkan terganggunya pasokan dan distribusi yang berakibat pada tingginya kenaikan harga atau laju inflasi. Laju inflasi pada tahun 2005 menembus angka dua digit mencapai 17,11 persen,

Penutup

hampir tiga kali lipat laju inflasi tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6,40 persen. Laju inflasi tertinggi terjadi pada kelompok pengeluaran transpor dan komunikasi yang mencapai 44,75 persen.

Di sisi moneter, perkembangan uang primer selama tahun 2005 meskipun mengalami peningkatan namun masih berada dibawah target indikatifnya. Jumlah uang primer pada tahun 2005 (kondisi Desember) tercatat sebesar Rp 241,6 triliun atau meningkat sebesar 21,13 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya. Sementara jumlah uang beredar pada tahun 2004 (posisi Desember) tercatat sebesar Rp. 1.203,2 triliun atau meningkat sebesar 16,42 persen dibanding periode yang sama tahun sebelumnya.

Nilai tukar rupiah terhadap dolar AS selama tahun 2005 cenderung melemah. Pelemahan rupiah tersebut selain merupakan dampak dari kenaikan suku bunga the Fed juga karena meningkatnya permintaan valuta asing untuk pembiayaan impor dan pembayaran utang luar negeri. Secara rata-rata nilai tukar rupiah pada tahun 2005 (di pasaran Jakarta) tercatat sebesar Rp 9.739,- melemah dibanding tahun sebelumnya dengan rata-rata sebesar Rp 8.981,-. Sementara itu suku bunga SBI baik 1 bulan maupun 3 bulan meningkat cukup signifikan. Suku bunga SBI 1 bulan dan 3 bulan yang pada Desember 2004 masing-masing hanya sebesar 7,43 persen dan 7,29 persen meningkat menjadi 12,75 persen dan 12,83 persen pada posisi yang sama tahun 2005.

Di bidang perdagangan luar negeri, kinerja ekspor Indonesia mengalami pertumbuhan lebih tinggi dibanding pertumbuhan tahun sebelumnya. Nilai ekspor Indonesia pada tahun 2005 mencapai US \$ 85.660,0 juta atau mengalami peningkatan sebesar 19,66 persen dibanding tahun sebelumnya. Meningkatnya nilai ekspor tersebut terjadi baik untuk ekspor migas maupun non migas dengan peningkatan masing-masing sebesar 22,92 persen dan 18,75 persen. Dilihat dari negara tujuan ekspor, Jepang merupakan negara pengeksport terbesar produk Indonesia, disusul Amerika Serikat dan Singapura.

Seiring dengan meningkatnya kinerja ekspor, nilai impor Indonesia juga mengalami peningkatan. Nilai impor pada tahun 2005 mencapai US \$ 57.700,9 juta, meningkat sebesar 24,02 persen dibanding tahun 2004. Peningkatan nilai impor terjadi untuk migas maupun non migas. Peningkatan nilai impor migas terutama dipicu oleh terus meningkatnya harga minyak mentah dunia yang mencapai US \$ 70 per barelnya. Pada tahun 2005 sebagian besar impor Indonesia (77,63 persen) merupakan bahan baku yang belum tersedia di dalam negeri, disusul barang modal sebesar 14,36 persen dan sisanya barang konsumsi. Sementara itu neraca perdagangan Indonesia selama tahun 2005 masih surplus sebesar US \$ 27.959,1 juta atau meningkat sebesar 10,12 persen dibanding tahun 2004. Peningkatan tersebut terutama didorong oleh meningkatnya surplus komoditas non migas sebesar 23,83 persen, sedangkan surplus komoditi migas justru menurun lebih dari 50 persen.

Investasi baik dalam negeri maupun luar negeri yang sempat menurun pada tahun 2004, kembali mengalami peningkatan pada tahun 2005. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) tahun 2005 mencapai Rp. 50,6 triliun atau meningkat sebesar 37,63 persen. Demikian pula dengan Penanaman Modal Asing (PMA) yang meningkat sebesar 26,29 persen dibanding tahun 2004 dengan nilai sebesar US \$ 13,0 miliar. Meningkatnya nilai investasi domestik maupun asing ini tentu sangat menggembirakan karena investasi merupakan salah satu penggerak perekonomian.

Sementara itu sektor pariwisata yang mulai menunjukkan titik cerah karena kondisi keamanan yang cukup stabil selama tahun 2004, pada tahun 2005 kembali melemah. Peledakan bom oleh teroris kembali terjadi di Bali pada bulan Oktober 2005. Peristiwa ini langsung berdampak pada menurunnya jumlah kunjungan wisman ke Indonesia terutama pulau Bali padahal mendekati akhir tahun biasanya merupakan saat para wisatawan berlibur. Jumlah kunjungan wisman selama tahun 2005 tercatat sebesar 5 juta orang atau menurun sebesar 6,0 persen dibanding tahun 2004. Menurunnya jumlah wisman yang datang ke Indonesia pada tahun 2005 berpengaruh

Penutup

terhadap menurunnya pemasukan devisa negara. Penerimaan devisa dari wisatawan mancanegara pada tahun 2004 sebesar US \$ 4,8 miliar diperkirakan menurun menjadi US \$ 4,5 miliar pada tahun 2005.

Di bidang ketenagakerjaan, meningkatnya pertumbuhan ekonomi belum mampu mengimbangi penyerapan tenaga kerja yang semakin bertambah sehingga menyebabkan bertambahnya angka pengangguran. Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) yang pada tahun 2004 tercatat 9,9 persen meningkat menjadi 10,3 persen pada tahun 2005. Sementara jika dilihat menurut daerah, propinsi dengan angka pengangguran terbuka di atas 10 persen adalah Sumatera Utara, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan dan Gorontalo. Sedangkan Bali dan Nusa Tenggara Timur mempunyai angka TPT cukup rendah yaitu kurang dari 5,5 persen.

- ADB, *Asian Development Outlook (ADO) 2006*, 2006
- ADB, *Asian Development Outlook (ADO) 2005 update*, 2005
- Bank Indonesia, *Laporan Perekonomian Indonesia 2005*, Jakarta, 2006
- Bank Indonesia, *Statistik Ekonomi dan Keuangan Indonesia Edisi Januari 2006*, Jakarta, 2006
- BPS, *Indikator Ekonomi Februari 2006*, jakarta, 2006
- BPS, *Berita Resmi Statistik Februari 2006*, jakarta, 2006
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2000*, Jakarta, 2001
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2001*, Jakarta, 2002
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2002*, Jakarta, 2003
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2003*, Jakarta, 2004
- BPS, *Laporan Perekonomian Indonesia 2004*, Jakarta, 2004
- BPS, *Keadaan Angkatan Kerja Indonesia 2005*, Jakarta, 2005
- BPS, *Statistik Kunjungan Tamu Asing 2004*, Jakarta, 2005
- BPS, *Statistik Hotel dan Akomodasi Lainnya di Indonesia 2005*, Jakarta, 2005
- IMF, *World Economic Outlook (WEO) September 2005*, 2005